

INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence
La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

Standar minimum untuk pendidikan: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan menyatakan komitmen bahwa semua individu—anak-anak, pemuda dan orang dewasa—memiliki hak atas pendidikan. Standar ini mengartikulasikan tingkat minimum dari kualitas dan akses pendidikan di masa darurat hingga masa pemulihan. Standar Minimum tersebut dapat digunakan sebagai perangkat membangun kapasitas dan pelatihan bagi lembaga-lembaga kemanusiaan, pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan keefektifan dan kualitas dari bantuan pendidikannya. Standar Minimum ini juga membantu untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepastian di kalangan para pekerja kemanusiaan dan meningkatkan koordinasi di antara mitra, termasuk otoritas pendidikan.

Pada tahun 2003-2004 INEE telah memfasilitasi sebuah proses yang sangat konsultatif untuk mengembangkan Standar Minimum dan kemudian memperbaruinya pada tahun 2009-2010. Standar Minimum dibuat berlandaskan pada Konvensi Hak Anak, Kesepakatan Dakar 2000 mengenai tujuan Pendidikan bagi semua, dan Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere.

STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan



The Sphere Project



Proyek Sphere mengakui *Standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan* sebagai Standar Pendamping bagi *Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere* dan *Standar Minimum dalam Respons Bencana*.

Pernyataan Misi

INEE (*Inter-Agency Network for Education in emergencies*) adalah sebuah jaringan global terbuka para praktisi dan pembuat kebijakan yang bekerja sama untuk menjamin hak semua orang atas pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang aman dalam situasi darurat hingga pemulihan pasca-krisis.

www.ineesite.org.

INEE Coordinator for Minimum Standards

UNICEF – Education Section

3 United Nations Plaza

New York, NY 10017

USA

minimumstandards@ineesite.org

www.ineesite.org

Untuk mendapatkan materi cetak dalam Bahasa Indonesia, silakan menghubungi:

Save the Children

Jl. Margasatwa No.26C

Ragunan Pasar Minggu

Jakarta Selatan 12550

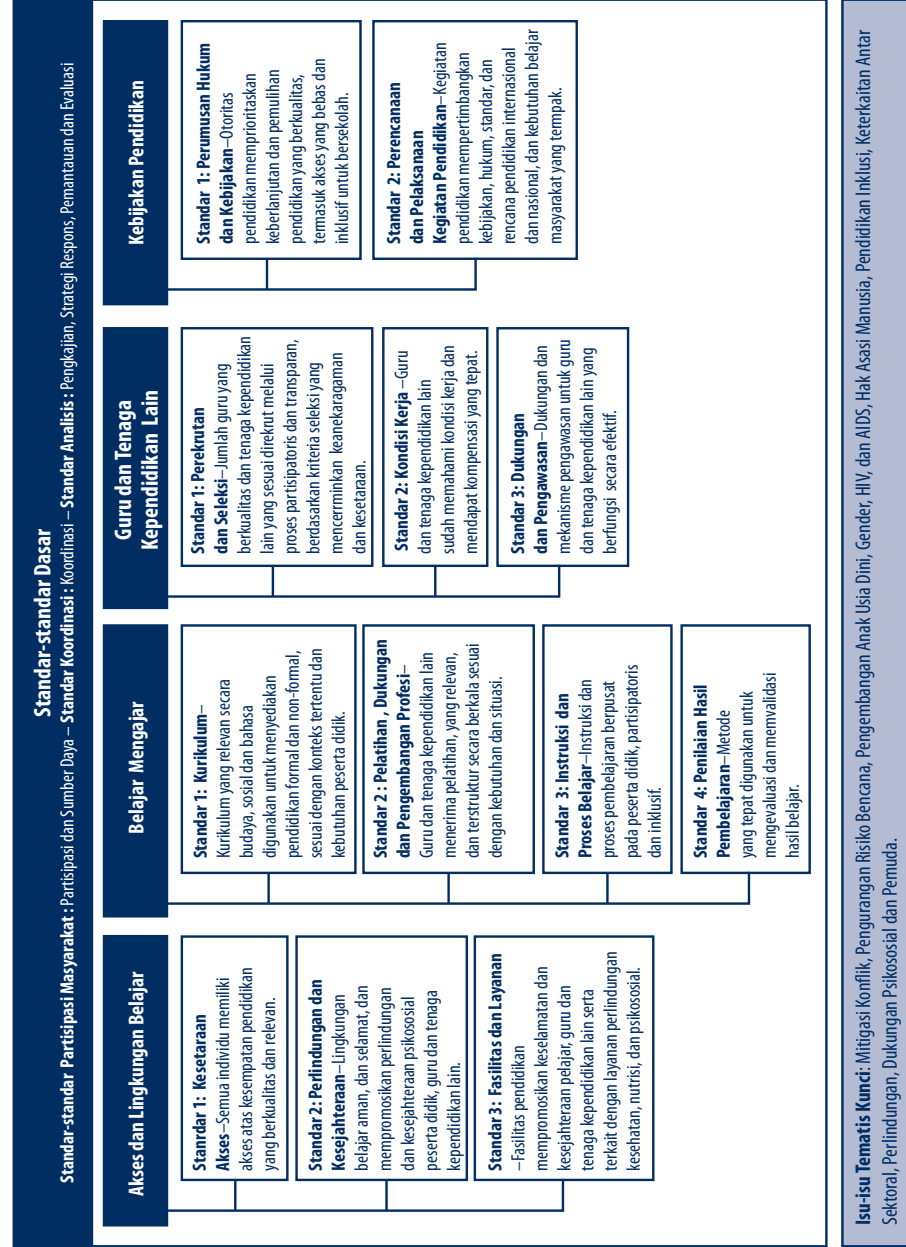
Email: indonesia@savethechildren.org

INEE

Inter Agency Network for Education in Emergencies
Réseau inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence
Réseau interagences pour la formation en Situations de Emergencia
شبكة الوكالات للتعليم في حالات الطوارئ

MAP

**STANDAR-STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN:
Kesiapsiagaan, Respon, Pemulihan**



Isu-isu Tematis Kunci: Mitigasi Konflik, Pengurangan Risiko Bencana, Pengembangan Anak Usia Dini, Gender, HIV, dan AIDS, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Inklusif, Keterkaitan Antar Sektoral, Perlindungan, Dukungan Psikososial dan Pemuda.

INEE

Inter-Agency Network for Education in Emergencies
Réseau Inter-Agences pour l'Éducation en Situations d'Urgence
La Red Inter-Institucional para la Educación en Situaciones de Emergencia
Rede Inter-Institucional para a Educação em Situação de Emergência
الشبكة المشتركة لوكالات التعليم في حالات الطوارئ

STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan

INEE (*Inter-Agency Network for Education in Emergencies*) adalah sebuah jaringan global terbuka para praktisi dan pembuat kebijakan yang bekerja sama untuk menjamin hak semua orang atas pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang aman dalam situasi darurat hingga pemulihan pasca krisis. Kelompok Pengarah INEE memimpin dan memberikan arahan secara menyeluruh untuk jaringan; anggota Kelompok Pengarah saat ini terdiri dari CARE, ChildFund International, International Rescue Committee (IRC), Refugee Education Trust (RET), Save the Children, Open Society Institute (OSI), UNESCO, UNHCR, UNICEF dan Bank Dunia.

Kelompok Kerja INEE untuk Standar Minimum bertugas memfasilitasi pelaksanaan global Standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan. Kelompok Kerja INEE (2009-2011) terdiri dari 19 organisasi dengan keahlian pendidikan dalam situasi konflik dan bencana: Academy for Educational Development (AED), ActionAid, American Institutes of Research (AIR), Basic Education for Afghan Refugees (BEFAre), the Forum for African Women Educationalists (FAWE), Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), the International Rescue Committee (IRC), Mavikalem Social Assistance and Charity Association, Norwegian Agency for Development (NORAD), Norwegian Refugee Council (NRC), Oxfam Novib, Plan International, Save the Children, UNESCO, UNHCR, UNICEF, USAID, War Child Holland, World Education, ZOA Refugee Care.

INEE berterima kasih kepada lebih dari 41 lembaga, instansi dan organisasi atas dukungan mereka terhadap jaringan ini sejak awal. Untuk daftar lengkapnya, silakan kunjungi situs INEE: **www.ineesite.org**

INEE terbuka bagi semua individu dan organisasi yang tertarik melaksanakan, mendukung, dan mengadvokasi pendidikan dalam situasi darurat. Individu yang tertarik dapat mendaftarkan diri sebagai anggota melalui situs INEE: **www.ineesite.org/join**. Keanggotaan tidak menuntut kewajiban tertentu, juga tidak dipungut biaya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi **www.ineesite.org** atau hubungi Koordinator INEE untuk Standar Minimum di **minimumstandards@ineesite.org**.

STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan



ISBN 978-602-99003-0-9

INEE Edisi Pertama, 2004

INEE Edisi Cetak Ulang, 2006

INEE Edisi Cetak Ulang, 2009

INEE Edisi Cetak Ulang, 2010

INEE Edisi Kedua, 2010

INEE Edisi Cetak Ulang, 2010

INEE Edisi Cetak Ketiga, 2010

INEE Edisi Cetak Ulang, 2012

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Bahan ini memiliki hak cipta tetapi bisa direproduksi dengan berbagai metode untuk tujuan pendidikan. Izin resmi diperlukan untuk semua tujuan tersebut, tetapi biasanya akan diberikan dengan segera. Untuk menyalin dalam bentuk lain, penggunaan kembali dalam publikasi lain, terjemahan atau adaptasi, izin tertulis harus diperoleh terlebih dahulu dari pemilik hak cipta.

Edisi versi Bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) dan didanai oleh Plan Indonesia, serta diterbitkan oleh MOC Publishing, di Jakarta tahun 2011.

Edisi versi Bahasa Indonesia yang telah diedit ulang didanai oleh Save the Children, serta diterbitkan oleh MOC Publishing, di Jakarta tahun 2012.

Foto sampul: Plan Indonesia

DAFTAR ISI

Pendahuluan atas Standar Minimum untuk Pendidikan:

Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan..... 2

Domain Satu: Standar Dasar 24

Partisipasi Masyarakat

Standar 1: Partisipasi29

Standar 2: Sumber Daya37

Koordinasi

Standar 1: Koordinasi41

Analisis

Standar 1: Pengkajian46

Standar 2: Strategi Respons54

Standar 3: Pemantauan60

Standar 4: Evaluasi.....64

Domain Dua: Akses dan Lingkungan Belajar 68

Standar 1: Kesetaraan Akses72

Standar 2: Perlindungan dan Kesejahteraan79

Standar 3: Fasilitas dan Layanan87

Domain Tiga: Belajar-Mengajar 94

Standar 1: Kurikulum98

Standar 2: Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi 106

Standar 3: Instruksi dan Proses Belajar 110

Standar 4: Penilaian Hasil Pembelajaran 113

Domain Empat: Guru dan Tenaga Kependidikan Lain.....116

Standar 1: Perekrutan dan Seleksi 120

Standar 2: Kondisi Kerja..... 123

Standar 3: Dukungan dan Pengawasan 126

Domain Lima: Kebijakan Pendidikan..... 130

Standar 1: Perumusan Hukum dan Kebijakan..... 133

Standar 2: Perencanaan dan Implementasi 139

Lampiran-lampiran142

Lampiran 1: Daftar Istilah..... 142

Lampiran 2: Singkatan 154

Lampiran 3: Indeks 155

Lampiran 4: Formulir Umpan-Balik 164

PENDAHULUAN ATAS STANDAR MINIMUM UNTUK PENDIDIKAN: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan

Apa itu pendidikan di masa darurat?

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar bagi semua orang. Pendidikan sangat penting bagi puluhan juta anak-anak dan pemuda yang terkena dampak konflik dan bencana, namun sering secara signifikan terganggu dalam situasi darurat, mengganggu persepsi peserta didik tentang efek transformatif dari pendidikan yang berkualitas.

Pendidikan di masa darurat merupakan kesempatan belajar untuk segala usia. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, non-formal, teknis, kejuruan, pendidikan tinggi dan pendidikan bagi orang dewasa. Dalam situasi darurat sampai pemulihan, pendidikan yang berkualitas menyediakan perlindungan fisik, psikososial dan kognitif, yang dapat mempertahankan dan menyelamatkan nyawa.

Pendidikan dalam situasi darurat menjamin martabat dan menopang kehidupan dengan menawarkan tempat yang aman untuk belajar, di mana anak-anak dan pemuda yang membutuhkan bantuan lain dapat diidentifikasi dan didukung. Pendidikan yang berkualitas menyelamatkan nyawa dengan memberikan perlindungan fisik dari bahaya dan eksploitasi krisis lingkungan. Ketika peserta didik berada dalam lingkungan belajar yang aman, risiko mereka terhadap eksploitasi seksual maupun ekonomi atau paparan risiko-risiko lain seperti pernikahan dini atau pernikahan paksa, perekrutan ke dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata atau kejahatan terorganisir, akan berkurang. Selain itu, pendidikan dapat menyampaikan informasi penyelamatan kehidupan untuk memperkuat keterampilan bertahan hidup dalam situasi kritis dan mekanisme-mekanisme untuk bertahan. Contohnya termasuk informasi

tentang cara menghindari ranjau darat, bagaimana melindungi diri dari pelecehan seksual, bagaimana menghindari infeksi HIV dan cara mengakses pelayanan kesehatan serta makanan.

Peluang-peluang untuk pendidikan juga mengurangi dampak psikososial dari konflik dan bencana dengan memberikan rutinitas, stabilitas, struktur dan harapan masa depan. Dengan memperkuat keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan bertahan, pendidikan memungkinkan peserta didik untuk membuat keputusan tentang bagaimana bertahan hidup dan menjaga diri mereka sendiri serta orang lain dalam lingkungan yang berbahaya. Ini dapat membantu orang berpikir kritis tentang pesan-pesan politik atau sumber informasi yang saling bertentangan.

Sekolah-sekolah dan ruang-ruang belajar lainnya dapat bertindak sebagai pintu masuk untuk penyediaan dukungan penting di luar sektor pendidikan seperti perlindungan, nutrisi, air dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Koordinasi antara para pekerja dalam sektor pendidikan, perlindungan, penampungan, air dan sanitasi, kesehatan dan psikososial, penting dalam membangun ruang yang aman dan ramah-pelajar. Pendidikan yang berkualitas berdampak langsung kepada stabilitas sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga membantu mengurangi risiko akibat konflik kekerasan dengan meningkatkan hubungan sosial yang erat dan mendukung resolusi konflik serta pembangunan perdamaian.

Namun, meskipun peluang menciptakan perdamaian jangka panjang semakin besar, jika penduduk yang terkena dampak konflik adalah masyarakat terdidik, pendidikan juga dapat berdampak negatif pada perdamaian dan stabilitas. Pendidikan dapat mendukung konflik jika memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi sosial dengan membatasi akses pendidikan bagi beberapa pelajar, atau jika kurikulum atau pengajaran praktik bersifat bias. Selama konflik, fasilitas pendidikan bisa menjadi target sasaran, pelajar dan tenaga kependidikan dapat diserang dalam perjalanan ke dan dari sekolah. Reformasi pendidikan yang dirancang dengan baik, yang dapat dimulai segera setelah situasi darurat, diperlukan untuk membantu menjamin perlindungan sistem pendidikan dan masyarakat

yang terkena dampak konflik dalam menuju perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Krisis dapat memberikan kesempatan bagi otoritas nasional, masyarakat dan pemangku kepentingan internasional untuk bekerja bersama menuju transformasi sosial dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan terstruktur. Kelompok yang sering diabaikan, seperti anak-anak, perempuan, pemuda, anak-anak berkebutuhan khusus, pengungsi dan pengungsi internal (IDP), dapat memperoleh manfaat dari kesempatan itu untuk pencapaian pendidikan. Ini bisa menjadi bonus dari krisis, yang berakibat meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat.

Krisis memberikan kesempatan untuk mengajar semua anggota masyarakat tentang keterampilan dan nilai-nilai baru, seperti pentingnya pendidikan inklusif, partisipasi dan toleransi, resolusi konflik, hak asasi manusia, pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana. Tidak boleh tidak, pendidikan dalam situasi darurat hingga pemulihan adalah sesuai dan relevan. Pendidikan harus mengajarkan kemampuan baca tulis dan keterampilan berhitung, menyediakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mendorong berpikir kritis. Pendidikan dapat membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan melalui pengajaran tentang bahaya, mempromosikan sekolah sebagai pusat pengurangan risiko bencana masyarakat dan pemberdayaan anak-anak serta pemuda sebagai pemimpin dalam pencegahan bencana.

Bagaimana pendidikan sesuai dalam tanggap kemanusiaan?

Masyarakat memprioritaskan pendidikan di masa krisis. Sekolah-sekolah dan ruang-ruang belajar lain sering berada di hati masyarakat dan melambangkan peluang masyarakat untuk generasi masa depan dan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Peserta didik dan keluarga mereka memiliki aspirasi, dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kemampuan setiap orang untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat mereka – ekonomi, sosial dan politik.

Sampai saat ini, bantuan kemanusiaan akan berujung pada penyediaan

makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi serta perawatan kesehatan. Pendidikan dilihat sebagai bagian dari pekerjaan pembangunan jangka panjang dan bukan sebagai respons yang diperlukan untuk situasi darurat.

Namun, peran pendidikan dalam mempertahankan hidup dan penyelamatan kehidupan telah diakui, dan masuknya pendidikan dalam tanggap kemanusiaan kini dianggap penting.

Pendidikan merupakan bagian integral dari perencanaan dan penyediaan respons kemanusiaan, setelah pemberian bantuan langsung. Koordinasi dan kolaborasi antara sektor pendidikan dan sektor darurat lain penting bagi suatu respons yang efektif yang membahas hak-hak dan kebutuhan semua peserta didik. Hal ini tercermin dalam Perjanjian Kemitraan antara *Sphere-INEE* dan cara kerja dari *Inter-Agency Standing Committee (IASC)'s Education Cluster* (lihat bagian mengenai hubungan strategis pada halaman 20-22).

Respons kemanusiaan digambarkan sebagai kontinum yang melibatkan kesiapsiagaan bencana sebelum krisis dan tanggap dalam situasi darurat meluas ke pemulihan awal. Dalam situasi ketidakstabilan kronis, perkembangan linear sering tidak sesuai dengan kenyataan. Namun, situasi ini dapat menawarkan kerangka kerja yang bermanfaat untuk analisis dan perencanaan.

Apa yang dimaksud dengan Standar Minimum INEE?

Buku Pegangan Standar-standar Minimum INEE berisi 19 standar, masing-masing disertai aksi kunci dan catatan panduan. Buku ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, meningkatkan akses ke kesempatan belajar yang relevan dan aman serta menjamin akuntabilitas dalam memberikan layanan ini.

The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) memfasilitasi proses konsultasi yang melibatkan otoritas nasional, praktisi, pembuat kebijakan, akademisi dan pendidik lain di seluruh dunia dalam pengembangan buku ini pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2010 (lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut). Panduan dalam Buku Panduan Standar Minimum INEE ini dirancang untuk digunakan dalam menanggapi

krisis dalam berbagai situasi, termasuk bencana yang disebabkan oleh bencana alam dan konflik, bencana yang terjadi secara perlahan-lahan ataupun cepat serta situasi darurat di lingkungan pedesaan dan perkotaan.

Fokus dari Buku Panduan Standar Minimum INEE adalah untuk memastikan respons kemanusiaan yang terkoordinasi dan berkualitas: terpenuhinya hak-hak pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang terkena bencana melalui proses yang menegaskan martabat mereka. Adalah penting untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan dengan sektor pendidikan. Khususnya dalam konteks dampak konflik, periode stabilitas yang terganggu oleh konflik, ketidakstabilan dan krisis kemanusiaan. Dalam situasi seperti ini, organisasi-organisasi kemanusiaan dan pembangunan sering bertindak secara bersamaan dalam mendukung pendidikan. Koordinasi dan kerja sama yang erat antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mendukung pendidikan yang efektif, termasuk selama masa transisi dari bantuan kemanusiaan ke bantuan pembangunan. Buku ini memberikan pedoman bagaimana mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat akut dengan cara-cara pengurangan risiko, meningkatkan kesiapsiagaan masa depan dan meletakkan dasar yang kuat untuk pendidikan yang berkualitas. Hal ini memberikan kontribusi untuk membangun kembali sistem pendidikan yang lebih kuat dalam tahap pemulihan dan pembangunan.

Bagaimana Standar Minimum INEE dikembangkan?

Pada tahun 2003-2004, Standar Minimum INEE dikembangkan, diperdebatkan dan disepakati melalui proses partisipatoris, konsultasi lokal, nasional dan regional, konsultasi *online* melalui *listserv* INEE dan proses *peer review*. Proses konsultasi yang panjang mencerminkan pedoman prinsip-prinsip INEE dalam hal kolaborasi, transparansi, efektivitas biaya dan pengambilan keputusan yang konsultatif. Lebih dari 2.250 orang yang berasal dari lebih 50 negara memberikan kontribusi terhadap penyusunan edisi pertama Standar Minimum INEE. Pada tahun 2009-2010, berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang diterima dari pengguna standar minimum ini, jaringan memulai proses pembaruan untuk memastikan bahwa buku pedoman:

- mencerminkan perkembangan terakhir di bidang pendidikan di masa darurat;
- menggabungkan pengalaman dan praktik-praktik secara baik dari orang yang menggunakan buku pegangan dan menyesuaikan standar dengan konteks mereka;
- lebih ramah-pengguna (*user-friendly*) dibandingkan buku pegangan edisi 2004.

Standar Minimum INEE 2010 dibangun melalui proses konsultasi dan hubungan yang kuat antara INEE dan praktisi-praktisi pendidikan, kemanusiaan dan pembangunan dan para pembuat kebijakan. Langkah-langkah kunci dalam proses ini, yang melibatkan lebih dari 1.000 orang dari seluruh dunia, termasuk analisis umpan balik pada buku panduan, konsultasi *online*, penguatan isu-isu berlapis-sanding melalui konsultasi kelompok ahli, konsolidasi dari setiap domain standar, sebuah *peer review* dan tinjauan *online* dengan anggota INEE melalui jaringan *listserv*.

Kerangka kerja hak asasi manusia untuk menjamin hak untuk kehidupan yang bermartabat

Hak asasi manusia, hukum kemanusiaan dan pengungsi merupakan pokok perjanjian hukum internasional dan standar normatif yang menjamin dan mengatur hak asasi manusia dalam waktu-damai dan selama krisis akibat konflik dan bencana. Standar Minimum INEE berasal atau diturunkan dari hak asasi manusia dan secara khusus dari hak atas pendidikan, sebagaimana diungkapkan dalam dokumen penting hak asasi manusia.

Deklarasi Jomtien tahun 1990, Kerangka Kerja Aksi Forum Pendidikan Dunia untuk mempromosikan Pendidikan bagi Semua tahun 2000 dan *Millenium Development Goals* tahun 2000, meskipun tidak mengikat secara hukum, telah menegaskan kembali dan dalam beberapa kasus lebih lanjut mengembangkan hak atas pendidikan. Berbagai deklarasi tersebut memberikan perhatian khusus untuk pendidikan dalam situasi krisis, termasuk yang menimbulkan populasi pengungsian seperti pengungsi lintas batas dan penyintas (IDP). Mereka menekankan pendidikan anak usia dini, akses kepada program pembelajaran untuk semua orang muda dan

orang dewasa, serta peningkatan kualitas program pendidikan yang ada.

Standar Minimum INEE juga berasal dan diturunkan dari Piagam Kemanusiaan - Proyek Sphere. Piagam Kemanusiaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum kemanusiaan internasional, hukum hak asasi manusia internasional, hukum pengungsi dan Kode Etik Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah serta Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dalam Penanggulangan Bencana. Piagam Kemanusiaan menyatakan bahwa semua orang yang terkena bencana dan konflik bersenjata memiliki hak untuk menerima bantuan dan perlindungan untuk memastikan kondisi-kondisi dasar untuk hidup dengan bermartabat dan aman. Piagam kemanusiaan ini menunjukkan tanggung jawab hukum dari negara dan pihak-pihak yang berperang untuk menjamin hak atas perlindungan dan bantuan. Ketika otoritas terkait tidak mampu atau tidak mau untuk memenuhi tanggung jawab mereka, mereka berkewajiban untuk memungkinkan organisasi kemanusiaan untuk memberikan perlindungan dan bantuan (lihat www.sphereproject.org).

Instrumen hukum internasional yang mendasari Standar Minimum INEE

Universal Declaration of Human Rights (1948) (Pasal 2, 26)

Fourth Geneva Convention (1949) (Pasal 3, 24, 50) dan Additional Protocol II (1977) (Pasal 4.3 (a))

Convention Relating to the Status of Refugees (1951) (Pasal 3, 22)

International Covenant on Civil and Political Rights (1966) (Pasal 2)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966) (Pasal 2, 13, 14)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979) (Pasal 10)

Convention on the Rights of the Child (1989) (Pasal 2, 22, 28, 29, 30, 38, 39)

Rome Statute of the International Criminal Court (1998) (Pasal 8(2)(b)(ix) dan 8(2)(e)(iv))

Guiding Principles on Internal Displacement (tidak-mengikat) (1998) (Ayat 23)

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (2006) (Pasal 24)

Adakah hak atas pendidikan dalam situasi darurat?

Ya. Hak asasi manusia adalah universal dan berlaku meskipun dalam situasi darurat. Hak untuk pendidikan adalah hak asasi manusia dan sekaligus hak pendukung. Pendidikan memberikan keterampilan yang dibutuhkan manusia untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya dan untuk melaksanakan hak-hak mereka yang lain, seperti hak untuk hidup dan hak akan kesehatan. Sebagai contoh, jika seseorang dapat membaca peringatan keselamatan tentang ranjau darat, maka dia tahu untuk menghindari lapangan yang penuh dengan ranjau. Kemampuan baca tulis juga mendukung hak atas kesehatan. Hal ini memungkinkan orang untuk membaca instruksi medis dari dokter dan dengan benar mengikuti petunjuk dosis obat yang tertera di botol obat.

Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua, merupakan tanggung jawab utama otoritas nasional, yang didelegasikan kepada kementerian pendidikan dan otoritas pendidikan setempat. Dalam situasi darurat, pemangku kepentingan lain – organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), LSM nasional maupun internasional dan organisasi berbasis masyarakat – juga melakukan kegiatan pendidikan. Dalam konteks di mana pemerintah lokal dan nasional yang relevan tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya, para pemangku kepentingan dapat memikul tanggung jawab atas penyediaan pendidikan. Buku Pegangan Standar Minimum INEE menyediakan kerangka kerja praktik yang baik bagi semua pemangku kepentingan untuk membantu mencapai pendidikan yang berkualitas.

‘Pendidikan yang berkualitas’ adalah pendidikan yang tersedia, bisa diakses, bisa diterima dan mudah diadaptasi. Standar Minimum INEE mengambil bahasa dan semangat hukum hak asasi manusia sebagai dasar perencanaan pendidikan. Standar ini membantu mencapai pendidikan berkualitas dengan membawa prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi dan perlindungan hukum.

MENGGUNAKAN BUKU STANDAR MINIMUM INEE

Apa isi Standar Minimum INEE?

Standar Minimum INEE diatur dalam lima domain:

Standar Dasar: standar ini telah direvisi dan diperluas untuk mencakup koordinasi serta partisipasi dan analisis masyarakat. Standar ini harus diterapkan pada semua domain untuk meningkatkan respons yang berkualitas dan menyeluruh. Standar ini memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan untuk diagnosis yang baik pada semua tahap siklus proyek, dalam rangka untuk lebih memahami konteks dan menerapkan standar yang lebih tepat dalam domain yang mengikutinya.

Akses dan Lingkungan Belajar: standar dalam domain ini berfokus pada akses informasi kesempatan belajar yang relevan dan aman. Standar-standar ini menyoroti hubungan penting dengan sektor lain seperti kesehatan, air dan sanitasi, gizi dan tempat tinggal yang membantu meningkatkan keamanan,



keselamatan dan fisik, kognitif dan kesejahteraan psikologis.

Belajar-Mengajar: standar-standar ini berfokus pada elemen-elemen penting yang mempromosikan pengajaran dan belajar secara efektif, termasuk kurikulum, pelatihan, pengembangan profesi dan dukungan, instruksi dan proses pembelajaran, serta penilaian hasil belajar.

Guru dan Tenaga Kependidikan Lain: standar dalam domain ini meliputi administrasi dan manajemen sumber daya manusia di bidang pendidikan, termasuk di dalamnya adalah perekrutan dan seleksi, kondisi pelayanan, serta pengawasan dan dukungan.

Kebijakan Pendidikan: standar dalam domain ini berfokus pada perumusan kebijakan dan pemberlakuannya, perencanaan serta pelaksanaan.

Setiap bagian dari buku ini menggambarkan suatu domain yang spesifik dari pekerjaan pendidikan. Namun, setiap standar juga saling bersinggungan dengan standar lain. Apabila diperlukan, catatan panduan mengidentifikasi hubungan penting dengan standar-standar lain yang relevan atau catatan panduan dalam domain lain untuk memberikan pandangan yang komprehensif dari kualitas pendidikan.

Apa yang baru dalam Buku Pegangan Standar Minimum edisi 2010?

Bagi mereka yang telah akrab dengan Buku Pegangan edisi 2004 akan banyak mengenali isi dari edisi ini. Beberapa perbaikan:

- penguatan analisis konteks dan isu-isu kunci: perlindungan, dukungan psikososial, mitigasi konflik, pengurangan risiko bencana, pendidikan anak usia dini, gender, HIV dan AIDS, hak asasi manusia, pendidikan inklusif, hubungan antar-sektoral (kesehatan, air, sanitasi dan promosi kesehatan; tempat tinggal, makanan dan nutrisi) dan pemuda. Perangkat untuk membantu pelaksanaan isu-isu kunci, dapat dilihat dalam *toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit
- dimasukkannya aksi kunci, dan bukannya indikator utama yang perlu diambil dalam rangka memenuhi standar (lihat kotak pada halaman 13);
- perubahan nama domain pertama dari 'Standar Umum untuk semua Kategori' menjadi 'Standar Dasar', untuk mencerminkan kebutuhan penggunaan standar-standar ini sebagai dasar dari semua pekerjaan pendidikan. Selain itu, mengingat kebutuhan akan koordinasi di semua pekerjaan pendidikan, standar pada Koordinasi telah dipindahkan ke domain ini dari domain Kebijakan Pendidikan.

Analisis Konteks

Penduduk yang terkena bencana harus menjadi pusat respons kemanusiaan, dan ini menjadi pusat pembaruan Standar Minimum INEE. Bencana dan konflik memiliki perbedaan dampak bagi masyarakat karena ketidaksetaraan pengendalian atas sumber daya dan kekuasaan. Kerentanan merupakan karakteristik atau situasi yang membuat orang lebih rentan terhadap kerusakan akibat bencana atau konflik. Konteks sosial, generasi, fisik, ekologis, budaya, geografis, ekonomi dan politik di mana orang hidup, berperan dalam menentukan kerentanan. Tergantung pada konteksnya, kelompok rentan termasuk perempuan, orang berkebutuhan khusus, anak-anak, anak perempuan, anak-anak yang sebelumnya terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, juga orang-orang yang terkena HIV. Kapasitas merupakan kombinasi dari kekuatan, atribut dan sumber daya yang tersedia dalam individu, komunitas, masyarakat atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Untuk memahami bagaimana konteks memengaruhi kerentanan dan kapasitas, pemangku kepentingan pendidikan perlu mempertimbangkan kerentanan dan kapasitas yang tumpang tindih dan berubah dalam analisis mereka terhadap konteks lokal. Dalam beberapa konteks, orang mungkin menjadi lebih rentan sebagai akibat dari etnis, kelas atau kasta, pengungsian, afiliasi politik atau keagamaan. Unsur-unsur ini dapat memengaruhi akses kepada layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk alasan ini, analisis yang komprehensif atas kebutuhan orang, kerentanan, dan kapasitas dalam konteks masing-masing sangat penting bagi respons kemanusiaan yang efektif. Standar Dasar mencakup pedoman analisis konteks, juga telah diurutkan dalam keseluruhan buku pegangan ini.

Untuk mengurangi kerentanan dalam sebuah krisis, penting untuk mengenali ketahanan dan kapasitas mereka dan mengembangkan berdasarkan kedua hal tersebut. Memahami dan mendukung respons lokal serta mengembangkan kapasitas pelaku lokal merupakan prioritas utama. Dengan memperkuat analisis konteks dalam Standar Dasar dan mengurutkan isu-isu kunci, Buku Pegangan 2010 menyediakan kerangka kerja untuk dapat memusatkan perhatian pada konteks,

kerentanan dan kapasitas dari kesiapsiagaan, respons dan pemulihan pendidikan secara komprehensif.

Apa perbedaan antara standar, aksi kunci dan catatan panduan?

Setiap standar mengikuti format yang sama. Pertama, **Standar Minimum** yang ditetapkan. Standar-standar tersebut berasal dari prinsip bahwa penduduk yang terkena bencana atau konflik memiliki hak untuk hidup bermartabat dan untuk mendapatkan pendidikan yang aman, berkualitas dan relevan. Oleh karena itu, standar-standar ini bersifat kualitatif dan dimaksudkan untuk menjadi universal dan berlaku dalam konteks apapun.

Standar diikuti oleh serangkaian **aksi kunci**, yang menyarankan cara-cara untuk mencapai standar. Beberapa tindakan mungkin tidak berlaku dalam semua konteks, mereka harus disesuaikan dengan konteks tertentu. Praktisi dapat merencanakan tindakan alternatif sehingga standar dapat dipenuhi.

Catatan panduan mencakup hal-hal tertentu dari praktik yang baik untuk dipertimbangkan ketika menerapkan standar minimum dan menyesuaikan aksi kunci dalam situasi yang berbeda. Catatan panduan menawarkan saran-saran tentang isu-isu yang diprioritaskan dan tentang bagaimana mengatasi kesulitan praktis, sementara juga menyediakan informasi latar belakang dan definisi.

Siapa yang harus menggunakan Standar Minimum INEE?

Semua pihak yang terlibat dalam kesiapsiagaan, respons dan pemulihan pendidikan terhadap/di masa bencana, termasuk pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik, harus menggunakan dan mempromosikan standar minimum, aksi kunci dan catatan panduan. Standar minimum menyediakan kerangka pengetahuan teknis dan praktik yang baik untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan aman, untuk membawa pemangku kepentingan bersama-sama ke tingkat negara dan global.

Pemangku kepentingan mencakup:

- otoritas pendidikan di tingkat nasional dan lokal;
- badan-badan PBB;
- lembaga donor bilateral dan multilateral;
- LSM dan organisasi berbasis masyarakat, termasuk komite sekolah;
- guru, tenaga kependidikan lainnya dan serikat guru;
- komite koordinasi sektor pendidikan dan Klaster Pendidikan;
- konsultan pendidikan;
- peneliti dan akademisi;
- advokasi kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Bagaimana cara mengadaptasi Standar Minimum INEE ke dalam konteks lokal saya?

Berdasarkan hak asasi manusia, terdapat ketegangan antara standar universal dan kemampuan penerapan dalam praktiknya. Standar ini menetapkan tujuan untuk akses kepada pendidikan berkualitas dalam hal-hal yang universal, sementara aksi kunci merepresentasikan langkah khusus yang diperlukan untuk mencapai masing-masing standar. Karena setiap konteks berbeda, aksi kunci dalam buku pegangan harus disesuaikan dengan situasi lokal yang spesifik. Sebagai contoh, aksi kunci pada rasio guru-murid menyatakan bahwa 'sejumlah guru harus direkrut untuk menjamin rasio guru-murid yang sesuai' (lihat Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 122). Ini harus dikontekstualisasikan dengan menentukan, dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait, rasio guru-murid yang diterima secara lokal. Sementara 60 murid per guru mungkin rasionya bisa diterima dalam tahap kedaruratan akut, jumlah tersebut dapat diharapkan untuk menurun ke 30 atau 40 siswa per guru dalam krisis kronis atau dalam konteks pemulihan Konteks, termasuk sumber daya yang tersedia, dan tahap situasi darurat harus dipertimbangkan dalam menentukan tindakan yang kontekstual yang dapat diterima secara lokal.

Idealnya, proses kontekstualisasi harus terjadi sebelum situasi kedaruratan sebagai bagian dari perencanaan kontingensi pendidikan dan kesiapsiagaan. Pengalaman pengguna Standar Minimum INEE telah menunjukkan bahwa kontekstualisasi lebih efektif jika dilakukan secara partisipatoris dan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya, komite koordinasi sektor pendidikan atau Klaster Pendidikan merupakan forum ideal untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang relevan, nyata dan dapat diterapkan secara lokal untuk memenuhi standar (untuk panduan Kontekstualisasi Standar Minimum INEE, kunjungi *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit).

Dalam beberapa kasus, faktor lokal membuat realisasi standar minimum dan aksi kunci tidak tercapai dalam jangka pendek. Ketika ini terjadi, sangat penting untuk merenungkan dan memahami kesenjangan antara standar

dan aksi kunci yang tercantum di dalam buku pegangan dan realitas dalam konteks lokal. Tantangan harus diperiksa dan strategi untuk perubahan diidentifikasi dalam rangka mewujudkan standar. Program dan kebijakan strategi kemudian dapat dikembangkan dan advokasi dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan.

Standar Minimum INEE dikembangkan untuk memperbaiki cara di mana aksi kemanusiaan bertanggung jawab atas hak-hak pendidikan dan kebutuhan orang yang terkena dampak bencana. Tujuannya adalah untuk membuat perbedaan yang signifikan bagi kehidupan orang-orang yang terkena krisis. Tidak ada satupun buku pegangan yang bisa mencapai ini – hanya Anda yang dapat mewujudkannya. INEE menyambut umpan balik Anda terhadap Standar Minimum INEE edisi 2010 ini, yang akan membantu menginformasikan revisi mendatang. Silakan menggunakan Formulir umpan-balik yang terdapat pada bagian belakang buku pegangan atau di situs www.ineesite.org/feedback.

Perangkat untuk membantu melaksanakan dan melembagakan Standar Minimum INEE

Bahan-bahan untuk mendukung penerapan dan pelembagaan Standar Minimum INEE tersedia di situs INEE: www.ineesite.org/standards.

Terjemahan Standar Minimum INEE:

www.ineesite.org/translations

Buku pegangan Standar Minimum INEE edisi 2004 tersedia dalam 23 bahasa. Edisi sekarang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Perancis, Spanyol, Portugis dan bahasa lainnya.

Toolkit INEE:

www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE berisi Buku Pegangan Standar Minimum INEE, pelatihan dan materi promosi (termasuk semua terjemahan), serta alat praktis untuk menyesuaikan indikator dengan pengaturan lokal dalam rangka mewujudkan standar. Perangkat ini dihubungkan dengan setiap domain dalam buku pegangan serta pengarusutamaan isu-isu kunci di buku pegangan. *Toolkit* ini juga berisi berbagai perangkat INEE yang telah dikembangkan untuk melengkapi dan mendukung Buku Pegangan Standar Minimum INEE: misalnya, Catatan Panduan untuk Konstruksi Sekolah yang Lebih Aman, Catatan Panduan tentang Kompensasi Guru, Catatan Panduan tentang Belajar dan Mengajar, Buku Saku untuk Pendidikan Inklusif dan Buku Saku Gender.

Perangkat referensi Standar Minimum INEE:

www.ineesite.org/MSreferencetool

Perangkat ini adalah panduan referensi cepat dalam bentuk pamflet 'yang sulit dirusak', daftar semua standar, aksi kunci dan catatan panduan dalam format yang mudah dibaca.

Daftar-pembanding Pelembagaan Standar Minimum INEE:

www.ineesite.org/institutionalisation

Dikembangkan untuk menargetkan kebutuhan khusus dari berbagai jenis organisasi (badan-badan PBB, LSM, pemerintah, donor dan badan-badan koordinasi pendidikan dan kelompok pendidikan), daftar-pembanding ini mengartikulasikan berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh organisasi untuk mengintegrasikan standar minimum internal dan kerja-kerja bilateral serta multilateral.

Bagaimana sebaiknya saya menggunakan Standar Minimum INEE?

Selalu gunakan Standar Dasar ketika menerapkan standar-standar dalam domain lainnya: Akses dan Lingkungan Belajar, Belajar-Mengajar, Guru dan Tenaga Kependidikan Lain, dan Kebijakan Pendidikan. Bacalah juga pengantar singkat untuk setiap domain standar, yang menetapkan isu utama yang relevan dengan domain tersebut. Perangkat bantu teknis untuk praktik yang baik untuk membantu menerapkan standar dapat ditemukan dalam *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit.

Buku Pedoman Standar Minimum INEE ini dirancang untuk digunakan pada saat tanggap kemanusiaan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (lihat contoh 1 pada halaman 18). Buku Pedoman ini akan paling efektif jika para pemangku kepentingan pendidikan sudah akrab dengan buku pedoman dan telah menerima pelatihan sebelum menggunakannya selama tanggap darurat akut (lihat contoh 2 pada halaman 18). Buku ini berguna sebagai alat bantu pelatihan untuk peningkatan kapasitas. Buku ini juga dapat digunakan sebagai alat advokasi saat menegosiasikan urusan kemanusiaan dan penyediaan sumber daya (lihat contoh 3 pada halaman 19). Buku pedoman ini berguna untuk kesiapsiagaan terhadap bencana, perencanaan kontingensi dan koordinasi sektor.

KITA BISA MEMENUHI STANDAR MINIMUM INEE

Sejak diluncurkan pada tahun 2004, Buku Pedoman Standar Minimum INEE telah terbukti menjadi alat yang efektif di lebih dari 80 negara untuk mempromosikan pendidikan berkualitas sejak awal masa darurat hingga tahap pemulihan. Standar-standar ini memberikan kerangka kerja umum dan memfasilitasi pengembangan tujuan bersama antar pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk anggota pemerintah, masyarakat dan lembaga internasional. Pengguna Standar Minimum INEE telah melaporkan bahwa buku pedoman ini membantu untuk:

- memastikan bahwa masyarakat terlibat sepenuhnya dalam perancangan dan pelaksanaan program pendidikan di masa darurat hingga tahap pemulihan;
- mengkoordinasikan pengkajian pendidikan dan respons yang lebih baik;
- memperkuat sistem pendidikan nasional;
- berkontribusi dalam perbaikan pelayanan;
- memantau dan mengevaluasi kerja pendidikan dalam situasi darurat hingga pemulihan dan pembangunan;
- membangun kapasitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengimplementasikan program pendidikan berkualitas tinggi;
- membantu donor berinvestasi di sektor pendidikan.

Standar Minimum INEE juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas kunci untuk penyedia pendidikan. Semakin banyak lembaga donor yang menggunakannya sebagai kerangka kerja akuntabilitas dan kualitas untuk proyek-proyek pendidikan yang mereka dukung.

Berikut ini adalah contoh bagaimana standar-standar telah digunakan dalam konteks tertentu:

1. *Rehabilitasi sekolah di Irak*: Usai pertempuran yang telah menyebabkan orang meninggalkan rumah mereka, Standar Minimum INEE digunakan untuk menginformasikan rehabilitasi lima sekolah di kota Fallujah. Pada tahun 2007, siswa, orang tua dan guru, baik yang kembali maupun orang-orang yang tinggal selama pertempuran, mengambil bagian dalam diskusi kelompok terbatas untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dalam program rehabilitasi sekolah. Mengacu pada panduan standar Partisipasi Masyarakat serta domain Akses dan Lingkungan Belajar, air dan sanitasi serta penyiapan ruang kelas diprioritaskan, juga dibentuk Komite Pendidikan Masyarakat (*Community Education Committee - CEC*). Untuk memastikan partisipasi perempuan dalam CEC, staf proyek perempuan bertemu dengan ibu dan siswi muda di rumah mereka untuk mengidentifikasi alasan rendahnya partisipasi perempuan di sekolah. Kekhawatiran tentang keselamatan anak-anak perempuan yang pergi ke sekolah, ditangani dengan mengatur agar siswa-siswa perempuan berjalan ke sekolah bersama-sama atau dengan seorang pendamping. Ketidaknyamanan karena hanya guru laki-laki yang bekerja di sekolah membuat CEC bekerja bersama pihak administrasi sekolah untuk meningkatkan transparansi prosedur perekrutan. Hal ini meyakinkan para keluarga bahwa guru bisa dipercaya untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka sehingga membantu meningkatkan pendaftaran peserta didik.
2. *Koordinasi antar-lembaga pasca tsunami Samudera Hindia*: Indonesia mengalami kehilangan banyak penduduk dan kerusakan fisik terburuk yang berkelanjutan akibat gempa bumi dan tsunami pada Desember 2004. Di Provinsi Aceh, lebih dari 44.000 siswa dan 2.500 guru serta tenaga kependidikan tewas, dan 150.000 siswa yang selamat kehilangan

akses ke fasilitas pendidikan yang layak. Dalam respons, Standar Minimum INEE diterima secara luas sebagai sebuah rancangan dan alat penerapan yang relevan, yang memungkinkan tingkat koordinasi dan praktik yang lebih baik selama fase darurat. Menggunakan Standar Minimum untuk Koordinasi, pemerintah daerah dan badan-badan internasional membentuk Komite Koordinasi Pendidikan, yang bertemu secara teratur di Banda Aceh. Kelompok Kerja Standar Minimum antar-lembaga melatih para staf lembaga untuk menggunakan standar minimum, berbagi pengalaman dan praktik yang baik. Buku pedoman itu kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan digunakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Satu hal penting yang dipelajari adalah pentingnya mempertahankan kesinambungan staf dalam menjaga laju koordinasi dan implementasi dalam situasi darurat akut. Dimasukkannya Standar Minimum INEE secara sistematis dalam pelatihan-pelatihan orientasi staf baru memberikan dampak signifikan pada peningkatan koordinasi dalam konteks darurat.

3. *Memperkuat kebijakan donor:* Norwegia merupakan salah satu dari lima donor yang secara langsung merujuk pendidikan sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan mereka, serta telah sangat mendukung INEE dan Standar Minimum. Pada tahun 2007, Departemen Luar Negeri Norwegia (MFA) membentuk *Emergency Education Team*, yang berkomitmen untuk mempromosikan peningkatan kesadaran, aplikasi praktis dan pemanfaatan sistematis Standar Minimum INEE yang disusun salah satunya oleh *the Norwegian Agency for Development (NORAD)*, MFA dan mitra-mitra lain. *Emergency Education Team* memberikan saran pada MFA dan NORAD dalam alokasi hibah untuk pendidikan dan membagi informasi yang relevan dari Buletin INEE dengan rekan-rekan yang tepat. Mereka juga merekomendasikan bahwa organisasi yang mengajukan dukungan keuangan ke NORAD harus menjelaskan penggunaan Standar Minimum INEE di organisasi mereka. Standar Minimum INEE sudah dicantumkan dalam kerangka acuan misi tahunan bersama donor (termasuk UNICEF, Bank Dunia dan Uni Eropa) untuk Sudan Selatan pada tahun 2008. NORAD selanjutnya mempromosikan penggunaan dan pelembagaan Standar Minimum

INEE oleh lembaga mitra donor dan Departemen Pendidikan Sudan Selatan, yang bertanggung jawab untuk rekonstruksi sektor pendidikan. Dalam pelembagaan atas Standar Minimum, NORAD telah didukung oleh beberapa LSM penting di Norwegia yang menjadi anggota INEE. Pada akhirnya, *Emergency Education Team* mendorong LSM-LSM dan lembaga penelitian di Norwegia untuk mengadopsi dan mengacu pada standar-standar (INEE) dalam pengembangan program mereka. Teladan kepemimpinan ditunjukkan oleh Pemerintah Norwegia melalui dukungan mereka terhadap INEE serta penerapan Standar Minimum INEE dalam diskusi global dan debat tentang pendidikan, khususnya pada guru, gender dan situasi darurat.

Untuk mengetahui contoh-contoh lain terkait penerapan dan dampak Standar Minimum INEE di seluruh Dunia, kunjungi: www.ineesite.org/MScasesstudies.

HUBUNGAN STRATEGIS

Apa hubungan antara Standar Minimum INEE dengan Standar Minimum Proyek Sphere untuk Aksi Kemanusiaan?

Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Proyek Sphere dalam Penanggulangan Bencana, yang diluncurkan pada tahun 1997 oleh sekelompok LSM kemanusiaan serta gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, mengartikulasikan hak-hak atas bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terkena dampak bencana. Buku Pedoman Sphere mencakup Piagam Kemanusiaan dan standar minimum untuk sektor penyediaan air, sanitasi dan promosi kebersihan; ketahanan pangan dan gizi; hunian, pemukiman dan bantuan non-pangan; dan pelayanan kesehatan.

Standar Minimum INEE menyiratkan inti dari Proyek Sphere: bahwa semua langkah yang memungkinkan harus diambil untuk mengurangi penderitaan manusia yang ditimbulkan oleh bencana serta konflik, dan bahwa orang yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup bermartabat. Pada bulan Oktober 2008, Proyek Sphere dan INEE menandatangani Perjanjian Pendamping di mana Proyek Sphere mengakui kualitas Standar Minimum INEE dan proses konsultasi yang luas dalam penyusunannya.

Dengan demikian, Proyek Sphere merekomendasikan Standar Minimum INEE untuk digunakan sebagai pendamping dan standar pelengkap bagi Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Proyek Sphere dalam Respons Bencana. Perjanjian Pendamping ini memperkuat pentingnya memastikan bahwa hubungan lintas-sektoral antara pendidikan dengan sektor-sektor yang direpresentasikan dalam Sphere dilaksanakan pada awal masa darurat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak krisis dan untuk meningkatkan akuntabilitas dari sistem kemanusiaan dalam kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana.

Panduan yang relevan dari Buku Pegangan Sphere direferensi-silangkan di seluruh bagian Buku Pedoman Standar Minimum INEE edisi ini. Demikian pula, panduan untuk pendidikan telah terintegrasi ke dalam Buku Pedoman Sphere edisi 2011. Penggunaan Standar Minimum INEE sebagai pendamping Buku Pedoman Sphere akan membantu untuk memastikan bahwa hubungan antar-sektoral dilakukan melalui pengkajian kebutuhan multi-sektoral, diikuti dengan perencanaan bersama dan respons yang holistik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Sphere dalam Penanggulangan Bencana, kunjungi: www.sphereproject.org.

Apa hubungan antara Standar Minimum INEE dan Klaster Pendidikan IASC?

Klaster Pendidikan, yang secara global dipimpin oleh UNICEF dan Save the Children, merepresentasikan komitmen terhadap kepastian, kesiapsiagaan dan respons dalam bidang pendidikan di masa darurat. Di mana memungkinkan, Klaster Pendidikan merupakan mekanisme koordinasi kunci untuk mendukung negara-negara dalam menentukan kebutuhan pendidikan dalam situasi darurat dan menanggapiya bersama-sama secara terkoordinasi. Standar Minimum INEE adalah alat dasar yang digunakan oleh

Klaster Pendidikan untuk menyediakan kerangka kerja untuk memastikan respons pendidikan berkualitas. Klaster Pendidikan Global dan Klaster Pendidikan berbasis-negara menggunakan standar-standar untuk:

- meningkatkan kualitas koordinasi klaster, memfasilitasi dialog antar-instansi dan pengembangan tujuan bersama;
- meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kesiapsiagaan, pengurangan risiko dan respons, termasuk melalui pengkajian kebutuhan bersama serta pemantauan dan evaluasi terkait;
- melatih staf dan mitra dan mendukung usaha-usaha pengembangan kapasitas;
- merumuskan pengembangan permohonan pendanaan;
- mendukung dialog antar-lembaga dan advokasi antara anggota klaster, donor-donor dan sektor-sektor lain.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi:

<http://onerresponse.info/GlobalClusters/Education>.

Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang Standar Minimum INEE

Bagaimana kita memastikan bahwa Standar Minimum INEE dapat memperkuat standar pemerintah untuk pendidikan yang ada?

Sudah banyak Kementerian pendidikan yang telah mengembangkan standar pendidikan nasional. INEE mengakui dan mendukung peran utama otoritas nasional dalam mendefinisikan hukum pendidikan dan kebijakan dan dalam menjamin penyediaan layanan pendidikan dasar untuk semua anak yang tinggal di negara, termasuk pengungsi, penyintas dan anggota kelompok minoritas. Dalam situasi di mana sudah ada standar nasional, perbedaan dalam lingkup, maksud dan isi antara standar-standar tersebut dan Standar Minimum INEE harus dianalisis. Pengalaman menunjukkan bahwa Standar Minimum INEE umumnya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Standar Minimum ini adalah alat yang berguna untuk melengkapi, menambah dan membantu mencapai standar nasional. Standar Minimum ini menyediakan strategi untuk implementasi dan pedoman khusus untuk situasi darurat yang mungkin tidak akan sepenuhnya dibahas dalam kebijakan atau strategi nasional.

Standar Minimum INEE menetapkan standar yang tinggi – mengapa disebut ‘minimum’?

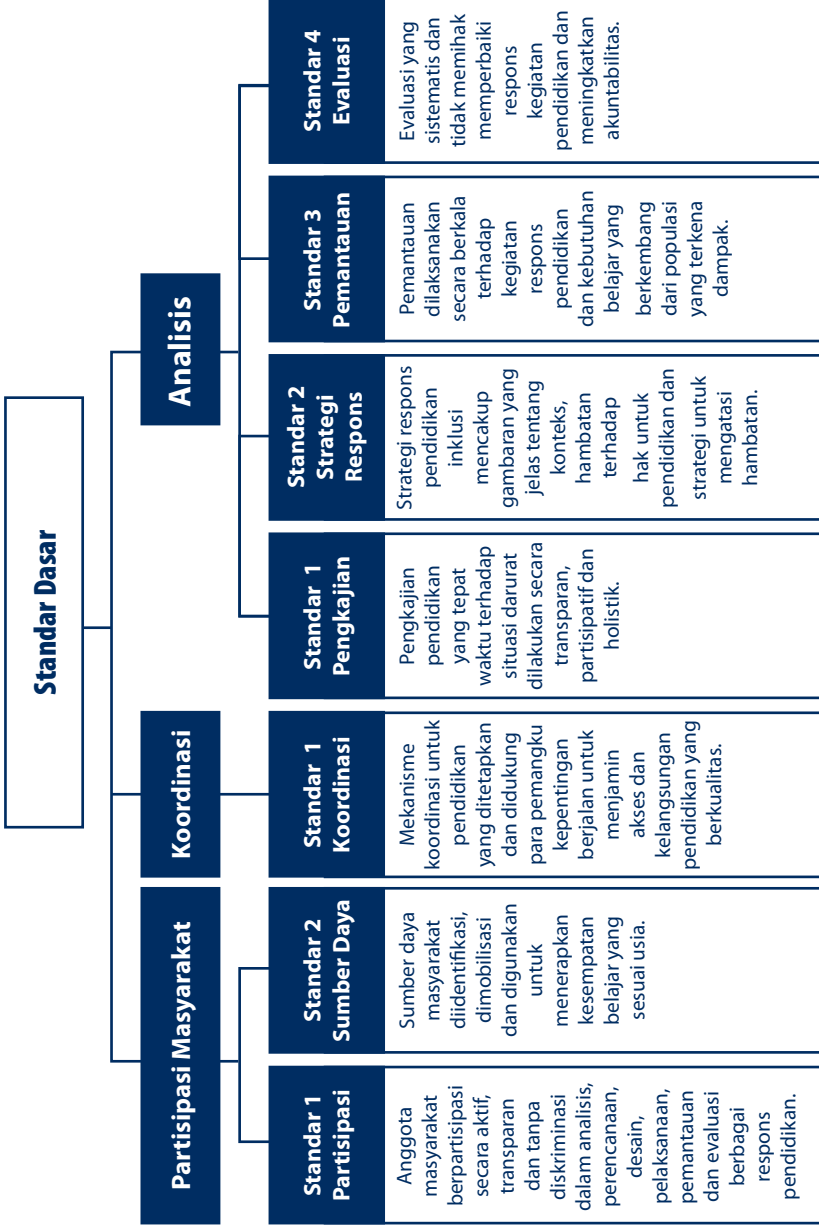
Karena Standar Minimum INEE didasarkan pada hak atas pendidikan, sebagaimana dikodifikasikan dalam berbagai instrumen hukum dan perjanjian internasional, maka panduan dalam buku pedoman ini tidak dapat berada di bawah hak-hak tersebut. Standar-standar ini mungkin tampak tinggi karena mengacu pada hak asasi manusia yang telah disepakati secara internasional serta praktik yang baik, namun standar-standar ini juga mendefinisikan persyaratan minimum untuk pendidikan yang berkualitas dan martabat manusia.

Adakah cara untuk menggunakan Standar Minimum INEE saat sumber daya keuangan dan sumber daya pendidikan terbatas?

Standar Minimum INEE dapat dipergunakan melalui tiga cara dalam konteks sumber daya yang terbatas. Pertama, banyak aspek standar mendefinisikan praktik yang baik tanpa memerlukan biaya tinggi. Sebagai contoh, standar partisipasi masyarakat tidak memerlukan banyak biaya tambahan, tetapi penerapannya dapat meningkatkan kualitas dan pendidikan kerja kemanusiaan. Hal ini membantu menghemat waktu dan sumber daya dalam jangka panjang dan dapat memberikan kontribusi berdampak positif yang lebih langgeng. Kedua, Standar Minimum INEE bisa digunakan untuk advokasi peningkatan dan pengefektifan pendanaan bagi pendidikan di masa darurat dan pemulihan. Ketiga, menggunakan Standar Minimum INEE akan memastikan bahwa otoritas pendidikan dan organisasi-organisasi lain dapat mengambil keputusan yang baik di awal respons dan menghindari biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki sebuah program atau sistem yang dirancang dengan buruk.

1

DOMAIN SATU:
STANDAR DASAR



Bab ini merinci standar untuk:

- partisipasi masyarakat: partisipasi dan sumber daya
- koordinasi
- analisis: pengkajian, strategi respons, pemantauan, evaluasi.

Standar yang dijelaskan di sini sangat penting untuk respons pendidikan yang efektif. Semua itu merupakan dasar untuk mengaplikasikan standar Akses dan Lingkungan Belajar, Belajar-Mengajar, Guru dan Tenaga Kependidikan Lain, serta Kebijakan Pendidikan.

Tanggap darurat pendidikan yang efektif didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, yakni proses dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan dan mengambil tindakan terhadap masalah pendidikan. Keterlibatan dan kepemilikan masyarakat meningkatkan akuntabilitas, memperkuat mobilisasi sumber daya lokal dan mendukung pemeliharaan pelayanan pendidikan dalam jangka panjang. Partisipasi memfasilitasi identifikasi isu-isu pendidikan khusus pada konteks lokal dan cara untuk mengatasinya. Dengan cara ini, partisipasi masyarakat dalam pengkajian, perencanaan, implementasi, pengelolaan dan pemantauan membantu untuk memastikan bahwa respons pendidikan sesuai dan efektif.

Partisipasi masyarakat sebaiknya memasukkan peningkatan kapasitas bagi anggota masyarakat dan dibangun berdasarkan kegiatan pendidikan yang sudah dan sedang dilakukan. Partisipasi anak-anak dan pemuda yang dapat berkontribusi terhadap ketahanan dan pemulihan masyarakat adalah sangat penting.

Ada berbagai tingkat dan bentuk partisipasi. Partisipasi simbolik berkisar pada penggunaan layanan sampai dengan penerimaan keputusan yang dibuat oleh orang lain. Partisipasi penuh mengacu pada kontribusi aktif atas waktu dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Pengalaman telah menunjukkan bahwa partisipasi simbolik saja tidak efektif dalam memberikan respons pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Partisipasi yang menyeluruh dan inklusif sering kali sulit dicapai dalam situasi darurat, tetapi penting untuk bekerja ke arah itu.

Otoritas pendidikan, yang bertanggung jawab untuk memastikan hak atas pendidikan bagi semua, harus memimpin koordinasi respons pendidikan. Pemangku kepentingan kemanusiaan internasional harus menawarkan dukungan dan peningkatan kapasitas kepada otoritas pendidikan, organisasi-organisasi masyarakat sipil dan aktor-aktor lokal, dengan mengupayakan agar tidak melanggar peranan mereka yang sah. Jika otoritas pendidikan kekurangan kapasitas atau wewenang, kepemimpinan dapat didelegasikan kepada komite koordinasi antar-agensi, seperti Klaster Pendidikan atau kelompok koordinasi sektoral lain, melalui sebuah kesepakatan. Koordinasi respons pendidikan harus tepat waktu, transparan, berorientasi pada hasil dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Konteks lokal dan sifat berkembang dari kebutuhan masa darurat harus dianalisis dan dipahami dengan benar untuk memberikan respons secara efektif dan memastikan respons pendidikan ‘tidak mencederai’. Analisis sektor pendidikan harus dilakukan bersama dengan sektor-sektor kemanusiaan lain. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat kedaruratan, penyebab dan efeknya bagi penduduk, serta kemampuan otoritas nasional untuk memenuhi tugas-tugas kemanusiaannya secara resmi. Analisis harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, keyakinan dan kepercayaan lokal, praktik-praktik sosial dan keterkaitan gender, faktor-faktor politik dan keamanan, mekanisme penanggulangan dan pembangunan masa depan yang terantisipasi. Kerentanan, kebutuhan, hak dan kapasitas penduduk yang terkena dampak dan lembaga-lembaga, termasuk sumber daya lokal yang tersedia dan kesenjangan dalam pelayanan pendidikan untuk semua peserta didik, harus diidentifikasi. Pemahaman masyarakat tentang ancaman bahaya lokal dan keterampilan yang mereka miliki atau yang diperlukan untuk pembangunan baik yang terkait dengan pencegahan maupun tindakan respons juga penting.

Pengumpulan dan analisis informasi harus menghasilkan data edukasional yang transparan, tersedia untuk umum dan terpilah untuk semua tahap

situasi darurat hingga pemulihan. Pengumpulan dan analisis informasi dapat berkontribusi pada konflik serta ketidakstabilan secara tidak sengaja, dan penanganan yang tepat harus dilakukan untuk menghindari hal ini. Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap respons pendidikan dan kebutuhan pendidikan yang berkembang harus inklusif dan transparan. Laporan pengawasan dan evaluasi, termasuk pelajaran yang dipetik, harus dibagikan bersama untuk meningkatkan respons pendidikan di masa depan.

Partisipasi Masyarakat Standar 1: Partisipasi

Anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif, transparan dan tanpa diskriminasi dalam analisis, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi respons pendidikan.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan):

- Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi aktif dalam memprioritaskan dan merencanakan kegiatan pendidikan untuk menjamin pendidikan yang aman, efektif dan adil (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Komite pendidikan masyarakat mencakup perwakilan dari semua kelompok yang rentan (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Anak-anak dan pemuda berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 5).
- Berbagai anggota masyarakat berpartisipasi dalam pengkajian, analisis konteks, audit sosial dari kegiatan pendidikan, tinjauan anggaran bersama, serta berbagai kegiatan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik (lihat Catatan Panduan 6).
- Kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas tersedia untuk anggota masyarakat (lihat Catatan Panduan 7).

Catatan Panduan

1. **Partisipasi masyarakat inklusif:** pemegang otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lain harus menjamin partisipasi masyarakat dalam analisis, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas berbagai respons pendidikan. Setiap anggota masyarakat yang terkena dampak harus dapat berpartisipasi, tanpa memandang usia, gender, etnis, agama, orientasi seksual, berkebutuhan khusus, berstatus HIV atau faktor lainnya.

Otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya harus melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi:

- ◆ kebutuhan pendidikan semua peserta didik;

- ◆ keuangan, material dan sumber daya manusia setempat;
- ◆ hubungan antara anak laki-laki dan perempuan, pemuda dan orang dewasa yang telah ada serta perubahan-perubahannya;
- ◆ dinamika kekuatan di dalam masyarakat, termasuk hubungan antara kelompok-kelompok bahasa, dan kelompok lain yang mungkin terkecualikan;
- ◆ masalah keamanan, kekhawatiran dan ancaman;
- ◆ berbagai cara melindungi institusi pendidikan, staff pendidikan dan peserta didik dari kemungkinan serangan, termasuk kekerasan berbasis gender;
- ◆ bahaya lokal, lokasi sekolah serta ruang belajar lain yang aman dan mudah dijangkau, serta pendekatan lokal untuk pengurangan risiko bencana;
- ◆ berbagai cara mengintegrasikan pesan-pesan tentang penyelamatan hidup dan pendidikan yang sensitif terhadap konflik ke dalam semua aspek respons pendidikan, termasuk pesan-pesan terhadap ancaman kesehatan utama dalam masyarakat.

Struktur-struktur untuk mendukung hubungan kuat antara keluarga, masyarakat dan sekolah atau ruang belajar lain harus dikembangkan melalui pendekatan partisipatoris, inklusif dan secara konsultatif (lihat juga Catatan Panduan 2-3 di bawah ini; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50; Analisis standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 57; Analisis standar 3, Catatan Panduan 1-3 pada halaman 60-62, dan Analisis standar 4, Catatan Panduan 3-4 pada halaman 65-66).

2. **'Komite pendidikan masyarakat'** mengacu pada sebuah kelompok yang mengidentifikasi dan membahas kebutuhan pendidikan dan hak-hak semua peserta didik dalam suatu komunitas. Berbagai nama lain, misalnya 'persatuan orang tua murid dan guru' atau 'komite sekolah'. Mereka dapat membantu masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas atau dengan melibatkan otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lain demi mendukung program pendidikan. Jika komite pendidikan masyarakat belum ada, pembentukannya harus didorong (lihat juga Catatan Panduan 3 dan 7 di halaman 31 dan 35).

Komite pendidikan masyarakat harus mewakili semua kelompok dalam masyarakat dan dapat mencakup:

- ◆ administrator sekolah, guru dan staf;
- ◆ orang tua atau wali murid;
- ◆ anak-anak dan pemuda;
- ◆ staf dari organisasi masyarakat sipil;
- ◆ perwakilan dari LSM lokal dan organisasi keagamaan;
- ◆ tetua adat
- ◆ pekerja kesehatan.

Hal penting lain adalah melibatkan perwakilan kelompok rentan. Anggota komite pendidikan masyarakat harus dipilih melalui proses partisipatoris yang relevan serta sesuai dengan konteks dan yang memungkinkan wanita dan pria serta anak-anak perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi secara adil.

Dalam situasi darurat yang kompleks, di mana perbedaan sosial seperti etnis, suku, agama dan ras dapat dimanfaatkan, komite pendidikan masyarakat harus bekerja dengan semua pihak. Sementara inklusi adalah tujuan, keamanan individu dan kelompok harus diutamakan. Komite harus bertujuan untuk menyediakan pendidikan dengan aman, tidak memihak dan tepat untuk semua anggota masyarakat. Mereka harus memiliki pengetahuan tentang perubahan konteks sosial-ekonomi dan politik serta berkomunikasi dengan para pengambil keputusan di semua tingkatan (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50).

3. **Peran dan tanggung jawab** anggota komite pendidikan masyarakat harus secara jelas didefinisikan dan yang mungkin termasuk:
 - ◆ bertemu secara teratur untuk menangani masalah-masalah yang muncul;
 - ◆ menyimpan catatan rapat serta berbagai keputusan;
 - ◆ memobilisasi keuangan masyarakat dan kontribusi dalam bentuk barang;
 - ◆ menentukan pendekatan yang tepat dan sensitif terhadap usia dan

budaya untuk memastikan bahwa program-program pendidikan menghormati kebutuhan dan hak-hak peserta didik. Contohnya termasuk kalender sekolah yang fleksibel dan kurikulum yang sesuai dengan usia yang mencerminkan keadaan masyarakat;

- ◆ berkomunikasi dengan masyarakat dan otoritas pendidikan daerah dan nasional untuk mempromosikan hubungan baik antara anggota masyarakat dan para pengambil keputusan di luar masyarakat tersebut;
- ◆ memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas akses dan kualitas pendidikan memang akuntabel;
- ◆ pemantauan ketentuan/syarat pendidikan untuk membantu memastikan kualitas belajar-mengajar;
- ◆ mengumpulkan dan memantau informasi terpilah mengenai siapa yang ikut dan yang tidak berpartisipasi dalam kesempatan belajar;
- ◆ mempromosikan keamanan dari serangan serta memperkuat keamanan para staf dan siswa pergi-pulang sekolah;
- ◆ memastikan bahwa pengurangan risiko bencana termasuk dalam penyediaan pendidikan;
- ◆ memastikan dukungan psikososial yang sesuai.

(Lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50).

4. **Rencana aksi pendidikan lokal:** Otoritas pendidikan setempat, masyarakat dan komite pendidikan masyarakat harus memprioritaskan serta merencanakan kegiatan pendidikan melalui proses perencanaan partisipatoris yang akan menghasilkan rencana aksi pendidikan berbasis masyarakat. Sebuah rencana pendidikan berbasis masyarakat harus mengacu pada rencana pendidikan nasional, jika ada, dan menyediakan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas program pendidikan formal dan non-formal. Hal ini harus mencerminkan kebutuhan, hak, kepedulian dan nilai-nilai dari masyarakat yang terkena dampak situasi darurat, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.

Rencana aksi pendidikan dititikberatkan pada terjaminnya kelangsungan pendidikan. Beberapa tujuannya, termasuk:

- ◆ mengembangkan visi bersama tentang lingkungan belajar-

mengajar, dijelaskan dalam bentuk kegiatan, indikator dan target, serta kerangka waktu;

- ◆ adaptasi kurikulum dengan konteks tertentu, termasuk kepekaan konflik dan pengurangan risiko bencana yang sesuai;
- ◆ menyetujui prosedur perekrutan, pengawasan dan pelatihan staf, serta kompensasi dan dukungan guru;
- ◆ mengutamakan pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan sebuah pemahaman bersama bahwa pendidikan harus tersedia, mudah dijangkau, mudah beradaptasi dan dapat diterima;
- ◆ mencapai persetujuan dan komitmen bersama pada prioritas untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung dan aman, termasuk melindungi pendidikan dari serangan;
- ◆ menggambarkan tugas dan tanggung jawab otoritas pendidikan, yang secara hukum bertanggung jawab untuk melindungi hak atas pendidikan, juga pemangku kepentingan pendidikan lain. Termasuk di dalamnya adalah mobilisasi sumber daya, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur, serta berkoordinasi dengan lembaga eksternal dan sektor lain termasuk ketahanan pangan, kesehatan, kebersihan, nutrisi, penyediaan air dan sanitasi.

Rencana aksi harus memasukkan pengkajian dan pemantauan secara teratur yang dilaksanakan oleh masyarakat untuk membantu mempertahankan partisipasi masyarakat secara luas. (lihat juga Koordinasi standar 1 pada halaman 41-45; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50; Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 2 pada halaman 123-125; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 137-138; Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 140, dan Standar Sphere dalam bab-bab tentang Air, Sanitasi dan Promosi Kebersihan, Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Layanan Kesehatan).

5. **Partisipasi anak-anak dan pemuda dalam kegiatan pendidikan:** Anak-anak dan pemuda memiliki hak untuk didengarkan dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk pengembangan

dan pengelolaan sistem pendidikan. Mereka harus diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi pada lingkungan yang aman dan ramah demi dialog yang konstruktif. Berbagai cara terkait budaya yang sesuai untuk membantu anak-anak dan pemuda mengekspresikan diri yang dapat digunakan, adalah seni, musik dan drama (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 dan 6 pada halaman 133-134 dan 137-138).

Anak-anak dan pemuda harus dilatih untuk mendukung dan melindungi kesejahteraan sosial dan emosional mereka serta anggota keluarga dan teman sebaya mereka. Anak-anak dan pemuda sering kali sangat membantu dalam mengidentifikasi siapa saja yang tidak bersekolah setelah situasi darurat dan membantu mereka untuk hadir kembali. Mereka juga dapat membantu teman yang terluka atau yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pengembangan kapasitas harus menekankan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan positif, termasuk pembangunan perdamaian dan mengatasi akar penyebab konflik dan bencana. Sebagai contoh, pelatihan dapat mendukung anak-anak dan pemuda untuk melaporkan dan mencegah penyalahgunaan dalam lingkungan belajar dan mengambil bagian dalam mediasi rekan atau resolusi konflik (lihat juga Catatan Panduan 7 halaman 35; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2 pada halaman 79-86; Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3, Catatan Panduan 5-6 pada halaman 128).

Berbagai tugas seperti distribusi bantuan atau membangun tempat penampungan dapat memberikan peluang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang penting bagi masyarakat mereka. Partisipasi tersebut dapat menawarkan alternatif yang positif untuk menghindari keterlibatan mereka dalam kejahatan atau kelompok bersenjata, memiliki manfaat psikososial yang kuat dan membantu masyarakat luas untuk menghargai kontribusi dari pemuda. Partisipasi pemuda dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi program pendidikan, terutama keterampilan dan pelatihan mata pencaharian, membantu memastikan

bahwa program-program ini dapat memenuhi kebutuhan mereka saat ini maupun di masa mendatang. Upaya-upaya khusus harus dilakukan untuk mendorong anak-anak perempuan dan wanita muda agar berpartisipasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar, karena akses mereka ke pendidikan serta kebutuhan pendidikan mereka mungkin berbeda dari rekan-rekan pria (lihat juga *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, standar Penciptaan Pekerjaan dan standar Pengembangan Usaha).

6. **Audit sosial** adalah evaluasi program pendidikan berbasis masyarakat yang digunakan untuk:
 - ◆ menentukan orang-orang, dana dan bahan-bahan yang tersedia untuk program tersebut;
 - ◆ mengidentifikasi kesenjangan;
 - ◆ memantau efektivitas program.

Audit sosial tidak selalu memungkinkan untuk dilakukan pada awal atau tahap pertengahan masa darurat. Namun, dalam konteks krisis yang berkepanjangan atau pemulihan awal, audit sosial memberikan masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan mereka agar lebih efektif memantau program pendidikan dan untuk mendokumentasikan pelanggaran atas hak-hak mereka. Partisipasi dalam audit sosial sangat relevan bagi kaum muda, terutama mereka yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan formal atau non-formal. Satu hal yang penting adalah membagikan hasil audit sosial pada semua anggota masyarakat dan pihak berwenang yang terkait (lihat juga Analisis standar 4 pada halaman 64-66).

7. **Peningkatan kapasitas** memperkuat pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku untuk membantu orang maupun organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Setiap upaya harus dilakukan untuk mengidentifikasi ahli di bidang pendidikan, termasuk guru, tenaga kependidikan lain serta penyusun kurikulum, dalam populasi yang terkena dampak untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jika teridentifikasi bahwa keahlian lokal tidak mencukupi, atau jika masyarakat tidak mampu atau tidak mau membantu

membangun ulang sistem pendidikan, maka peningkatan kapasitas bagi anggota masyarakat mungkin tepat untuk dilakukan. Pengkajian harus memeriksa kapasitas, kebutuhan dan tanggapan yang berbeda dari anak-anak laki-laki dan perempuan, pemuda serta orang dewasa dalam masyarakat, termasuk kelompok rentan. Program pelatihan harus mengkaji kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan peningkatan kapasitas lain serta cara untuk mengatasinya. Berbagai kegiatan tersebut harus mendorong kepemilikan dan pemeliharaan program pendidikan oleh masyarakat serta koordinasi dengan sektor lain.

Partisipasi Masyarakat Standar 2: Sumber Daya

Sumber daya komunitas diidentifikasi, dimobilisasi dan digunakan untuk menerapkan kesempatan belajar yang sesuai usia.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Masyarakat, tenaga kependidikan serta peserta didik mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal untuk memperkuat akses terhadap pendidikan berkualitas (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan mengenali keterampilan yang ada dan pengetahuan dan perancangan berbagai program pendidikan untuk memaksimalkan penggunaan kapasitas tersebut (lihat Catatan Panduan 4-5).
- Otoritas nasional, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan menggunakan sumber daya masyarakat untuk mengembangkan, mengadopsi dan memberikan pendidikan yang menggabungkan pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik (lihat Catatan Panduan 5).

Catatan Panduan

1. **Sumber daya masyarakat** meliputi manusia, intelektual, linguistik, keuangan dan sumber daya alam yang ada dalam masyarakat. Ketika merencanakan dan merancang respons pendidikan, ketersediaan sumber daya lokal harus diidentifikasi dan dianalisis untuk menentukan bagaimana semua itu dapat menyumbang bagi pendidikan.

Sumber daya masyarakat tidak menggantikan tanggung jawab hukum otoritas nasional. Sumber daya masyarakat dapat meningkatkan keamanan, akses dan kualitas belajar-mengajar. Kontribusi terhadap lingkungan fisik termasuk dukungan material dan tenaga kerja untuk pemeliharaan, pembangunan dan perbaikan pusat pendidikan anak usia dini, sekolah dan ruang belajar lain. Kontribusi untuk mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan emosional, fisik dan

sosial mungkin juga termasuk dukungan psikososial untuk peserta didik dan guru, fasilitator dan pengasuh. Motivasi guru dapat diperbaiki melalui sumber daya yang dialokasikan untuk gaji dan bentuk kompensasi lain. Catatan mobilisasi sumber daya harus disimpan demi transparansi dan akuntabilitas. Pemantauan harus memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dengan melakukan pekerjaan fisik di luar kemampuan mereka (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2 pada halaman 79-86, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1-4 pada halaman 88-90; dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).

- 2. Mempromosikan akses dan keamanan:** Pemegang otoritas pendidikan, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan kemanusiaan harus mendorong anggota masyarakat untuk mengidentifikasi dan membantu anak-anak yang rentan serta pemuda untuk hadir di sekolah dan mengakses kegiatan belajar lain secara teratur. Sebagai contoh, wanita dan kelompok pemuda memberikan pakaian yang pantas untuk anak-anak dari keluarga miskin atau makanan bagi keluarga yang bergantung pada anak sebagai pencari nafkah. Anggota masyarakat harus bekerja dengan otoritas pendidikan untuk memastikan bahwa sekolah, pendidikan anak usia dini dan ruang belajar lain adalah tempat yang aman untuk anak-anak serta pemuda. Mereka dapat mengatur akses dan transportasi yang aman serta mendukung keterjangkauan daerah yang terisolasi atau terpencil. Hambatan fisik harus dihilangkan untuk mempromosikan aksesibilitas bagi pelajar berkebutuhan khusus. Para wanita dapat berperan sebagai asisten kelas atau menjaga keamanan dari pelecehan untuk mendorong kehadiran anak-anak perempuan dan para peserta didik berkebutuhan khusus. Saat para pemuda juga anak-anak tidak dapat hadir di kelas karena alasan budaya atau perlindungan, masyarakat dapat mengadvokasi dan merancang program pendidikan non-formal seperti pendidikan sebaya, pendidikan dan pelatihan teknik serta kejuruan, dan pelatihan pengembangan usaha kecil. Sumber daya masyarakat harus digunakan untuk mengembangkan, mengadopsi dan berbagi informasi mengenai pendidikan pengurangan risiko bencana dan respons kesiapsiagaan

masyarakat (lihat juga Catatan Panduan 5 di bawah ini; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2-3 pada halaman 79-92, dan *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Pengembangan Usaha standar).

3. **Membangun untuk jangka panjang:** Personel pendidikan dan masyarakat harus berpartisipasi dalam pelatihan terkait peran dan tanggung jawab untuk jangka panjang. Termasuk di dalamnya adalah pelatihan mengenai manajemen dan mobilisasi sumber daya, pemeliharaan fasilitas, kesadaran terhadap mereka yang berkebutuhan khusus dan langkah khusus untuk menjamin partisipasi anak dan pemuda.
4. **Pengakuan terhadap kontribusi masyarakat:** Semua perencanaan, pelaksanaan program dan pelaporan harus memasukkan informasi tentang kontribusi masyarakat. Kontribusi masyarakat untuk (re) konstruksi pendidikan dapat bersifat fisik, seperti bahan bangunan. Namun sumbangan tersebut bisa juga bersifat kualitatif, yang berarti tidak dapat diukur dengan angka, seperti berbagai keterampilan setempat. Kontribusi masyarakat yang kuat mencerminkan kepemilikan dan membantu untuk memastikan dukungan jangka panjang. Namun, dukungan eksternal lebih lanjut tidak boleh bergantung pada sumbangan masyarakat tersebut. Tanggung jawab hukum untuk pendidikan terletak pada otoritas nasional.

Partisipasi dan kontribusi pemuda dalam inisiatif-inisiatif pendidikan sebaya, mobilisasi masyarakat dan pengembangan masyarakat harus didorong dan diakui. Partisipasi pemuda sangat menjadi penting dalam tahapan desain dan pengkajian kebutuhan.

5. **Kapasitas Lokal:** Pengembangan, adaptasi dan penyampaian pendidikan untuk pengurangan risiko bencana dan mitigasi konflik harus memanfaatkan dan memperkuat strategi penanggulangan dan kapasitas lokal yang positif.

Akses yang tidak merata terhadap sumber daya dan partisipasi oleh berbagai kelompok berbeda dalam masyarakat dapat memengaruhi intervensi pendidikan dan meningkatkan keterpisahan atau tidak diikutkannya golongan-golong tertentu. Kontributor individu atau kelompok jangan terlalu diunggulkan/difavoritkan dalam berbagai rencana dan program pendidikan karena dapat mengganggu/meresahkan orang-orang yang tidak dapat berkontribusi. Mereka yang tidak memberikan kontribusi tidak boleh didiskriminasikan (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50 dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 6 di halaman 137-138).

Koordinasi Standar 1: Koordinasi

Mekanisme Koordinasi untuk pendidikan ditetapkan dan dukungan bagi pemangku kepentingan berjalan untuk menjamin akses dan kelangsungan pendidikan yang berkualitas.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Otoritas pendidikan, yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas pendidikan, memikul peran sebagai pemimpin bagi respons pendidikan, termasuk mengadakan dan berpartisipasi dalam mekanisme koordinasi dengan pemangku kepentingan pendidikan lain (lihat Catatan Panduan 1).
- Komite koordinasi antar-lembaga mengkoordinasikan pengkajian, perencanaan, pengelolaan informasi, mobilisasi sumber daya, pengembangan kapasitas dan advokasi (lihat Catatan Panduan 1).
- Berbagai tingkat dan jenis pendidikan dipertimbangkan dalam kegiatan koordinasi (lihat Catatan Panduan 1).
- Dalam mendukung kegiatan pendidikan, otoritas pendidikan, donor, badan-badan PBB, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lain menggunakan struktur pembiayaan yang tepat waktu, transparan, adil dan terkoordinasi (lihat Catatan Panduan 2).
- Mekanisme transparansi untuk berbagi informasi pada perencanaan dan koordinasi tanggapan ada di dalam komite koordinasi dan seluruh kelompok koordinasi (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Pengkajian bersama dilakukan untuk mengidentifikasi kapasitas dan kesenjangan dalam respons pendidikan (lihat Catatan Panduan 4).
- Semua pemangku kepentingan mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, tanggung jawab dan akuntabilitas untuk mencapai hasil (lihat Catatan Panduan 5-6).

Catatan panduan

1. **Komite koordinasi antar-lembaga**, yang mengkoordinasi respons pendidikan, harus mencerminkan keterwakilan yang luas. Otoritas pendidikan nasional harus memberikan kepemimpinan, namun keterwakilan pemerintah daerah dan kelompok juga harus tepat. Jika

kapasitas otoritas pendidikan atau legitimasinya belum terpenuhi, kepemimpinan dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga lain melalui sebuah perjanjian. Sebuah kelompok koordinasi pendidikan yang sudah ada sebaiknya mengambil tanggung jawab ini, atau apabila sistem klaster IASC diaktifkan, sebuah Klaster Pendidikan harus dibentuk. Bagaimanapun juga, wakil dari otoritas pendidikan yang relevan harus selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Koordinasi kelompok mungkin diperlukan di tingkat nasional dan lokal, tergantung pada sifat dari krisis. Peran dan tanggung jawab anggota harus ditetapkan dalam Kerangka Acuan untuk panitia (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 3-4 pada halaman 140-141).

Semua tingkat dan jenis pendidikan harus dipertimbangkan dalam kegiatan koordinasi, termasuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar, menengah, non-formal, teknis, kejuruan, pendidikan pada tingkat lebih tinggi serta pendidikan bagi orang dewasa.

2. **Mobilisasi sumber daya:** Dana yang signifikan diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan program pendidikan berkualitas yang tepat waktu dalam situasi darurat hingga pemulihan. Setiap upaya harus dilakukan untuk memastikan pendekatan-pendekatan yang inklusif, transparan, dan terkoordinasi dalam pembiayaan, termasuk pendanaan melalui PBB dan Proses-proses Pendanaan Terkonsolidasi (*UN Flash Appeals and Consolidated Appeals Processes*). Dalam situasi darurat akut, *UN Central Emergency Response Fund* dan sumber dana lain dapat menyediakan pendanaan bagi pendidikan. Akses mitra lokal terhadap sumber daya tersebut harus difasilitasi.

Pengaturan pendanaan situasi darurat harus mempertimbangkan kondisi pasar, tradisi dan tenaga kerja nasional maupun regional demi menghindari preseden yang tidak dapat ditangani. Alokasi sumber daya harus diinformasikan melalui pertimbangan analisis politik, khususnya dalam situasi konflik, untuk menghindari situasi yang makin memanas karena pengalokasian sumber daya yang kurang tepat. Kebijakan yang terkoordinasi untuk kompensasi guru dan tenaga kependidikan lain dan pembayaran atau pembiayaan pendidikan lain sangat

penting. Pengaturan pendanaan situasi darurat harus diselaraskan dengan pengaturan jangka panjang (misalnya dana multi-donor atau pembiayaan modalitas pembangunan seperti pengumpulan dana atau pembiayaan nasional) untuk mendukung intervensi berkelanjutan. Pembiayaan dari sektor swasta juga harus dieksplorasi, terutama untuk pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar Standar 2, Catatan Panduan 8 pada halaman 85; Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 123-124; Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141; Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru dan Panduan Referensi INEE untuk Pendanaan Pendidikan Eksternal, yang tersedia dalam *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit; dan *Standar Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Pelayanan Keuangan Standar 5: Koordinasi dan Transparansi)

3. **Manajemen informasi dan manajemen pengetahuan** meliputi:

- pengkajian kebutuhan, kapasitas dan cakupan;
- pengumpulan, penyimpanan, analisis serta berbagi informasi;
- pemantauan dan evaluasi;
- pelajaran yang dipetik untuk menginformasikan praktik masa depan.

Informasi yang efektif dan sistem manajemen pengetahuan membangun dan meningkatkan, lebih dari sekadar duplikat dari sistem nasional. Keterlibatan mitra nasional dan mitra lokal, seperti mereka yang bekerja dalam perlindungan anak, dukungan psikososial, hunian, air dan sanitasi, kesehatan dan pemulihan awal, sangat penting. Dalam jangka panjang, sistem informasi dan manajemen pengetahuan harus dirancang dan dimiliki oleh otoritas nasional dan otoritas lokal (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 51-52; Analisis standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 57, dan Analisis standar 3, Catatan Panduan 3 pada halaman 62-63; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 137, dan *Standar Minimum Jaringan untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Umum 6: Upaya Koordinasi untuk Dampak Besar).

4. **Pengkajian bersama** untuk mengidentifikasi kapasitas dan kesenjangan dalam respons pendidikan harus menggunakan dan mengadaptasi *Global Education Cluster's Joint Education Needs Assessment Toolkit* atau perangkat pengkajian kebutuhan lain yang telah disepakati sebelumnya. Pelatihan penggunaan perangkat ini harus dimasukkan dalam kegiatan kesiapsiagaan dan perencanaan kontingensi. Jika pemangku kepentingan individu melakukan pengkajian pendidikan, mereka harus berbagi temuan dan data dengan otoritas pendidikan dan kelompok koordinasi yang lebih luas untuk mendukung respons terkoordinasi. Di beberapa negara, sebuah pengkajian cepat multi-sektoral, yang mencakup berbagai pertanyaan pendidikan, dilaksanakan dalam 48 jam setelah situasi darurat. Jika hal ini terjadi, maka memerlukan koordinasi dengan sektor-sektor lain seperti kesehatan, air dan sanitasi, serta hunian (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 1-8 pada halaman 46-53).

5. **Akuntabilitas:** Sementara pemangku kepentingan individu memiliki mandat mereka sendiri, semua harus setuju atas akuntabilitas dalam koordinasi dan berbagi informasi. Hal ini berarti transparan tentang pengumpulan informasi, dan penggunaannya untuk menginformasikan perencanaan kerja. Apabila terdapat kesenjangan yang penting dalam respons pendidikan, Klaster Pendidikan IASC atau mekanisme koordinasi lain bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang relevan menangani kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan utama. Pemantauan dan evaluasi yang terkoordinasi dapat memfasilitasi akuntabilitas terhadap orang-orang yang terkena dampak dengan berbagi informasi secara terbuka tentang hasil kerja pendidikan. Hal tersebut juga dapat mendukung penerapan Standar Minimum INEE serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasarinya dengan menggarisbawahi di mana lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional harus memfasilitasi dan memantau otoritas nasional dalam memenuhi kewajiban mereka akan hak untuk pendidikan bagi populasi yang terkena dampak (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 141).

6. **Sebuah pendekatan yang berorientasi hasil** berarti bahwa semua pemangku kepentingan memastikan bahwa respons pendidikan terkoordinasi dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Pemantauan dan evaluasi terus-menerus atas koordinasi respons pendidikan memungkinkan untuk menemukan dan menangani secara cepat kesenjangan dalam koordinasi (lihat juga Analisis Standar 3-4 pada halaman 60-66).

Analisis Standar 1: Pengkajian

Pengkajian pendidikan yang tepat waktu terhadap situasi darurat dilakukan secara transparan, partisipatoris dan holistik.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Pengkajian awal atas pendidikan dilakukan sesegera mungkin, dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan (lihat Catatan Panduan 1).
- Pengkajian mengumpulkan data terpilah yang mengidentifikasi persepsi lokal dari tujuan dan relevansi pendidikan, hambatan untuk akses terhadap pendidikan serta kebutuhan prioritas dan kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 2).
- Kapasitas lokal, sumber daya serta strategi untuk pembelajaran dan pendidikan diidentifikasi, sebelum dan selama masa darurat (lihat Catatan Panduan 2-5).
- Analisis konteks dilakukan untuk memastikan bahwa respons pendidikan adalah tepat, relevan dan sensitif terhadap potensi risiko dan konflik (lihat Catatan Panduan 3).
- Perwakilan dari populasi yang terkena dampak berpartisipasi dalam perancangan dan pelaksanaan pengumpulan data (lihat Catatan Panduan 2-3, 5 dan 7-8).
- Sebuah kajian komprehensif atas kebutuhan pendidikan serta sumber dayanya dalam berbagai tingkat dan jenis pendidikan dilakukan dengan partisipasi pemangku kepentingan utama (lihat Catatan Panduan 2-7).
- Komite koordinasi antar-lembaga mengkoordinasikan pengkajian dengan pemangku kepentingan dan sektor lain yang relevan, demi menghindari upaya yang berulang (lihat Catatan Panduan 6 dan 8).

Catatan Panduan

1. **Waktu dari pengkajian awal** harus mempertimbangkan keamanan dan keselamatan tim penilaian dan populasi yang terkena dampak. Pengkajian harus dilakukan sesegera mungkin setelah situasi darurat terjadi dan harus mengkaji semua jenis pendidikan di semua lokasi yang terkena dampak, jika memungkinkan. Setelah pengkajian awal,

data harus diperbarui secara berkala melalui pemantauan dan evaluasi. Termasuk di dalamnya adalah tinjauan terhadap pencapaian program, berbagai kendala dan kebutuhan yang tak terpenuhi. Ketika pengkajian secara menyeluruh tidak dapat dilakukan dengan segera, pengkajian awal secara parsial tetap dapat mengumpulkan informasi untuk menginformasikan tindakan yang harus dilakukan dengan segera.

2. **Pengkajian** harus mengumpulkan data terpilah untuk menginformasikan respons pendidikan dan mengkaji risiko yang berkelanjutan dari konflik atau bencana. 'Pemilahan' berarti bahwa informasi tersebut dipilah menjadi beberapa bagian, dan dalam hal ini dianalisis berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Data mengidentifikasi kapasitas pendidikan, sumber daya, kerentanan, kesenjangan dan tantangan untuk menegakkan hak atas pendidikan bagi semua kelompok yang terkena dampak. Pengkajian dan kunjungan lapangan oleh penyedia layanan pendidikan dan penyedia tanggap darurat lain harus dikoordinasikan untuk menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan pengkajian berlebihan/berulang atas populasi yang terkena dampak atau isu tertentu (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2 pada 37-40 dan Koordinasi Standar 1 pada halaman 41-45).

Pengkajian harus memanfaatkan sumber informasi yang ada semaksimal mungkin. Pengumpulan data primer harus dibatasi sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan dalam pengetahuan dan menginformasikan keputusan kritis pemangku kepentingan pendidikan. Jika akses dibatasi, strategi alternatif untuk mengumpulkan informasi dapat dieksplorasi. Termasuk di dalamnya menghubungi para tetua adat dan jaringan masyarakat, serta mengumpulkan data sekunder dari sektor lain atau *database* pra-krisis. Data pra-krisis juga akan memberikan acuan perbandingan situasi darurat.

Perangkat pengumpulan data harus dibuat standar secara nasional untuk memfasilitasi koordinasi proyek dan untuk meminimalkan

tuntutan pada orang yang memberikan informasi. Bila memungkinkan, perangkat pengkajian harus dikembangkan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebelum situasi darurat, sebagai bagian dari perencanaan kesiapsiagaan. Perangkat tersebut harus menyediakan ruang untuk informasi tambahan yang dianggap penting oleh responden lokal.

Tim pengkaji harus melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak. Mereka harus seimbang-gender untuk menangkap lebih efektif pengalaman, kebutuhan, keprihatinan dan kapasitas pelajar laki-laki dan perempuan, guru dan tenaga kependidikan lain, dan orang tua serta wali. Pihak yang berwenang harus dimintai pendapat.

Pertimbangan etis, termasuk prinsip-prinsip dasar saling menghormati dan non-diskriminasi, harus ditegaskan dalam pengkajian.

Pengumpulan informasi dapat menempatkan seseorang dalam situasi berisiko karena sensitivitas informasi atau hanya karena mereka telah berpartisipasi dalam proses (lihat juga Catatan Panduan 5 halaman 51). Pengumpulan informasi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melindungi peserta dan harus memberitahu mereka berbagai hal berikut:

- tujuan pengumpulan data;
- hak untuk tidak berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, atau untuk mundur setiap saat tanpa efek negatif;
- hak untuk kerahasiaan dan anonimitas.

(Lihat juga Analisis Standar 4, Catatan Panduan 2 pada halaman 65).

3. **Analisis konteks**, termasuk risiko bencana dan analisis konflik, membantu untuk memastikan bahwa respons pendidikan adalah tepat, relevan dan sensitif terhadap potensi konflik dan bencana.

Analisis risiko mempertimbangkan semua aspek dalam konteks yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan keselamatan para peserta didik. Hal ini membantu untuk memastikan bahwa pendidikan adalah lebih sebagai pelindung daripada faktor risiko. Analisis risiko mengkaji risiko untuk pendidikan, yang mungkin termasuk:

- kerawanan, tata pemerintahan yang buruk dan korupsi;
- masalah kesehatan publik seperti prevalensi penyakit menular;
- faktor sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan lain, termasuk bahaya industri seperti pelepasan gas beracun dan tumpahan bahan kimia;
- risiko spesifik yang terkait dengan jenis kelamin, usia, mereka yang berkebutuhan khusus, latar belakang etnis dan berbagai faktor lain yang relevan dalam konteks.

Analisis konflik mengkaji keberadaan atau risiko dari konflik kekerasan untuk berusaha memastikan bahwa intervensi pendidikan tidak memperburuk ketidaksetaraan yang mendasari ataupun memperburuk konflik itu sendiri. Hal ini diperlukan baik dalam situasi konflik maupun bencana. Analisis konflik mengajukan berbagai pertanyaan tentang:

- aktor yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam konflik, yang terdampak oleh konflik atau berisiko terkena dampak;
- penyebab atau potensi konflik aktual dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keluhan;
- interaksi antara para pelaku, termasuk pemangku kepentingan pendidikan, dan penyebab konflik.

Konflik analisis untuk daerah atau negara tertentu sering tersedia dari organisasi-organisasi penelitian. Dari perspektif pendidikan, hal ini perlu dipertimbangkan. Jika analisis tidak tersedia atau tidak mungkin diaplikasikan, analisis konflik dapat dilakukan dengan cara mengadakan lokakarya di daerah yang terdampak atau melalui studi literatur. Pemangku kepentingan pendidikan harus mengadvokasi lembaga-lembaga yang sesuai untuk melakukan analisis konflik yang komprehensif, termasuk informasi khusus-pendidikan, serta untuk berbagi temuan dengan semua pihak yang berkepentingan.

Sebuah laporan analisis risiko berisi strategi untuk manajemen risiko terhadap bencana alam dan bencana buatan manusia, termasuk konflik. Strategi dapat mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons, rekonstruksi dan rehabilitasi. Sebagai contoh, sekolah-sekolah atau ruang-ruang belajar mungkin diperlukan bagi rencana kontigensi dan rencana keamanan untuk mencegah, melakukan mitigasi dan

melakukan respons terhadap situasi darurat. Selain itu bisa juga disiapkan peta risiko yang menunjukkan ancaman potensial dan menggarisbawahi faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan dan ketahanan peserta didik.

Analisis risiko dilengkapi dengan kajian terhadap ketahanan masyarakat dan kearifan lokal, termasuk sumber daya dan kapasitas. Pengetahuan, keterampilan dan kapasitas untuk mitigasi bencana, kesiapsiagaan dan pemulihan dikaji dan diperkuat sebelum dan setelah situasi darurat, jika memungkinkan, melalui kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 1-4 pada halaman 29-33; Partisipasi Masyarakat standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 39-40; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 86, Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 109; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 2 dan 4 pada halaman 134-137; dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 3 dan 5 pada halaman 140-141).

4. **Validitas data dan metode untuk analisis data:** analisis data harus jelas menyatakan:

- Indikator-indikator;
- sumber data;
- metode pengumpulan;
- pengumpul data;
- prosedur analisis data.

Apabila terdapat risiko keamanan bagi pengumpul data, maka yang dirujuk adalah nama organisasi yang terlibat dalam pengumpulan data dan bukan nama-nama pengumpul data. Keterbatasan pengumpulan data atau analisis yang dapat memengaruhi keandalan temuan, atau relevansinya ke situasi lain, harus diperhatikan. Misalnya, data dapat diragukan jika ada responden yang menggelembungkan angka pendaftaran/kehadiran untuk memaksimalkan alokasi sumber daya atau untuk menghindari dipersalahkan. Harus diperhatikan pula jika ada kelompok tertentu atau masalah tertentu yang tidak tertangani oleh program dan sistem pemantauan.

Untuk meminimalkan bias, data harus diambil dari beberapa sumber dan dibandingkan. Teknik ini memperkuat validitas data. Sebelum kesimpulan diambil, sebaiknya hasil analisis ini dikonsultasikan terlebih dulu dengan kelompok yang paling terdampak, termasuk anak-anak laki-laki dan perempuan serta pemuda. Persepsi dan pengetahuan lokal harus menjadi pusat analisis untuk menghindari respons kemanusiaan yang didasarkan pada persepsi dan prioritas orang-orang dari luar (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 136-137).

5. **Peserta dalam kajian** harus termasuk otoritas pendidikan dan perwakilan dari populasi yang terkena dampak, termasuk kelompok rentan. Dalam pengumpulan data dan informasi, analisis, pengelolaan dan penyebarannya, partisipasi kelompok-kelompok ini mungkin dibatasi oleh situasi yang sulit selama pengkajian awal. Partisipasi ini harus meningkat sejalan dengan semakin stabilnya kondisi. Pengkajian harus memfasilitasi semua bentuk komunikasi yang ada dalam masyarakat, termasuk penggunaan bahasa isyarat dan huruf *Braille*, di mana memungkinkan (lihat juga Kebijakan pendidikan standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 136-137).
6. **Kolaborasi di dalam sektor pendidikan dan dengan sektor-sektor lain** sangat penting dalam memaksimalkan kualitas, kelengkapan dan kegunaan kajian. Pemangku kepentingan pendidikan harus menyelaraskan pengkajian kebutuhan dengan melakukan pengkajian bersama atau dengan mengkoordinasikan pengkajian untuk menghindari duplikasi oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Pengkajian yang terkoordinasi dapat membuktikan dampak situasi darurat yang lebih kuat dan memfasilitasi respons yang koheren. Pengkajian ini meningkatkan akuntabilitas pemangku kepentingan kemanusiaan dengan mendorong berbagi informasi (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 44).

Sektor pendidikan harus bekerja sama dengan sektor-sektor lain untuk menginformasikan respons pendidikan mengenai ancaman, risiko dan ketersediaan layanan. Hal ini mungkin termasuk bekerja dengan:

- sektor kesehatan untuk mendapatkan data epidemiologi dan informasi tentang ancaman epidemi dan mempelajari pelayanan kesehatan dasar yang tersedia, termasuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan;
- sektor perlindungan untuk mempelajari berbagai risiko yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, anak yatim piatu dan kelompok rentan lain dalam masyarakat, hambatan-hambatan terhadap pendidikan, serta layanan dukungan psikososial dan pelayanan sosial yang tersedia;
- sektor gizi untuk mempelajari layanan gizi berbasis sekolah, berbasis-masyarakat, serta layanan gizi lain;
- sektor hunian dan manajemen penampungan sementara untuk mengkoordinasikan lokasi yang sesuai dan aman, akses terhadap dan konstruksi / pembangunan kembali fasilitas belajar dan rekreasi, serta penyediaan barang-barang non-pangan yang diperlukan untuk fasilitas sekolah;
- sektor air dan sanitasi untuk memastikan bahwa pasokan air dapat diandalkan dan sanitasi yang layak tersedia di lokasi belajar;
- sektor logistik untuk mengatur pengadaan dan pengiriman buku-buku dan perlengkapan lain.

(Lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 1 dan 3-4 pada halaman 41-44 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 139-140.)

7. **Kebutuhan pendidikan dan kebutuhan psikososial:** Data terpilah atas kebutuhan pendidikan dan kebutuhan psikososial serta sumber dayanya harus dikumpulkan dalam pengkajian kebutuhan umum. Anggota tim pengkaji yang mempunyai pengetahuan lokal dapat mendukung aspek-aspek pengkajian. Lembaga-lembaga harus memasukkan sumber daya, staf dan kapasitas organisasinya untuk menindaklanjutinya.

8. **Temuan pengkajian** harus tersedia secepat mungkin sehingga kegiatan pendidikan bisa direncanakan. Data pra-krisis dan pengkajian pasca-krisis yang mengidentifikasi sumber daya dan berbagai kebutuhan pendidikan dan / atau pelanggaran atau pemenuhan hak pendidikan oleh otoritas pendidikan, LSM, lembaga kemanusiaan dan masyarakat lokal juga harus dibagikan.

Otoritas pendidikan di tingkat lokal atau nasional harus mengkoordinir penyebarluasan temuan pengkajian. Jika otoritas pendidikan tidak mempunyai kapasitas, maka pelaku dari tingkat internasional, seperti komite koordinasi sektor pendidikan atau Klaster Pendidikan, dapat mengatur proses ini. Penyajian data dalam temuan pengkajian harus distandarisasi jika memungkinkan sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan mudah (lihat juga Koordinasi standar 1 pada halaman 41-45).

Analisis Standar 2: Strategi Respons

Strategi respons pendidikan inklusif mencakup gambaran yang jelas tentang konteks, hambatan terhadap hak untuk pendidikan dan strategi untuk mengatasi hambatan.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Strategi respons secara akurat mencerminkan hasil pengkajian (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Respons pendidikan semakin memenuhi kebutuhan penduduk yang terkena dampak untuk pendidikan yang inklusif dan berkualitas (lihat Catatan Panduan 1, 5 dan 8).
- Strategi respons dirancang dan dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat ataupun penyedia dan tidak memperburuk dampak situasi darurat (lihat Catatan Panduan 3 dan 7).
- Informasi yang dikumpulkan dari pengkajian awal dan analisis keadaan, secara teratur diperbarui dengan data baru untuk menginformasikan respons pendidikan yang sedang berlangsung (lihat Catatan Panduan 4).
- Strategi respons termasuk peningkatan kapasitas untuk mendukung otoritas pendidikan dan anggota masyarakat dalam melaksanakan pengkajian dan melaksanakan kegiatan respons (lihat Catatan Panduan 2).
- Respons pendidikan bersifat melengkapi dan diselaraskan dengan program pendidikan nasional (lihat Catatan Panduan 6 dan 8).
- Data dasar (*baseline*) dikumpulkan secara sistematis pada awal program (lihat Catatan Panduan 9).

Catatan Panduan

1. **Strategi respons:** Pemangku kepentingan pendidikan harus berinvestasi dalam analisis dan interpretasi secara menyeluruh terhadap data pengkajian untuk memastikan bahwa strategi respons mereka didasarkan pada temuan kunci dan prioritas utama yang diungkapkan dalam pengkajian. Hal ini untuk menghindari risiko temuan kajian yang hanya mengonfirmasi gagasan awal yang sudah terbentuk dari program respons.

Strategi respons harus menunjukkan peran utama otoritas pendidikan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Sebagai contoh, tingkat pengeluaran biaya untuk pendidikan seperti pos pengeluaran bagi gaji guru dan peralatan harus diselaraskan di seluruh organisasi, dengan mempertimbangkan tingkat pengeluaran jangka panjang dan berkelanjutan.

Strategi respons harus didasarkan pada rencana kontigensi yang tepat dan yang ada serta harus dikembangkan dengan partisipasi aktif masyarakat. Strategi ini harus menunjukkan tingkatan dan jenis pendidikan yang berbeda, kesadaran atas risiko dan bahaya, serta apakah badan-badan lain juga mendukung kegiatan pendidikan. Anggaran harus dialokasikan untuk kegiatan pendidikan yang penting, termasuk pengumpulan data dasar (*baseline*) dan evaluasi (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 29-30).

Analisis atas berbagai hambatan harus diadakan, termasuk hambatan gender, hambatan untuk mengakses semua tingkat dan jenis pendidikan serta kegiatan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Selain itu harus ada fleksibilitas sebanyak mungkin untuk menyediakan pendidikan inklusif dan untuk memberikan respons bagi meningkatnya permintaan pendidikan.

2. **Peningkatan kapasitas untuk pengumpulan data dan analisis:**

Strategi respons harus meliputi peningkatan kapasitas, termasuk bagi staf otoritas pendidikan dan anggota masyarakat. Anggota masyarakat khususnya pemuda dapat dilibatkan dalam pengumpulan data dan analisis, pemantauan dan evaluasi. Adalah penting untuk merekrut staf berdasarkan pertimbangan gender untuk memastikan pengumpulan dan analisis data kajian yang efektif (lihat juga Analisis standar 3, Catatan Panduan 2 pada halaman 62 dan Analisis standar 4, Catatan Panduan 3 pada halaman 65).

3. **'Tidak Mencederai' ('Do No Harm')**: Berbagai respons pendidikan situasi darurat melibatkan transfer sumber daya seperti pelatihan, pekerjaan, perlengkapan dan makanan menjadi sumber daya di lingkungan yang sering mengalami kelangkaan. Berbagai sumber daya ini sering mencerminkan kekuasaan dan kekayaan. Hal ini dapat menjadi unsur konflik atau memperburuk marginalisasi atau diskriminasi dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, beberapa pihak mungkin mencoba untuk mengontrol dan menggunakan sumber daya tersebut bagi kepentingan mereka sendiri, untuk melemahkan pihak lain atau demi keuntungan pribadi. Jika hal ini terjadi, respons pendidikan dapat menyebabkan kerugian. Berdasarkan pemahaman tentang analisis risiko dan konflik, upaya-upaya harus dilakukan untuk menghindari hal ini (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50).

Pengalihan sumber daya dan proses penyelenggaraan respons pendidikan situasi darurat juga dapat memperkuat kapasitas lokal untuk perdamaian. Aktivitas dapat mengurangi perpecahan dan mengurangi sumber ketegangan yang mengarah pada konflik yang merusak dengan membangun atau menciptakan hubungan yang baik dalam masyarakat. Misalnya, program pelatihan guru dapat menyatukan guru melalui kepentingan profesional mereka di seluruh etnis yang ada. Hubungan masyarakat yang adil selengkapnya dapat dipromosikan melalui penggabungan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

4. **Memperbarui strategi respons**: Pemangku kepentingan pendidikan harus secara teratur meninjau dan memperbarui strategi respons mereka selama situasi darurat hingga masa pemulihan dan pembangunan. Pembaruan ini harus menunjukkan capaian terkini, perubahan-perubahan dalam situasi darurat dan keamanan serta perubahan dalam strategi itu sendiri. Harus ada perkiraan kebutuhan dan hak-hak yang belum terpenuhi serta perubahan yang tepat dalam strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Intervensi harus mempromosikan peningkatan secara progresif dalam kualitas, inklusi, cakupan, kesinambungan dan kepemilikan bersama.

5. **Respons dari donor:** Donor harus secara teratur meninjau baik kualitas maupun cakupan respons pendidikan situasi darurat untuk memastikan bahwa tingkat minimum kualitas pendidikan dan akses terpenuhi. Perhatian khusus harus diberikan kepada pendaftaran dan retensi para peserta didik dari kelompok rentan, agar mereka mendapatkan akses yang setara ke berbagai kesempatan pendidikan di lokasi yang terkena dampak situasi darurat. 'Akses yang setara' mengacu pada kesempatan yang sama bagi anak-anak perempuan dan laki-laki, para pemuda dan peserta didik dewasa, terutama mereka yang terpinggirkan karena etnis, bahasa atau berkebutuhan khusus. Pendanaan untuk respons pendidikan harus mendapatkan prioritas yang sama seperti ketersediaan air, makanan, tempat tinggal dan kesehatan, untuk menjamin penyediaan pendidikan bagi populasi yang terkena dampak. Termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang menampung pengungsi atau penyintas. Pendanaan yang memadai sangat penting untuk menegakkan hak untuk pendidikan bagi semua. Program tidak boleh dibatasi oleh siklus pendanaan jangka-pendek dan harus terus berlanjut ke tahap pemulihan (lihat juga Catatan Panduan 7 halaman 58, Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 72-75, dan *Panduan INEE untuk Pendanaan Pendidikan Eksternal*, yang tersedia dalam *Toolkit INEE*: www.ineesite.org/toolkit)

6. **Memperkuat program nasional:** Berbagai respons pendidikan situasi darurat harus diselaraskan dengan dan harus memperkuat program pendidikan nasional, termasuk pendidikan anak usia dini dan program-program kejuruan serta mata pencaharian. Hal ini mencakup perencanaan pendidikan lokal dan nasional, berikut administrasi dan manajemen serta infrastruktur fisik dan layanan pelatihan dan dukungan bagi guru. Respons pendidikan situasi darurat harus bekerja sama dengan otoritas pendidikan untuk membangun sistem yang lebih baik bagi masa depan, penguatan sistem pendidikan inklusif untuk semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus serta dari kelompok minoritas (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1 pada halaman 133-138 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).

7. **Kesiapsiagaan tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana:**

Lembaga dan donor yang mendukung pembangunan harus mempromosikan dan mendukung kegiatan untuk pengurangan risiko bencana serta kesiapsiagaan untuk tanggap darurat sebagai langkah pencegahan dan selama pemulihan pasca krisis. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dapat membuat pembiayaan menjadi efektif dan efisien karena hal ini dapat berkontribusi dalam perencanaan, koordinasi dan respons yang lebih baik oleh otoritas pendidikan dan mitranya. Investasi dalam pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dapat juga berarti bahwa dalam situasi darurat pengeluaran-pengeluaran dapat diturunkan.

8. **Mengatasi kendala mandat organisasi:** Berbagai organisasi kemanusiaan dengan mandat yang terbatas – seperti organisasi untuk anak-anak, pendidikan dasar atau pengungsi – harus memastikan bahwa respons pendidikan yang mereka lakukan melengkapi respons yang dilakukan otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lain. Strategi pendidikan secara keseluruhan harus mencakup:

- pendidikan anak usia dini;
- pendidikan dasar inklusif;
- kebutuhan pemuda, termasuk pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan;
- pendidikan bagi orang dewasa;
- pelatihan bagi guru sebelum mereka bertugas sebagai guru dan saat mereka sudah bertugas sebagai guru.

Strategi untuk peserta didik dewasa harus mencakup program pendidikan non-formal membaca dan berhitung, peningkatan keterampilan hidup dan peningkatan kesadaran untuk keselamatan dan keamanan, seperti kesadaran terhadap ranjau darat. Pembangunan pendidikan di daerah yang menerima kembali para penyintas/ pengungsi harus memberikan dukungan jangka panjang seperti kelas untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dan pelatihan kejuruan (lihat

juga Koordinasi standar 1 pada halaman 41-45 dan Belajar-Mengajar standar 1-2 pada halaman 98-109).

9. **Pengumpulan data dasar (*baseline*):** 'Data dasar' mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari populasi yang ditargetkan sebelum dimulainya kegiatan pendidikan baru. Data dasar ini membantu staf program memahami situasi pendidikan dan digunakan untuk membentuk dasar sebagai pembandingan dengan informasi yang dikumpulkan kemudian, selama pemantauan dan evaluasi. Data dasar harus dikumpulkan secara sistematis. Sebagai contoh termasuk data penduduk terpilah, tingkat kehadiran di sekolah dan rasio guru-murid. Data dapat spesifik terhadap suatu intervensi. Misalnya, jika program dimaksudkan untuk meningkatkan kehadiran anak-anak perempuan di sekolah, maka tingkat kehadiran dari anak-anak perempuan sebelum program dimulai akan diperlukan sebagai data dasar.

Analisis Standar 3: Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap kegiatan respons pendidikan dan berbagai kebutuhan belajar yang berkembang dari populasi yang terkena dampak.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Ada beberapa sistem yang efektif untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan respons pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan (lihat Catatan Panduan 1).
- Kegiatan respons pendidikan dipantau untuk menjamin keselamatan dan keamanan semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 1).
- Kelompok rentan dilibatkan dalam konsultasi secara teratur, dilatih dalam metodologi pengumpulan data dan dilibatkan dalam kegiatan pemantauan (lihat Catatan Panduan 2).
- Pemilahan data pendidikan dikumpulkan secara sistematis dan teratur dan menggambarkan respons pendidikan (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Data pendidikan dianalisis dan disebarakan secara berkala kepada semua pihak terkait, khususnya masyarakat yang terkena dampak serta kelompok rentan (lihat Catatan Panduan 3-4).

Catatan Panduan

1. **Pemantauan** mengukur apakah program dapat memenuhi kebutuhan pendidikan yang berubah dan bagaimana program menanggapi konteks yang berkembang. Hal ini untuk:
 - memastikan bahwa intervensi relevan dan responsif;
 - mengidentifikasi kemungkinan bagi penyempurnaan;
 - memberikan kontribusi untuk mitigasi konflik dan pengurangan risiko bencana;
 - meningkatkan akuntabilitas.

Dampak program pendidikan, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, harus dipantau untuk memastikan bahwa dampak tersebut tidak meningkatkan marginalisasi, diskriminasi, konflik atau bencana alam. Kunjungan pemantauan tanpa pemberitahuan dapat meningkatkan validitas data pemantauan.

Perancangan pemantauan akan menentukan seberapa sering jenis data yang berbeda dikumpulkan, sesuai kebutuhan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pengumpulan data dan pengolahan. Banyak jenis informasi yang dapat dikumpulkan dari sekolah-sekolah dan dari berbagai program pendidikan lain berdasarkan sampel, di mana informasi tersebut memberikan indikasi cepat terkait kebutuhan dan masalah. Informasi tersebut dapat berupa:

- data terpilah tentang angka pendaftaran dan angka putus sekolah;
- apakah para siswa makan sebelum kehadiran mereka di sekolah;
- ketersediaan buku pelajaran dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.

Pemantauan terhadap anak-anak dan pemuda yang keluar dari sekolah dan alasan mereka untuk tidak mendaftar atau hadir dapat dilakukan melalui kunjungan dan melakukan sebuah sampel acak kecil dari rumah tangga. Selama pemantauan, penting untuk mendengarkan langsung suara-suara perempuan dan kelompok rentan. Jika data etnis atau kelompok sosial lain terlalu sensitif atau sulit untuk dikumpulkan secara komprehensif, survei sampel dan umpan-balik secara kualitatif, seperti percakapan informal, dapat menunjukkan adanya masalah khusus terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Sistem pemantauan dan pelaporan diperlukan untuk mengamati pelanggaran terhadap keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain, dan untuk kondisi infrastruktur pendidikan. Hal ini sangat penting di mana terdapat risiko serangan bersenjata, penculikan, perekrutan anak untuk angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata, kekerasan berbasis gender atau bencana alam. Untuk aspek pemantauan seperti ini, pemangku kepentingan pendidikan mungkin perlu bekerja sama dengan otoritas lokal dan nasional atau dengan PBB dan organisasi non-pemerintah untuk keamanan, keadilan, perlindungan dan hak asasi manusia. Penting untuk mempertimbangkan sensitivitas informasi yang dilaporkan.

Kegiatan respons pendidikan yang sedang dilaksanakan dapat dimodifikasi jika diperlukan, berdasarkan hasil pemantauan.

2. **Orang-orang yang dilibatkan dalam pemantauan** perlu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua kelompok dalam populasi yang terkena dampak dengan selalu mempertimbangkan budaya atau adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut. Adalah penting bahwa tim terbentuk secara imbang-gender, fasih dalam bahasa lokal dan terlatih dalam pengumpulan data. Praktik lokal mungkin mengharuskan perempuan atau kelompok minoritas dimintai pendapat secara terpisah oleh individu-individu yang dapat dipercaya. Perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak, termasuk pemuda, harus dilibatkan sedini mungkin dalam memantau efektivitas program pendidikan yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini penting khususnya dalam program pendidikan non-formal bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti para gadis atau para peserta didik berkebutuhan khusus (lihat juga Analisis standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 55 dan Analisis standar 4, Catatan Panduan 3 pada halaman 65).

3. **Sebuah sistem informasi manajemen pendidikan**, biasanya dikelola oleh otoritas nasional, yang menyusun dan menganalisis data pendidikan. Jika sistem informasi manajemen pendidikan sudah ada sesuai dengan konteksnya, sistem ini mungkin saja terganggu oleh situasi darurat atau mungkin perlu *di-upgrade*. Pengembangan atau rehabilitasi sistem informasi manajemen pendidikan nasional atau yang semacam mungkin memerlukan pengembangan kapasitas pada tingkat nasional, regional dan lokal. Peningkatan kapasitas mendukung orang-orang yang relevan untuk mengumpulkan, mengelola, menafsirkan, menggunakan serta berbagi informasi yang tersedia. Hal ini harus dimulai sedini mungkin, dengan tujuan agar ada sistem yang berfungsi, idealnya ditempatkan dalam badan pemerintah pada tahap pemulihan (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 43; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 137; dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).

Perangkat lunak dan perangkat keras yang kompatibel untuk sistem informasi manajemen pendidikan sangat penting. Kantor dinas pendidikan nasional dan lokal serta sub-sektor pendidikan lain, seperti lembaga pelatihan nasional, harus memiliki peralatan yang kompatibel untuk memfasilitasi pertukaran informasi. Telepon seluler yang dilengkapi dengan perangkat lunak khusus dapat meningkatkan pengumpulan data, namun demikian kurangnya teknologi tidak seharusnya menghalangi pengumpulan data dari wilayah yang kekurangan sumber daya.

4. **Pemantauan terhadap peserta didik** harus dilakukan bilamana memungkinkan selama mereka belajar dan setelah mereka menyelesaikan atau meninggalkan suatu kursus. Pemantauan melalui pengkajian kuantitatif dan kualitatif dapat mencakup, misalnya:
 - perkembangan motorik kasar dan halus, pembangunan kognitif dan sosio-emosional pada anak-anak yang sangat muda;
 - retensi keterampilan membaca dan berhitung;
 - kesadaran dan penerapan kecakapan hidup yang utama;
 - akses ke bahan bacaan pasca melek huruf.

Untuk pendidikan kejuruan, pemantauan harus melacak kesempatan kerja bagi peserta didik. Pemantauan pasca program untuk peserta didik memberikan umpan balik yang berharga bagi perancangan program (lihat juga Belajar-Mengajar standar 4 pada halaman 113-115 dan *Standar Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Lapangan Kerja dan Standar-standar Pengembangan Usaha).

Analisis Standar 4: Evaluasi

Evaluasi yang sistematis dan tidak memihak meningkatkan respons kegiatan pendidikan dan memperkuat akuntabilitas.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Evaluasi secara berkala terhadap kegiatan respons pendidikan menghasilkan data yang kredibel dan transparan dan menginformasikan kegiatan pendidikan masa depan (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari masyarakat yang terkena dampak dan otoritas pendidikan, terlibat dalam kegiatan evaluasi (lihat Catatan Panduan 3).
- Pembelajaran dan praktik-praktik yang baik dibagikan secara luas dan menginformasikan advokasi, program dan kebijakan di masa mendatang (lihat Catatan Panduan 4).

Catatan Panduan

1. **Perbedaan antara pemantauan dan evaluasi:** Pemantauan dan evaluasi adalah kunci untuk mencapai tujuan dan sasaran program pendidikan. Pemantauan adalah proses yang berkelanjutan yang secara teratur mengukur kemajuan terhadap tujuan dan sasaran program pendidikan. Hal ini memungkinkan staf program pendidikan untuk melakukan perubahan selama program berjalan atau selama siklus proyek untuk memastikan bahwa program tetap pada jalurnya untuk mencapai tujuan dan sasaran mereka.

Evaluasi lebih jarang dilakukan dibanding pemantauan, biasanya dilakukan di tengah atau di akhir program atau di tengah atau di akhir siklus proyek dan dilaksanakan oleh pihak eksternal atau independen. Evaluasi mengukur hasil dan mengevaluasi apakah hasil yang diharapkan telah dicapai. Evaluasi juga dapat menunjukkan apakah kegiatan masih relevan dengan prioritas, kebijakan, dan instrumen hukum yang ditentukan, dan apakah program tersebut dilaksanakan secara efisien.

2. **Evaluasi terhadap kegiatan respons pendidikan** harus menggunakan pendekatan dan metode yang menghasilkan bukti hasil dan dampak program yang tepat waktu dan kredibel, yang dapat menginformasikan tindakan di masa mendatang. 'Dampak' adalah perubahan terukur yaitu bahwa program tersebut memengaruhi kehidupan manusia. Data, baik kualitatif maupun kuantitatif yang dipilah menurut jenis kelamin dan usia adalah penting. Data kuantitatif terkait dengan hal-hal yang dapat dihitung. Data ini mengukur hasil seperti tingkat pendaftaran, tingkat kehadiran, tingkat putus sekolah, dan tingkat prestasi. Data kualitatif terkait dengan hal-hal yang tidak bisa diukur menggunakan angka. Data kualitatif membantu untuk memahami proses dan menjelaskan hasil. Contoh data kualitatif mencakup informasi tentang apa yang terjadi di sekolah atau ruang belajar lain, serta alasan di balik tingkat pendaftaran, tingkat kehadiran dan tingkat putus sekolah (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 2 pada halaman 47-48 dan Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 43).
3. **Peningkatan kapasitas melalui evaluasi:** Anggaran untuk evaluasi harus mencakup lokakarya peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan yang relevan, termasuk otoritas pendidikan, wakil masyarakat dan peserta didik. Hal ini dapat memperkenalkan dan menjelaskan kegiatan evaluasi, mengembangkan rencana evaluasi secara partisipatif dan transparan, serta memungkinkan para pemangku kepentingan untuk meninjau dan menginterpretasikan temuan secara bersama-sama. Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain harus terlibat dalam proses evaluasi untuk meningkatkan akurasi pengumpulan data dan mendukung pengembangan atas rekomendasi yang realistis yang dapat diterapkan. Misalnya, guru dan tenaga kependidikan lain dapat menambahkan wawasan terhadap kesulitan praktis yang dihasilkan dari rekomendasi yang diusulkan (lihat juga Analisis standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 55; Analisis standar 3, Catatan Panduan 2 pada halaman 62, dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).

4. **Berbagi temuan-temuan evaluasi dan pelajaran yang dipetik:**

Berbagai temuan kunci dalam laporan evaluasi, khususnya rekomendasi dan pembelajaran, harus dibagi dalam bentuk yang dimengerti oleh semua pihak, termasuk anggota masyarakat. Temuan dan laporan itu harus menginformasikan pekerjaan di masa mendatang. Data sensitif harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kontribusi terhadap situasi darurat atau konflik dan / atau untuk menghindari risiko bagi para informan yang berkontribusi atas informasi anonim atau sensitif (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 dan 5 pada halaman 43-44 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).



Untuk perangkat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE

- ↳ Standar Minimum INEE
- ↳ Perangkat Penerapan
- ↳ Standar dasar

2

DOMAIN DUA: AKSES DAN LINGKUNGAN BELAJAR

**Standar Dasar:
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

Akses dan Lingkungan Belajar

**Standar 1
Kesetaraan Akses**

Semua individu memiliki akses kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

**Standar 2 Per-
lingkungan dan
Kesejahteraan**

Lingkungan belajar aman, serta mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain.

**Standar 3
Fasilitas dan
Layanan**

Fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain serta terkait dengan pelayanan kesehatan, nutrisi, psikososial dan perlindungan.

Selama masa krisis, akses kepada pendidikan, yang merupakan hak vital dan sumber daya, seringkali sangat terbatas. Pendidikan memainkan peran penting dalam membantu masyarakat yang terkena dampak dalam mengatasi situasi mereka dan menciptakan normalitas dalam hidup mereka. Hal ini dapat memberikan pengetahuan penyelamatan kehidupan dan keterampilan untuk bertahan hidup, dan mungkin menawarkan kesempatan untuk perubahan yang akan meningkatkan keadilan dan kualitas pendidikan.

Seringkali cukup rumit untuk mengatur kegiatan pendidikan selama situasi darurat hingga pemulihan. Terdapat risiko bahwa kelompok-kelompok rentan yang baru tidak akan mendapatkan manfaat dari pendidikan, atau bahwa pola-pola risiko sebelumnya dan pola-pola pengucilan semakin meningkat dalam masa tanggap darurat. Otoritas nasional, masyarakat dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan akses terhadap pendidikan yang relevan dan berkualitas di lingkungan belajar yang aman. Hal ini mendorong perlindungan fisik dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain.

Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain terlalu sering terkena risiko fisik atau psikososial dalam perjalanan menuju ke dan dari fasilitas pendidikan, juga di dalam lingkungan belajar. Program pendidikan di masa darurat hingga masa pemulihan dapat memberikan perlindungan fisik dan psikososial. Fasilitas pendidikan sementara dan permanen, termasuk sekolah, ruang belajar dan ruang yang ramah anak, harus ditempatkan, dirancang dan dibangun untuk tahan terhadap semua bahaya yang mungkin. Seluruh fasilitas tersebut harus dapat dijangkau oleh semua orang yang akan dilayani.

Fasilitas pendidikan yang lebih aman menjamin kelangsungan pendidikan, memperkecil gangguan belajar-mengajar. Fasilitas ini dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sangat penting untuk mengurangi kemiskinan, buta aksara dan penyakit. Di mana pendidikan mungkin tidak merata sebelum situasi darurat, membangun

kembali pendidikan yang lebih aman dan lebih adil bisa menjadi kontribusi penting dalam membangun perdamaian.

Tidak seorang pun boleh ditolak aksesnya terhadap pendidikan dan kesempatan belajar karena diskriminasi. Program harus menyediakan pelayanan pendidikan baik formal maupun non-formal untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan untuk mengurangi hambatan untuk mengakses pendidikan. Semua penyelenggara pendidikan harus waspada dengan diskriminasi gender dan berbagai risiko yang berbeda untuk anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Langkah-langkah perlu diambil untuk menghadapi berbagai risiko tersebut. Diskriminasi mungkin disebabkan oleh, misalnya, biaya sekolah, bahasa dan hambatan fisik, yang dapat mengucilkan kelompok tertentu.

Akses dan Lingkungan Belajar Standar 1: Kesetaraan Akses

Semua individu memiliki akses kepada kesempatan pendidikan yang relevan dan berkualitas.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Tidak ada individu atau kelompok sosial yang ditolak aksesnya untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan belajar karena diskriminasi (lihat Catatan Panduan 1).
- Struktur dan tempat belajar dapat diakses oleh semua pihak (lihat Catatan Panduan 1).
- Hambatan untuk pendaftaran, seperti kurangnya dokumen atau persyaratan lain, ditiadakan (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Berbagai peluang yang fleksibel untuk pendidikan formal maupun non-formal diberikan kepada penduduk yang terkena bencana demi memenuhi kebutuhan pendidikan mereka (lihat Catatan Panduan 3-5).
- Melalui sosialisasi dan pelatihan, masyarakat lokal menjadi semakin terlibat dalam menjamin hak-hak anak-anak, pemuda dan orang dewasa terhadap kualitas dan pendidikan yang relevan (lihat Catatan Panduan 6-7).
- Sumber daya cukup tersedia dan menjamin kesinambungan, keadilan dan kualitas kegiatan pendidikan (lihat Catatan Panduan 8).
- Peserta didik memiliki kesempatan untuk memasuki atau kembali masuk ke dalam sistem pendidikan formal sesegera mungkin setelah gangguan yang disebabkan oleh situasi darurat (lihat Catatan Panduan 9).
- Program pendidikan dalam konteks pengungsi diakui oleh otoritas pendidikan setempat yang relevan dan oleh otoritas negara asal.
- Layanan pendidikan untuk kelompok yang terkena bencana tidak berdampak negatif terhadap populasi tuan rumah.

Catatan Panduan

1. **Diskriminasi** termasuk hambatan yang dikarenakan oleh jenis kelamin, usia, orang berkebutuhan khusus, status HIV, kebangsaan, ras, etnis, suku, klan, kasta, agama, bahasa, budaya, afiliasi politik, orientasi seksual, latar belakang sosial-ekonomi, lokasi geografis atau kebutuhan

pendidikan yang khusus . Diskriminasi mungkin disengaja. Mungkin juga terjadi secara tidak sengaja akibat infrastruktur yang tidak bisa diakses oleh mereka yang berkebutuhan khusus, atau kebijakan dan praktik yang tidak mendukung partisipasi peserta didik. Contoh diskriminasi termasuk pembatasan sekolah bagi anak-anak perempuan yang hamil atau peserta didik yang terjangkit oleh HIV serta biaya sekolah, seragam, buku dan perlengkapan.

Kelompok-kelompok atau individu tertentu mungkin mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan dalam situasi darurat. Beberapa kelompok mungkin menjadi lebih rentan sebagai akibat dari situasi darurat dan pengungsian. Kelompok-kelompok ini dapat mencakup:

- orang-orang berkebutuhan khusus secara fisik dan mental;
- mereka yang menderita gangguan kesehatan mental yang berat dan kesulitan-kesulitan psikososial;
- anak-anak gadis;
- para pemuda;
- anak-anak yang berhubungan dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata;
- para remaja yang menjadi kepala rumah tangga;
- ibu-ibu muda usia;
- orang-orang yang berasal dari etnis atau kelompok sosial tertentu.

Otoritas nasional, masyarakat dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses pada kegiatan pendidikan. Dengan demikian, memahami kebutuhan dan prioritas kelompok tertentu serta orang-orang dengan kebutuhan belajar yang berbeda dalam konteks tertentu, dan lalu menangani mereka. Kebijakan diskriminatif dan praktik yang membatasi akses kesempatan belajar harus diidentifikasi dan diperbaiki. Kurangnya akses pendidikan bagi kelompok etnis, bahasa, geografis atau usia tertentu dapat menimbulkan atau mempertahankan ketegangan yang mungkin akan menyebabkan konflik.

Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)
– *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

(1966) – menjelaskan hak atas pendidikan:

- Pasal 2 mengakui 'hak atas pendidikan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain';
- Pasal 13 mengakui hak setiap orang atas pendidikan 'yang harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya bagi kepribadian manusia dan kesadaran atas martabatnya, dan harus memperkuat rasa hormat terhadap hak asasi manusia serta kebebasan fundamental. Pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan semua kelompok etnis, agama, ras, serta kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian'. Pasal 13 juga mengikat negara-negara untuk mengakui bahwa, dengan tujuan untuk mencapai realisasi penuh atas hak ini: '1) pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia gratis untuk semua orang; 2) pendidikan sekunder dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan menengah teknis dan kejuruan, harus tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak dengan berbagai cara yang tepat, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan secara cuma-cuma; 3) pendidikan dasar harus didorong atau diintensifkan sejauh mungkin bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau menyelesaikan keseluruhan masa pendidikan dasar mereka (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 1 dan 7 pada halaman 133-134 dan 138 dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 140).

2. **Penerimaan, pendaftaran dan retensi:** Persyaratan dokumentasi harus fleksibel. Surat kewarganegaraan, akte kelahiran atau surat keterangan usia, surat-surat identitas atau laporan sekolah tidak harus diwajibkan karena masyarakat yang terkena bencana mungkin tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut. Batasan umur tidak boleh ketat, asalkan perlindungan dan norma-norma budaya dihormati. Kesempatan kedua untuk pendaftaran bagi yang putus sekolah harus diberikan. Upaya-

upaya khusus diperlukan untuk mengidentifikasi individu-individu yang paling rentan dan bagaimana untuk memasukkan mereka. Jika timbul masalah keamanan, dokumentasi dan informasi pendaftaran harus dirahasiakan (lihat juga Catatan Panduan 4 halaman 76; Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 1, 2 dan 7 pada halaman 133-138; dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 139).

3. **Berbagai kesempatan pendidikan yang berkualitas** adalah sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan bagi semua peserta didik terpenuhi dan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial dan politik negara. Berbagai kesempatan ini harus relevan dengan para peserta didik dan sesuai dengan keadaan, serta dapat mencakup:
- pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan dasar, menengah, dan tinggi;
 - kelas membaca dan berhitung;
 - pendidikan keterampilan hidup;
 - program pendidikan bagi pemuda dan orang dewasa, seperti pendidikan teknik dan kejuruan.

Dalam krisis akut, ruang ramah anak atau ruang yang aman sering kali menjadi respons pertama saat pendidikan formal didirikan atau diaktifkan kembali. Ruang ramah anak bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan anak-anak dan pemuda. Beberapa di antaranya mempersiapkan anak-anak dan pemuda untuk kembali masuk kelas formal, sementara yang lain memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar non-formal. Mereka menyediakan akses untuk belajar, bermain, olahraga, drama, seni, musik, perlindungan dan dukungan psikososial yang terstruktur bagi kelompok usia yang berbeda, mulai dari anak-anak muda hingga para pemuda. Ruang yang ramah anak memungkinkan anggota masyarakat dan pemerintah serta pekerja kemanusiaan untuk mengkaji kebutuhan dan kapasitas untuk pendidikan formal dan non-formal, termasuk bagaimana mengintegrasikan dan mendukung inisiatif lokal.

4. **Fleksibilitas:** Kesempatan belajar harus fleksibel dan disesuaikan dengan keadaan. Adaptasinya mungkin termasuk:
- perubahan jadwal kelas, jam, giliran dan jadwal tahunan untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok peserta didik tertentu;
 - mode penyampaian alternatif, seperti belajar mandiri, pembelajaran jarak jauh dan dipercepat atau program pembelajaran “mengejar ketertinggalan”;
 - penyediaan jasa perawatan anak untuk orang tua muda;
 - peniadaan persyaratan dokumentasi, seperti akte kelahiran atau surat keterangan usia (lihat juga Catatan Panduan 2 di atas).

Adaptasi harus didiskusikan dengan anggota masyarakat, termasuk pemuda, perempuan dan orang-orang yang mungkin akan terkecualikan. Otoritas pendidikan yang relevan harus dilibatkan untuk memastikan bahwa usulan adaptasi diakui. Jika peserta didik tersebar di area yang luas, sekolah dan lokasi belajar lain dapat dipetakan untuk merencanakan biaya akses yang paling efektif ke berbagai kesempatan pendidikan (lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 138 dan Kebijakan Pendidikan Standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 139).

5. **Prioritas pendidikan yang mendesak** harus didasarkan pada pengkajian awal. Penting untuk mempertimbangkan:
- data terpilah menurut jenis kelamin dan usia;
 - masalah kerentanan dan perlindungan;
 - kebutuhan tertentu seperti informasi penyelamatan kehidupan;
 - hubungan dengan pembentukan kembali sistem pendidikan.

Prioritas juga dapat mempertimbangkan kendala-kendala keuangan, logistik dan keamanan, tanpa harus mengesampingkan kelompok-kelompok rentan (lihat juga Analisis standar 1 pada halaman 46-53, Belajar-Mengajar standar 1 pada halaman 98-105, dan Kebijakan Pendidikan Standar 1 - 2 pada halaman 133-141).

6. **Pendidikan yang ‘berkualitas’ dan ‘relevan’:** lihat Daftar istilah pada halaman 152 untuk definisi istilah-istilah ini.

7. **Keterlibatan masyarakat:** Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam proses pendidikan dalam rangka memfasilitasi akses terhadap pendidikan. Keterlibatan masyarakat membantu untuk:

- menangani kesenjangan komunikasi;
- memobilisasi sumber daya tambahan;
- menangani masalah keamanan, perlindungan dan psikososial;
- mengidentifikasi kebutuhan untuk kesempatan belajar alternatif;
- meningkatkan partisipasi dari semua kelompok yang relevan, khususnya mereka yang rentan.

(Lihat juga Daftar Istilah pada halaman 150 untuk definisi “partisipasi”; Partisipasi Masyarakat Standar 1-2 pada halaman 29-40, dan Belajar-Mengajar standar 3, Catatan Panduan 2 pada halaman 111).

8. **Sumber daya:** Otoritas nasional memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia. Hal ini termasuk koordinasi dan penyediaan keuangan, materi dan sumber daya manusia yang memadai. Jika otoritas nasional tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sepenuhnya dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan, dukungan tambahan mungkin tersedia dari sumber lain. Contohnya termasuk dari masyarakat internasional, badan-badan PBB, LSM lokal dan internasional, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi berbasis agama, kelompok masyarakat sipil dan mitra pembangunan lain. Para donor harus fleksibel dan harus mendukung berbagai pendekatan terkoordinasi untuk menjamin kelangsungan inisiatif pendidikan dan pembelajaran (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 37 dan Analisis standar 2, Catatan Panduan 1 dan 5 pada halaman 54-57) .

9. **Meminimalkan penggunaan fasilitas pendidikan sebagai tempat penampungan sementara:** Fasilitas pendidikan seharusnya hanya digunakan sebagai tempat penampungan untuk para penyintas bila tidak ada kemungkinan tempat lain. Lokasi-lokasi alternatif untuk berlindung dalam situasi darurat atau bencana harus diidentifikasi pada saat perencanaan kesiapsiagaan.

Ketika fasilitas pendidikan digunakan sebagai tempat penampungan

sementara, dampak negatif dan risiko potensial terhadap perlindungan harus diminimalkan melalui kerja sama dengan sektor penampungan dan sektor perlindungan. Pemangku kepentingan harus setuju untuk menentukan batas waktu kapan fasilitas pendidikan dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal ini akan memperkecil gangguan belajar dan menghindari penyintas tinggal terlalu lama dalam fasilitas pendidikan setelah berlangsungnya situasi darurat.

Jika fasilitas pendidikan digunakan sebagai tempat penampungan sementara, penting untuk melindungi properti sekolah, seperti buku, perpustakaan, perabot, catatan sekolah dan peralatan rekreasi. Fasilitas pendidikan harus dikembalikan dalam situasi seperti semula. Bilamana memungkinkan, para pemangku kepentingan harus menggunakannya sebagai kesempatan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Sebagai contoh, fasilitas sanitasi bisa direnovasi dan struktur bangunan dapat diperkuat (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar Standar 3, Catatan Panduan 4-6 pada halaman 90-91 dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 136).

Akses dan Lingkungan Belajar Standar 2: Perlindungan dan Kesejahteraan

Lingkungan belajar aman dan selamat, dan mempromosikan perlindungan dan kesejahteraan psikososial peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Lingkungan belajar bebas dari sumber bahaya bagi para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 1 dan 3-4).
- Guru dan tenaga kependidikan lain memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mempromosikan kesejahteraan psikososial peserta didik (lihat Catatan Panduan 2-3 dan 8-9)
- Sekolah, ruang belajar sementara dan ruang ramah anak berlokasi dekat dengan populasi yang dilayani (lihat Catatan Panduan 5-6).
- Rute akses ke lingkungan belajar aman, selamat dan dapat dijangkau oleh semua pihak (lihat Catatan Panduan 5-7).
- Lingkungan belajar bebas dari serangan dan pendudukan militer (lihat Catatan Panduan 1, 3 dan 6-7).
- Masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tentang lokasi lingkungan belajar, dan tentang sistem serta kebijakan untuk memastikan bahwa peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain aman dan selamat (lihat Catatan Panduan 1 dan 10).
- Lingkungan belajar yang aman diselenggarakan melalui pengurangan risiko bencana dan kegiatan pengelolaan (lihat Catatan Panduan 11).

Catatan Panduan

1. **Keamanan dan keselamatan:** Sebuah lingkungan belajar yang aman memberikan perlindungan dari ancaman, bahaya, cedera atau kerugian. Lingkungan yang aman bebas dari bahaya fisik atau bahaya psikososial (lihat juga Daftar Istilah pada halaman 151-153).

Otoritas nasional memiliki kewajiban untuk memastikan keamanan. Hal ini termasuk menyiapkan pihak kepolisian yang cukup dan berkualitas baik, serta pengerahan pasukan jika diperlukan. Apabila lokasi belajar yang biasa tidak aman atau tidak tersedia, lokasi atau cara pembelajaran alternatif yang aman harus disiapkan. Sekolah rumah atau pembelajaran

jarak jauh dapat menjadi pilihan. Dalam situasi tidak aman, masyarakat harus memberikan saran apakah mereka ingin peserta didik tetap bersekolah. Pasukan keamanan tidak boleh menggunakan sarana pendidikan sebagai tempat penampungan sementara (untuk keamanan, lihat juga Catatan Panduan 5-7 halaman 83-85; untuk keselamatan, lihat juga Catatan Panduan 2-4, 8-9 dan 11 di bawah ini, lihat juga Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).

2. **Kesejahteraan emosional, fisik dan sosial** tergantung pada:
 - keamanan, keselamatan dan perlindungan;
 - kesehatan;
 - kebahagiaan dan keakraban dalam hubungan antara penyelenggara pendidikan dan peserta didik, juga di antara para peserta didik.

Sejak usia dini, perkembangan dan pembelajaran anak didukung oleh interaksi mereka dengan orang-orang yang peduli dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kegiatan untuk memastikan kesejahteraan pelajar berfokus kepada pengembangan yang sehat, interaksi sosial yang positif dan kesehatan yang baik. Pelajar didorong untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang hasilnya dapat mempengaruhi mereka. Dengan berpartisipasi dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan pengurangan risiko, anak-anak serta pemuda bisa merasa lebih percaya diri dan dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Jika orang tua tidak dapat memberikan kesejahteraan pada anak-anak mereka di rumah, pihak lain harus membantu. Hal ini mungkin termasuk rujukan ke layanan yang tepat jika tersedia (lihat Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 92).

3. **Perlindungan:** 'Perlindungan' berarti kebebasan dari segala bentuk ancaman fisik, emosional dan sosial, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan. Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain harus diberitahu tentang bahaya dan dilindungi dari bahaya di dalam dan di sekitar lingkungan belajar. Bahaya meliputi:

- *bullying*;
- eksploitasi seksual;
- bahaya alam dan lingkungan;
- senjata, amunisi, ranjau darat dan persenjataan yang tidak meledak;
- personel bersenjata, lokasi baku tembak dan ancaman militer lain, termasuk penculikan dan perekrutan;
- ketidakamanan politik.

Pengkajian risiko, termasuk konsultasi dengan anggota masyarakat, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain, merupakan hal penting untuk memahami kebutuhan dan prioritas perlindungan. Pengkajian ini harus dilakukan secara berkala dan harus mencakup analisis faktor budaya dan politik yang relevan (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 2-3 pada halaman 47-50).

Ketika pelanggaran perlindungan terjadi, maka hal ini harus didokumentasikan dan dilaporkan secara hati-hati, sebaiknya dengan bantuan orang yang terlatih dalam pengawasan hak asasi manusia. Informasi kunci tentang insiden itu harus diperhatikan, termasuk jenis kelamin, umur dan apakah orang tersebut menjadi sasaran berdasarkan karakteristik tertentu. Informasi tersebut penting untuk mengidentifikasi pola dan mungkin diperlukan untuk membuat intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Tanggapan untuk pelanggaran yang dilaporkan juga harus didokumentasikan, termasuk rujukan penyedia layanan kesehatan, perlindungan dan psikososial.

Dalam lingkungan di mana kekerasan dan ancaman lain terhadap keamanan fisik dan psikososial bagi para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain sering ditemukan, perlu untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mempromosikan keselamatan di rumah dan masyarakat. Kegiatannya meliputi:

- kampanye informasi bagi orang tua dan para tetua untuk memperkuat metode positif termasuk praktik-praktik disiplin positif;
- memberikan masukan kepada polisi atau aparat keamanan lain untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah perlindungan di masyarakat;
- bekerja dengan masyarakat serta pihak berwenang terkait untuk

mengatasi masalah perlindungan khusus, seperti mengorganisir pengawasan bagi pelajar pergi ke dan dari kelas.

(Lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).

4. **Kekerasan berbasis gender** (untuk definisi, lihat Daftar Istilah pada halaman 146), terutama kekerasan seksual, adalah masalah perlindungan atas ancaman kehidupan yang serius. Hal ini dapat memengaruhi lelaki dewasa maupun anak-anak laki-laki, tetapi yang paling sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender adalah wanita dewasa dan anak-anak gadis. Program pendidikan harus memantau dan memberikan respons terhadap masalah pelecehan dan eksploitasi seksual. Orang tua, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain harus sepakat akan cara-cara untuk mengurangi risiko bagi anak-anak dan pemuda dalam perjalanan ke dan dari lingkungan belajar. Hal ini mungkin termasuk:

- mengembangkan dan menyebarkan peraturan yang jelas terhadap pelecehan seksual, eksploitasi, pelecehan dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender lain;
- termasuk peraturan dalam kode etik bagi guru dan tenaga kependidikan lain, tentang perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima;
- meningkatkan jumlah wanita dewasa di lingkungan belajar untuk melindungi dan meyakinkan peserta didik perempuan. Apabila tidak ada keseimbangan antara jumlah guru laki-laki dan guru perempuan, para wanita dari masyarakat dapat menjadi relawan asisten kelas untuk mempromosikan lingkungan perlindungan bagi anak-anak yang lebih baik.

Ketika kekerasan berbasis gender terjadi, pelaporan yang hati-hati dan aman, sistem keluhan dan respons merupakan hal penting. Ini dapat difasilitasi oleh otoritas nasional atau oleh organisasi independen yang mempunyai kompetensi tentang kekerasan berbasis gender. Dukungan tepat terhadap kesehatan, psikososial, perlindungan dan peradilan harus tersedia bagi korban kekerasan berbasis gender melalui sistem rujukan yang terkoordinasi dengan baik (lihat juga Catatan Panduan

9 halaman 85; Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 125; dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).

5. **Jarak maksimum antara peserta didik dan lokasi pembelajaran** harus ditentukan sesuai dengan standar lokal dan nasional. Penting untuk mempertimbangkan keamanan, keselamatan dan keterjangkauan seperti markas militer, ranjau darat dan semak-semak lebat di sekitarnya. Lokasi tempat belajar dan potensi bahaya perlu dikonsultasikan dengan peserta didik, orang tua dan anggota masyarakat lain. Jika jarak ke sekolah sangat jauh sehingga mengurangi akses, dapat didorong agar menyiapkan kelas jarak jauh (melalui 'satelit' atau 'feeder') di lokasi dekat dengan tempat tinggal peserta didik (lihat juga Catatan Panduan 3 di atas dan 6-7 di bawah).
6. **Rute akses:** Bahaya-bahaya harus diidentifikasi dan langkah-langkah untuk mengatasinya harus disepakati untuk memastikan rute akses yang aman dan selamat bagi semua peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain, masyarakat, termasuk anak laki-laki dan perempuan dari kelompok usia yang berbeda. Sebagai contoh, di sepanjang jalan di mana para peserta didik harus berjalan kaki ke dan dari fasilitas sekolah, penerangan yang ada sangat buruk, keselamatan dapat ditingkatkan dengan menyiapkan pendamping dewasa atau dengan menggunakan reflektor atau selotip yang memantulkan cahaya pada pakaian dan tas (lihat juga Catatan Panduan 3 di atas dan 7 di bawah ini; Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 2-5 pada halaman 30-35, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).
7. **Menjaga pendidikan yang aman dari serangan:** Pada beberapa situasi, dalam perjalanan ke dan dari fasilitas pendidikan, para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan berhadapan dengan risiko fisik atau psikososial. Tindakan untuk mengurangi risiko ini meliputi:
 - memperkaya kurikulum untuk memasukkan pesan keselamatan, dukungan psikososial dan pendidikan tentang hak asasi

manusia, resolusi konflik, pembangunan perdamaian dan hukum kemanusiaan;

- meningkatkan kesadaran publik tentang arti dan penggunaan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*the Geneva Conventions and the Rome Statute of the International Criminal Court*), yang melarang serangan terhadap warga sipil (termasuk siswa dan guru) serta bangunan pendidikan dalam masa perang;
- peningkatan kapasitas bagi sistem peradilan militer dan pemerintah, angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata dalam prinsip-prinsip dasar hukum humaniter dan penerapannya terhadap perlindungan pendidikan;
- memperkuat bangunan atau dinding pembatas dan penggunaan penjaga keamanan (yang dibayar atau relawan masyarakat);
- perumahan bagi guru di sekolah;
- relokasi tempat belajar dan siswa, guru dan tenaga kependidikan lain yang terancam;
- penyiapan sekolah berbasis rumah dan sekolah berbasis masyarakat.

Tergantung pada keadaan dan keamanan, masyarakat atau komite pendidikan masyarakat dapat mengambil tanggung jawab untuk perlindungan sekolah. Misalnya, mereka dapat menyediakan pendamping atau mengidentifikasi masyarakat atau pemuka agama yang dapat dipercaya untuk mendukung dan mengajar di sekolah. Dalam konflik sipil, anggota masyarakat dapat membantu mempromosikan negosiasi dengan kedua pihak yang terlibat konflik untuk mengembangkan kode etik yang membuat sekolah dan tempat belajar menjadi tempat yang aman atau menjadi 'zona perdamaian'.

Serangan terhadap sekolah dan rumah sakit adalah merupakan satu dari enam pelanggaran berat yang dilarang di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1612 (2005). Jika serangan terjadi, maka hal ini harus dilaporkan melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan yang dipimpin oleh PBB (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan

Panduan 1 pada halaman 133-134 dan Kebijakan Pendidikan standar 2, Catatan Panduan 4 pada halaman 140-141).

8. **Pelatihan mengenai dukungan psikososial dan kesejahteraan:** guru dan tenaga kependidikan lain harus menerima pelatihan tentang tata cara pemberian dukungan psikososial untuk pelajar melalui:
- pembelajaran terstruktur;
 - penggunaan metode yang ramah-anak;
 - bermain dan rekreasi;
 - mengajar keterampilan hidup;
 - rujukan.

Penting untuk mengatasi masalah kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lain. Hal ini akan berdampak kepada kesejahteraan peserta didik dan bagi penuntasan program-program pendidikan baik formal maupun non-formal (lihat juga Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 102-103, Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 106 -107, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3 pada halaman 126-128).

9. **Manajemen kelas anti-kekerasan:** Menurut Kerangka Kerja Dakar, pendidikan harus dilakukan 'dengan cara-cara yang saling mempromosikan perdamaian, pemahaman dan toleransi, serta membantu untuk mencegah kekerasan dan konflik'. Untuk memenuhi tujuan ini, guru membutuhkan dukungan positif dalam manajemen kelas. Hal ini berarti memastikan bahwa lingkungan belajar mempromosikan saling pengertian, perdamaian dan toleransi dan memberikan keterampilan untuk mencegah kekerasan dan konflik. Penguatan yang positif dan sistem disiplin positif yang solid merupakan dasar untuk membangun lingkungan seperti itu. Mereka harus mengganti hukuman fisik, penghinaan verbal, pelecehan dan intimidasi. Intimidasi termasuk tekanan mental, kekerasan, pelecehan dan diskriminasi. Hal-hal ini harus dimasukkan dalam kode etik guru dan ditangani secara sistematis dalam pelatihan guru dan kegiatan supervisi (lihat juga Belajar-Mengajar standar 2-3 pada halaman 106-109; Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 125; dan Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3

pada halaman 126-128).

10. **Partisipasi masyarakat:** Masyarakat harus mengambil peran utama dalam menciptakan, mempertahankan dan melindungi lingkungan belajar. Perwakilan dari semua kelompok rentan harus berpartisipasi dalam perancangan program. Hal ini akan meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap dukungan untuk pendidikan (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1 pada halaman 29-36 dan Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 77).
11. **Pengurangan dan manajemen risiko bencana:** Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain dapat dilatih untuk mendukung pencegahan bencana dan kegiatan pengelolaan bencana. Ini mungkin termasuk:
 - pengembangan dan pemanfaatan rencana kesiapsiagaan situasi darurat;
 - praktik latihan simulasi bencana;
 - struktur sekolah dan langkah-langkah keamanan, seperti rencana evakuasi sekolah di daerah rawan gempa.

Masyarakat atau komite keamanan sekolah mungkin membutuhkan dukungan untuk mengembangkan dan memimpin pelaksanaan pengelolaan bencana atau rencana keselamatan sekolah. Dukungan termasuk membantu mengkaji dan memprioritaskan risiko, pelaksanaan strategi dan perlindungan lingkungan fisik dan mengembangkan prosedur dan keterampilan untuk kesiapsiagaan respons.

Rencana kesiapsiagaan situasi darurat, termasuk rencana evakuasi sekolah, harus dikembangkan dan dibagi dengan cara yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk orang yang buta huruf dan orang berkebutuhan khusus mental, fisik dan kognitif (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 88-89, Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 109; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 2 dan 6 pada halaman 134-137).

Akses dan Lingkungan Belajar Standar 3: Fasilitas dan Layanan

Fasilitas pendidikan mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan pelajar, guru dan tenaga kependidikan lain serta terkait dengan layanan perlindungan kesehatan, nutrisi, dan psikososial.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Struktur dan tempat belajar aman dan dapat diakses oleh semua pelajar, guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Lingkungan belajar, baik yang permanen maupun sementara diperbaiki, dilengkapi atau diganti sesuai kebutuhan dengan konstruksi dan desain yang tahan bencana (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Ruang belajar ditandai oleh batas-batas perlindungan yang terlihat dan tanda-tanda yang jelas.
- Struktur fisik untuk tempat pembelajaran tepat sesuai situasi serta memadai bagi ruang-ruang kelas, ruang administrasi, fasilitas rekreasi dan sanitasi (lihat Catatan Panduan 2 dan 4).
- Ruang kelas dan pengaturan tempat duduk memenuhi kesepakatan rasio antara luas ruang dengan jumlah peserta didik dan guru dalam rangka mempromosikan metodologi partisipatif dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (lihat Catatan Panduan 4).
- Anggota masyarakat, termasuk pemuda, berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan lingkungan belajar (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Pasokan air bersih yang cukup dan fasilitas sanitasi yang layak tersedia untuk kebersihan pribadi dan perlindungan, dengan memperhatikan jenis kelamin, umur dan orang berkebutuhan khusus (lihat Catatan Panduan 3 dan 5-6).
- Pendidikan kesehatan dan kebersihan berbasis keterampilan dipromosikan dalam lingkungan belajar (lihat Catatan Panduan 6).
- Pelayanan kesehatan dan gizi berbasis sekolah tersedia untuk mengatasi kelaparan dan hambatan pengembangan dan pembelajaran efektif lainnya (lihat Catatan Panduan 7).
- Sekolah dan ruang belajar terkait dengan perlindungan anak, kesehatan, gizi, sosial dan psikososial (lihat Catatan Panduan 8).

Catatan Panduan

1. **Lokasi:** Fasilitas pendidikan harus dibangun, direkonstruksi atau dipindahkan ke tempat yang mempromosikan kesetaraan dan keselamatan fisik peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain. Perlu dipertimbangkan jika lokasi fasilitas pendidikan sebelum masa darurat harus digunakan kembali. Membangun kembali struktur fisik di lokasi yang sama dapat menyebabkan keberlanjutan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat atau mungkin menempatkan peserta didik pada risiko bencana alam. Penting untuk melakukan kajian risiko bencana dan konflik. Kajian ini harus melibatkan konsultasi dengan perwakilan dari pemerintah nasional dan berbagai anggota masyarakat, khususnya kelompok rentan. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga di mana fasilitas pendidikan dapat dibangun. Kolaborasi dengan sektor lain (seperti koordinasi dan manajemen tempat pengungsian, hunian dan kesehatan) sangat penting untuk memastikan bahwa sekolah dan fasilitas pendidikan dekat dengan tempat tinggal peserta didik dan berbagai layanan lain (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 1-6 pada halaman 46-52; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 86; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 136, dan Koordinasi standar 1 pada halaman 41-45).
2. **Struktur, desain, dan konstruksi:** Penting untuk mempertimbangkan unsur-unsur berikut dalam desain dan konstruksi fasilitas pendidikan permanen dan sementara.
 - Pemilihan tempat aman: keamanan struktur bangunan sekolah yang rusak perlu dikaji oleh para profesional yang berkualitas, dan bangunan diprioritaskan untuk dapat dipergunakan lagi, diperbaiki, diperkuat atau diganti, didasarkan pada kebutuhan dan biaya.
 - Desain dan konstruksi inklusif dan tahan bencana: perencanaan dan kode bangunan dengan standar internasional untuk sekolah (atau kode lokal jika standarnya lebih tinggi) harus diterapkan baik untuk konstruksi sementara maupun permanen. Fasilitas sekolah harus dirancang, dibangun dan dipelihara agar tahan dalam menghadapi bahaya dan ancaman setempat seperti kebakaran,

badai, gempa bumi dan tanah longsor. Upaya-upaya rekonstruksi harus memastikan bahwa pergi ke sekolah tidak akan mengekspos peserta didik, guru atau tenaga kependidikan lain terhadap berbagai risiko yang dapat dihindari, desain dan konstruksi harus memastikan pencahayaan yang cukup, ventilasi dan pemanasan (yang sesuai) silang untuk mempromosikan lingkungan belajar-mengajar berkualitas.

- Apakah struktur bangunan dapat dipelihara oleh otoritas lokal dan masyarakat setempat dengan biaya terjangkau: jika memungkinkan, bahan lokal dan tenaga kerja lokal harus digunakan untuk membangun struktur bangunan. Langkah-langkah harus diambil untuk memastikan struktur yang hemat biaya dan bagian fisik (seperti atap, lantai) tahan lama.
- Ketersediaan anggaran, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dan keterlibatan masyarakat, perencana dan manajer pendidikan.

Struktur bangunan mungkin bersifat sementara, semi permanen, permanen, merupakan perluasan atau bergerak. Keterlibatan anggota kelompok yang berbeda yang sama-sama terdampak bencana dalam kegiatan bersama, seperti konstruksi dan pemeliharaan sekolah, dapat mendukung mitigasi konflik (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 86; Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 136; Catatan Panduan tentang Konstruksi Sekolah yang Aman INEE - *INEE Guidance Notes on Safer School Construction*, tersedia dalam *Toolkit INEE: www.ineesite.org/*, dan standar-standar Sphere untuk Hunian, Permukiman dan Bantuan Non-Makanan).

3. **Orang berkebutuhan khusus:** Kebutuhan orang-orang berkebutuhan khusus fisik dan visual harus dipertimbangkan dengan cermat dalam desain fasilitas pendidikan. Pintu masuk dan keluar harus mengakomodasi orang-orang yang menggunakan kursi roda atau menggunakan alat bantu mobilitas lain. Ruang kelas dan perabotnya, serta fasilitas air dan sanitasi, harus memenuhi kebutuhan orang-orang berkebutuhan khusus. Ketika mengidentifikasi dan merekonstruksi

fasilitas pendidikan, dianjurkan agar bekerjasama dengan organisasi yang mewakili orang-orang dengan berbagai jenis ketidakmampuan, orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus dan pemuda berkebutuhan khusus baik di tingkat lokal maupun nasional.

4. **Desain dan pemeliharaan ruang belajar:** Fasilitas pendidikan harus dirancang secara cermat, dengan memikirkan bagaimana dan siapa yang akan menggunakan ruang belajar tersebut. Ruang harus sesuai dengan jenis kelamin, umur, kemampuan fisik dan pertimbangan budaya dari semua pengguna. Sebuah standar lokal yang realistis harus ditetapkan untuk ukuran kelas maksimum. Kecukupan ruang harus diperhitungkan, jika mungkin, untuk kelas tambahan apabila pendaftaran meningkat, yang memungkinkan pengurangan bertahap dalam penggunaan beberapa giliran masuk kelas belajar. Pintu masuk dan keluar harus memungkinkan siswa, guru dan tenaga kependidikan lain untuk melewatinya dengan aman dalam situasi darurat.

Struktur bangunan, termasuk fasilitas sanitasi, dan perabotan, termasuk meja, kursi, papan tulis, harus dipelihara secara teratur. Anggota masyarakat dan komite pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi pada pemeliharaan ruang belajar dengan tenaga, waktu atau bahan (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 126).

5. **Fasilitas sanitasi** harus tersedia di dalam atau dekat dengan lingkungan belajar. Kolaborasi dengan sektor air dan sanitasi sangat penting untuk mencapai hal ini. Sanitasi meliputi:
 - fasilitas pembuangan limbah padat, seperti tempat sampah dan sumur limbah;
 - fasilitas drainase, seperti sumur rendam dan saluran drainase;
 - air yang cukup untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan toilet.

Fasilitas sanitasi harus dapat dijangkau oleh mereka yang berkebutuhan khusus serta harus menjaga privasi, martabat dan keselamatan mereka. Pintu toilet harus dapat dikunci dari dalam. Untuk mencegah pelecehan

seksual, toilet untuk anak-anak laki-laki/lelaki dewasa dan anak-anak perempuan/wanita dewasa harus dipisahkan, di tempat yang aman dan nyaman serta mudah diakses. Panduan Sphere untuk toilet sekolah menyatakan bahwa satu toilet untuk setiap 30 anak perempuan dan satu toilet untuk setiap 60 anak laki-laki. Jika penyediaan toilet terpisah tidak memungkinkan, pengaturan dapat dibuat sedemikian rupa demi menghindari anak perempuan dan anak laki-laki menggunakan toilet pada saat bersamaan. Jika toilet tidak berada dalam lokasi belajar, fasilitas di dekatnya dapat diidentifikasi dan penggunaan oleh anak-anak dapat dipantau (lihat juga Standar Sphere pembuangan kotoran dalam bagian tentang Air Minum, Sanitasi dan Promosi Kebersihan).

Bahan sanitari dan pakaian yang sesuai dengan budaya, jika perlu, harus disediakan untuk pelajar perempuan sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam belajar.

6. **Air layak pakai dan promosi kebersihan:** Lingkungan belajar harus memiliki sumber air yang aman dan harus menyediakan sabun. Praktik kebersihan, seperti mencuci tangan dan wajah, harus dimasukkan sebagai aktivitas sehari-hari. Panduan Sphere untuk jumlah air minimum di sekolah menyatakan bahwa dibutuhkan tiga liter air per siswa per hari untuk minum dan mencuci tangan (lihat juga Standar Sphere pada pasokan air dalam bagian tentang Air Minum, Sanitasi dan Promosi Kebersihan).
7. **Layanan kesehatan dan gizi berbasis sekolah:** Program layanan kesehatan dan gizi berbasis sekolah menghubungkan pendidikan dengan sumber daya dalam sektor kesehatan, sektor gizi dan sektor sanitasi. Layanan ini mengatasi hambatan belajar dan mempromosikan pembangunan yang sehat. Program mungkin termasuk:
 - program pemberian makanan di sekolah untuk mengatasi kelaparan;
 - pengobatan terhadap infeksi parasit atau cacingan;
 - program pencegahan penyakit menular (seperti campak, diare, HIV dan AIDS);
 - Penyediaan suplemen mikronutrien (seperti zat besi, vitamin A, dan

yodium).

Program harus mengikuti panduan yang dikenal seperti panduan *World Food Programme (WFP)* untuk pemberian makanan di sekolah. Koordinasi dengan sektor kesehatan dan gizi adalah penting (lihat juga standar Sphere untuk Ketahanan Pangan dan Gizi).

8. **Akses ke layanan lokal dan rujukan:** Guru dan tenaga kependidikan lain dapat menggunakan rujukan ke layanan setempat untuk mendukung dan mempromosikan kesejahteraan fisik, psikososial dan emosional peserta didik. Mereka harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda tekanan fisik, tekanan psikososial dan masalah perlindungan lain, seperti anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka. Mereka harus berbagi informasi tentang ancaman terhadap kesejahteraan peserta didik dengan mitra yang relevan dari sektor pelayanan lain.

Untuk memastikan bahwa sistem rujukan beroperasi secara efektif, hubungan formal dengan pelayanan di luar harus dibentuk. Layanan dapat berupa pelayanan konseling, pelayanan psikososial dan pelayanan hukum bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, dan pelayanan sosial untuk kasus dugaan penganiayaan atau kelalaian. Anak-anak yang sebelumnya tergabung dalam angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata mungkin memerlukan bantuan pelacakan keluarga dan reunifikasi (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 80; Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 102-103; Belajar-Mengajar standar 2, Catatan panduan 2 pada halaman 106-107).



Untuk Perangkat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE

↳ Standar Minimum INEE

↳ Perangkat Penerapan

↳ Akses dan Lingkungan Belajar

3

DOMAIN TIGA: BELAJAR-MENGAJAR

**Standar Dasar:
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

Belajar-Mengajar

**Standar 1
Kurikulum**

Kurikulum yang relevan secara budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan konteks tertentu dan kebutuhan peserta didik.

**Standar 2
Pelatihan, Dukungan dan
Peningkatan Profesi**

Guru dan tenaga kependidikan lain menerima pelatihan yang relevan, terstruktur dan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

**Standar 3
Instruksi dan Proses
Belajar**

Instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatif dan inklusif.

**Standar 4
Penilaian Hasil
Pembelajaran**

Metode yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.

Akses kepada pendidikan hanya memiliki makna jika program-program pendidikan menawarkan belajar-mengajar yang berkualitas. Situasi darurat mungkin menawarkan kesempatan untuk memperbaiki kurikulum, pelatihan guru, dukungan dan pengembangan profesional, proses instruksi dan pembelajaran dan pengkajian hasil belajar sehingga pendidikan relevan, mendukung dan melindungi peserta didik. Keputusan penting mungkin perlu dibuat mengenai jenis kurikulum yang ditawarkan dan fokus prioritas belajar. Membangun pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah atau memperkecil risiko ancaman yang sekarang maupun masa mendatang, merupakan prioritas. Pendidikan tentang hak asasi manusia dan pendidikan untuk perdamaian dan kewarganegaraan demokratis harus ditekankan.

Pendidikan yang berkaitan dengan mata pencaharian dan pekerjaan, seperti pengembangan usaha kecil, melek akan finansial, dan pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis, harus disediakan untuk laki-laki muda dan perempuan muda, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Analisis pasar kerja dan kerja sama dengan sektor ekonomi dan sektor pemulihan awal akan memastikan dengan lebih baik bahwa program-program tetap relevan dan bahwa keahlian ekonomi yang dipelajari akan berguna.

Dalam situasi darurat, guru dan tenaga kependidikan yang kurang atau tidak terlatih sering mengisi kesenjangan sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari sebuah bencana atau krisis, perlu dilatih keterampilan untuk menyampaikan isi pembelajaran efektif bagi siswa. Guru dan tenaga kependidikan lain harus berpartisipasi dalam pelatihan khusus tentang cara mendukung anak-anak yang mengalami tekanan.

Dalam konteks situasi darurat sampai pemulihan, adalah penting bahwa otoritas nasional, lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan mengakui kurikulum dan sertifikat yang diberikan. Masyarakat ingin tahu bahwa pendidikan anak-anak mereka memiliki nilai dan otoritas nasional mengakui nilai tersebut. Pengkajian dan evaluasi proses belajar-mengajar yang sesuai dan tepat waktu:

- memberikan kredibilitas;
- menginformasikan praktik pengajaran;
- mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum dan peserta didik;
- menginformasikan tenaga kependidikan, anggota masyarakat dan peserta didik atas kemajuan yang telah dicapai dan kebutuhan lanjutan.

Belajar-Mengajar Standar 1: Kurikulum

Kurikulum yang relevan secara budaya, sosial dan bahasa digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan non-formal, sesuai dengan konteks tertentu dan kebutuhan peserta didik.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Otoritas pendidikan memimpin peninjauan, pengembangan atau adaptasi dari kurikulum formal, melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bahan pembantu sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan peserta didik (lihat Catatan Panduan 1-4).
- Kurikulum formal dan ujian yang digunakan dalam pendidikan pengungsi dan penyintas diakui oleh pemerintah asal dan pemerintah tuan rumah (lihat Catatan Panduan 3).
- Kurikulum formal dan non-formal mengajarkan pengurangan risiko bencana, pendidikan lingkungan dan pencegahan konflik (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bahan bacaan tambahan mengandung kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung, belajar awal, keterampilan hidup, kesehatan dan kebersihan (lihat Catatan Panduan 4-5).
- Kurikulum mencatatkan masalah kesejahteraan dan perlindungan kebutuhan psikososial peserta didik (lihat Catatan Panduan 6).
- Isi pelajaran, bahan dan instruksi disampaikan dalam bahasa dari peserta didik (lihat Catatan Panduan 7).
- Kurikulum, buku pelajaran dan bacaan tambahan sensitif gender, mengenali keragaman, mencegah diskriminasi dan mempromosikan rasa hormat terhadap semua peserta didik (lihat Catatan Panduan 8).
- Bahan belajar-mengajar diambil dari daerah setempat dan cukup serta disediakan secara tepat waktu (lihat Catatan Panduan 9).

Catatan Panduan

1. **Kurikulum** adalah rencana aksi untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kurikulum

berlaku untuk program pendidikan formal dan non-formal dan harus relevan serta dapat disesuaikan bagi semua peserta didik. Termasuk di dalamnya tujuan belajar, konten pembelajaran, penilaian, metode pengajaran dan bahan-bahan:

- ‘tujuan pembelajaran’ mengidentifikasi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang akan dikembangkan melalui kegiatan pendidikan untuk mempromosikan pengembangan kognitif, sosial, emosional dan fisik peserta didik;
- ‘isi pembelajaran’ mengacu pada bidang-bidang seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup;
- ‘penilaian’ mengacu pada pengukuran apa yang telah dipelajari dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk konten pembelajaran yang tercakup;
- ‘metode pengajaran’ mengacu pada pendekatan yang dipilih untuk, dan digunakan dalam, penyajian konten pembelajaran untuk mendorong serapan pengetahuan dan keterampilan semua peserta didik;
- ‘bahan ajar’ mengacu pada buku-buku, peta dan bagan, bahan-bahan ajar tambahan, panduan guru, peralatan, mainan dan bahan belajar-mengajar lain.

2. **Kurikulum sesuai dengan konteks, usia dan tingkat perkembangan:**

Kurikulum harus sesuai dengan usia dan cocok dengan tingkat perkembangan peserta didik, termasuk perkembangan sensorik, mental, kognitif, psikososial, dan fisik mereka. Umur dan tingkat perkembangan dapat sangat bervariasi dalam program pendidikan formal dan non-formal dalam konteks situasi darurat sampai pemulihan. Hal ini membutuhkan adaptasi kurikulum dan metode. Guru harus diberikan dukungan untuk menyesuaikan pengajaran mereka dengan kebutuhan serta tingkatan para peserta didik dengan siapa mereka bekerja (lihat juga Belajar-Mengajar standar 2 pada halaman 106-109).

3. **Tinjauan dan pengembangan kurikulum** adalah sebuah proses yang panjang dan kompleks, dan harus dilakukan oleh otoritas pendidikan yang dapat diterima dan tepat. Jika program pendidikan formal sedang didirikan kembali selama atau setelah situasi darurat, kurikulum sekolah

dasar dan menengah nasional harus digunakan. Dalam situasi di mana kurikulum tidak tersedia, kurikulum perlu dikembangkan atau disesuaikan dengan cepat. Dalam kasus pengungsi, kurikulum dapat mengacu pada kurikulum dari negara tuan rumah atau negara asal. Dalam kasus lain, kurikulum dapat diadaptasi dari situasi darurat yang mirip.

Dalam situasi pengungsian, idealnya kurikulum harus dapat diterima, baik di negara asal maupun negara tuan rumah, untuk memfasilitasi repatriasi secara sukarela. Hal ini membutuhkan koordinasi antar agensi dan substansial regional, dengan mempertimbangkan, misalnya, kompetensi bahasa dan pengakuan hasil pengujian untuk mendapatkan ijazah. Perspektif negara tuan rumah dan pengungsi serta hukum internasional harus menginformasikan keputusan ini (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 138).

Dalam situasi darurat sampai pemulihan, kurikulum program pendidikan formal dan non-formal harus diperkaya dengan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk konteks darurat (lihat Catatan Panduan 5 halaman 101).

Kurikulum khusus mungkin diperlukan bagi kelompok tertentu, seperti:

- anak yang bekerja dan remaja yang bekerja;
- mereka yang sebelumnya tergabung dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata;
- peserta didik dengan usia lebih tua dari tingkat kelas mereka atau kembali bersekolah setelah dalam jangka waktu lama keluar dari sekolah;
- peserta didik dewasa.

Perkembangan dan evaluasi kurikulum dan buku teks serta pengkajian secara periodik terhadap program pendidikan harus dipimpin oleh otoritas pendidikan yang relevan. Peserta didik, guru dan persatuan guru, juga masyarakat yang terkena dampak harus secara aktif terlibat. Panelis pengkaji buku pelajaran, termasuk perwakilan dari berbagai kelompok rentan dan etnis lain, dapat membantu untuk menghindari bias dan untuk membangun perdamaian di antara komunitas

yang berbeda. Mereka harus berhati-hati agar tidak memunculkan ketegangan dalam proses menghapus pesan-pesan yang dapat memecah-belah dari buku teks.

4. **Kompetensi dasar** harus diidentifikasi sebelum penyusunan atau adaptasi isi materi pembelajaran dan pelatihan guru. 'Kompetensi Dasar' pendidikan dasar terdiri atas:
 - melek baca dan berhitung;
 - pengetahuan utama, keterampilan hidup, sikap dan praktik yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan untuk berpartisipasi aktif dan bermakna sebagai anggota komunitas mereka.

Kompetensi dasar harus diperkuat melalui aplikasi praktis. Intervensi pengembangan usia dini harus tersedia bagi anak-anak yang sangat muda. Landasan yang kuat dikembangkan pada anak usia dini untuk membentuk penyerapan dan penguasaan kompetensi dasar.

5. **Isi dan konsep-konsep utama dari pembelajaran keterampilan hidup** harus sesuai dengan usia, gaya belajar yang berbeda, pengalaman dan lingkungan peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik ke arah hidup yang mandiri dan produktif. Isi dan konsep harus spesifik sesuai konteks dan mungkin mencakup:
 - promosi kesehatan dan kebersihan, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi serta HIV dan AIDS;
 - perlindungan anak dan dukungan psikososial;
 - pendidikan hak asasi manusia, pendidikan kewarganegaraan, perdamaian dan hukum kemanusiaan;
 - pengurangan risiko bencana dan keterampilan menyelamatkan jiwa, termasuk pendidikan tentang ranjau darat dan persenjataan yang belum meledak;
 - budaya, rekreasi, olahraga dan seni, termasuk musik, tari, drama dan seni visual;
 - pelatihan keterampilan mata pencaharian dan pelatihan kejuruan dan keterampilan teknis;
 - pengetahuan lingkungan dan adat lokal;

- keterampilan perlindungan yang berkaitan dengan risiko spesifik dan ancaman yang dihadapi oleh anak perempuan dan anak laki-laki.

Isi bahan belajar meletakkan dasar bagi mata pencaharian peserta didik di masa mendatang. Isi dari program pelatihan kejuruan harus mengacu pada kesempatan kerja yang ada dan harus mencakup praktik kerja seperti magang (lihat juga Standar *Jaringan Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar penciptaan lapangan kerja dan Standar Pengembangan Usaha).

Materi pendidikan mengenai resolusi konflik dan mengenai perdamaian serta metodologinya dapat meningkatkan pemahaman antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terkena dampak konflik. Materi ini dapat memberikan keterampilan komunikasi untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian. Penanganan yang hati-hati diperlukan dalam pelaksanaan inisiatif pendidikan perdamaian untuk memastikan bahwa masyarakat siap mengatasi isu-isu tertentu (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).

6. **Kebutuhan psikososial, hak dan perkembangan** peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain harus ditangani pada semua tahap situasi darurat sampai tahap pemulihan. Personil pendidikan perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda tertekan/stres para peserta didik. Mereka harus dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan tersebut, termasuk menggunakan mekanisme rujukan untuk memberikan dukungan tambahan. Harus ada pedoman yang jelas bagi guru, staf pendukung (pendidikan) dan anggota masyarakat pada penyediaan dukungan psikososial bagi anak-anak, di dalam maupun di luar kelas. Peserta didik yang mengalami tekanan/stres perlu mendapat pengajaran terstruktur, menggunakan metode disiplin yang positif dan masa belajar yang lebih pendek untuk membangun konsentrasi. Semua peserta didik dapat dilibatkan dalam kegiatan rekreasi dan pembelajaran kooperatif. Metode dan isi pengajaran yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri para peserta didik dan harapan untuk

masa depan mereka (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 8-9 pada halaman 85, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 92; dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 133-134).

Guru dan tenaga kependidikan lain, sering direkrut dari penduduk yang terkena bencana, dan mereka dapat menghadapi kesulitan yang sama dengan yang dialami oleh para peserta didik. Hal ini harus ditangani melalui pelatihan, pemantauan dan dukungan. Guru tidak bisa diharapkan untuk mengambil tanggung jawab yang dapat merugikan kesejahteraan psikososial mereka sendiri maupun peserta didik (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3, Catatan Panduan 6 pada halaman 128 dan Standar Sphere untuk kesehatan mental dan kesejahteraan psikososial dalam bagian Layanan Kesehatan).

7. **Bahasa** instruksi dapat menjadi isu perpecahan di negara-negara dengan multibahasa dan masyarakat yang majemuk. Untuk memperkecil marginalisasi, keputusan tentang bahasa instruksi harus dilakukan atas dasar konsensus, melibatkan masyarakat, otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan terkait lain. Guru harus bisa mengajar dalam bahasa yang dipahami oleh peserta didik dan bisa berkomunikasi dengan orang tua serta masyarakat luas. Pelajar tunarungu dan tunawicara harus diajarkan dengan menggunakan metode dan bahasa yang paling tepat untuk memastikan inklusi penuh. Tambahan kelas dan kegiatan, khususnya pada pendidikan anak usia dini, harus tersedia dalam bahasa dari peserta didik.

Dalam situasi pengungsian, negara-negara tuan rumah mungkin menganjurkan sekolah pengungsi untuk mengikuti standar mereka, termasuk penggunaan bahasa dan kurikulum. Penting untuk mengetahui hak-hak peserta didik pengungsi. Perlu dipertimbangkan juga kesempatan bagi mereka untuk meraih masa depan dan apa yang dibutuhkan mereka agar dapat melanjutkan pendidikan di masyarakat tuan rumah ataupun di masyarakat asal setelah situasi darurat. Dalam situasi masa pengungsian diperpanjang, kesempatan harus disediakan bagi para peserta didik untuk mempelajari bahasa masyarakat atau

negara tuan rumah. Hal ini memungkinkan mereka untuk berfungsi dalam masyarakat tuan rumah dan untuk terus mengakses pendidikan serta kesempatan (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 138).

8. **Keanekaragaman** harus dipertimbangkan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pada semua tahap situasi darurat hingga tahap pemulihan. Termasuk di dalamnya adakah para peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain dari berbagai latar belakang dan kelompok rentan serta dalam rangka mempromosikan toleransi dan respek. Aspek-aspek keanekaragaman mungkin termasuk:
- gender;
 - orang berkebutuhan khusus fisik dan mental;
 - kemampuan belajar;
 - para peserta didik dari berbagai kelompok ekonomi;
 - kelas yang berisi anak-anak dari berbagai usia;
 - budaya dan kebangsaan;
 - etnis dan agama.

Kurikulum, materi pembelajaran dan metode pengajaran harus menghilangkan bias dan memperkuat kesetaraan. Program tidak hanya berbicara tentang toleransi, namun juga ke arah perubahan sikap dan perilaku. Hal ini akan membuat pengenalan yang lebih baik dan menghormati hak orang lain. Pendidikan hak asasi manusia harus didukung melalui pendidikan formal maupun non-formal untuk mempromosikan keanekaragaman dalam cara-cara yang sesuai dan sensitif terhadap usia dan budaya. Isi materi bisa dikaitkan dengan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan juga dengan keterampilan hidup. Guru mungkin membutuhkan dukungan untuk memodifikasi bahan-bahan dan metode pengajaran yang ada jika buku teks dan bahan lain perlu direvisi (lihat juga Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 106-107 dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 138) .

9. **Materi belajar yang tersedia secara lokal** untuk peserta didik harus dikaji pada awal situasi darurat. Untuk pengunjung ataupun penyintas, ini termasuk bahan dari negara atau daerah asal. Jika diperlukan, bahan

harus diadaptasi atau dikembangkan dan tersedia dalam jumlah cukup untuk semua. Termasuk di dalamnya adalah bentuk yang dapat diakses untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Otoritas pendidikan yang relevan harus didukung untuk memantau penyimpanan, distribusi dan penggunaan bahan-bahan (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 126).

Belajar-Mengajar Standar 2: Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi

Guru dan tenaga kependidikan lain menerima Pelatihan, Dukungan dan Pengembangan Profesi yang relevan dan terstruktur secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Peluang pelatihan tersedia untuk guru dan tenaga kependidikan lain, laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan kebutuhan (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Pelatihan sesuai dengan konteks dan mencerminkan tujuan dan isi pembelajaran (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Pelatihan diakui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang relevan (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Pelatih yang berkualitas dapat melakukan kursus pelatihan untuk melengkapi pelatihan *in-service*, dukungan, bimbingan, pemantauan dan supervisi kelas (lihat Catatan Panduan 3-4).
- Melalui pelatihan dan dukungan yang terus-menerus, guru dapat menjadi fasilitator yang efektif dalam lingkungan belajar, menggunakan metode pengajaran partisipatoris dan menggunakan alat bantu pengajaran (lihat Catatan Panduan 3-6).
- Pelatihan meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk kurikulum formal dan non-formal, termasuk kesadaran akan berbagai bahaya, pengurangan risiko bencana dan pencegahan konflik (lihat Catatan Panduan 6).

Catatan Panduan

1. **'Guru'** mengacu pada instruktur, fasilitator atau animator dalam program pendidikan formal dan non-formal. Guru mungkin memiliki pengalaman dan pelatihan yang berbeda. Mereka mungkin adalah peserta didik yang lebih senior atau anggota masyarakat (lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan standar 1-3 pada halaman 120-128).
2. **Pengembangan kurikulum pelatihan formal dan isinya** merupakan tanggung jawab otoritas pendidikan. Kurikulum

dan isinya harus mencerminkan kebutuhan dan hak-hak peserta didik dan kebutuhan khusus tenaga kependidikan dalam konteks batasan anggaran dan waktu.

Materi pelatihan mungkin termasuk:

- subyek pengetahuan dasar, seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup sesuai dengan keadaan, termasuk pendidikan kesehatan;
- pedagogi dan metodologi pengajaran, termasuk disiplin positif dan manajemen kelas, pendekatan partisipatoris dan pendidikan inklusif;
- kode etik bagi guru dan tenaga kependidikan lain, termasuk hukuman bagi kekerasan berbasis gender terhadap peserta didik dan mekanisme pelaporan dan rujukan;
- prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana dan pencegahan konflik;
- pengembangan dan dukungan psikososial, termasuk kebutuhan untuk peserta didik dan guru juga ketersediaan layanan lokal serta sistem rujukan;
- prinsip dan perspektif hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan, untuk memahami makna dan maksud serta hubungan langsung dan tidak langsung dengan kebutuhan peserta didik dan tanggung jawab peserta didik, guru, masyarakat dan otoritas pendidikan;
- konten lain yang sesuai dengan keadaan.

Inisiatif pelatihan harus memasukkan cara bagaimana menangani isu-isu keanekaragaman dan diskriminasi. Misalnya, strategi mengajar yang sensitif-gender dapat mendorong para guru dari kedua jenis kelamin untuk memahami dan berkomitmen untuk kesetaraan gender di dalam kelas. Pelatihan tenaga kependidikan perempuan dan anggota masyarakat perempuan dapat memperkuat perubahan positif di kelas dan masyarakat luas (lihat juga Belajar-Mengajar standar 1 pada halaman 98-105, dan Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 2-3 dan 8 pada halaman 80-82 dan 85; Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 92, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3 pada halaman 126-128).

3. **Dukungan dan koordinasi pelatihan:** Bila memungkinkan, otoritas pendidikan harus memimpin dalam perancangan dan implementasi kegiatan pelatihan guru, formal dan non-formal. Ketika otoritas pendidikan tidak mampu untuk memimpin proses ini, komite koordinasi antar-lembaga dapat memberikan bimbingan dan koordinasi. Rencana pelatihan harus menyertakan pelatihan dalam masa pengabdian (*in-service training*) dan, jika perlu, revitalisasi lembaga pelatihan guru dan fasilitas pendidikan universitas. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam membangun kembali sektor pendidikan berkelanjutan (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 41-42 dan Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 3, Catatan Panduan 3-4 pada halaman 127-128).

Otoritas pendidikan nasional dan pemangku kepentingan terkait lain harus memulai sebuah dialog tentang kurikulum untuk pelatihan guru dalam masa pengabdian dan mekanisme pengakuannya pada awal masa tanggap darurat. Jika memungkinkan, pelatihan dalam masa pengabdian harus dirancang untuk memenuhi persyaratan nasional atas status guru yang berkualifikasi. Unsur-unsur tambahan yang relevan dengan situasi darurat, seperti pemenuhan kebutuhan psikososial, juga harus dimasukkan. Jika sistem sekolah untuk pengungsi terpisah dari sistem pendidikan setempat, layanan pelatihan dalam masa pengabdian guru pengungsi harus dibangun agar mereka diakui statusnya di negara asal atau di negara pemberi suaka.

Pelatih lokal harus diidentifikasi untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan yang tepat bagi para guru. Peningkatan kapasitas bagi keterampilan fasilitasi dan pelatihan mungkin diperlukan. Keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, baik pelatih maupun yang dilatih harus dipertimbangkan. Penguatan lembaga yang menyediakan layanan pelatihan guru dalam masa pengabdian atau sebelum masa pengabdian (*pre-service*) dapat dilakukan jika jumlah pelatih terbatas atau mereka tidak cukup terlatih. Upaya-upaya ini semestinya dikoordinasi oleh lembaga-lembaga nasional dan regional serta lembaga eksternal seperti badan-badan PBB dan LSM, termasuk:

- pengkajian terhadap kurikulum pelatihan guru dan buku teks;
 - materi yang memasukkan situasi terkini dan terkait situasi darurat;
 - pengalaman mengajar praktis, seperti menjabat sebagai asisten pengajar atau magang.
4. **Pengakuan dan akreditasi pelatihan:** Persetujuan dan akreditasi oleh otoritas pendidikan sangat penting untuk menjamin kualitas dan pengakuan atas pelatihan guru dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan. Untuk guru pengungsi, otoritas pendidikan di negara tuan rumah harus menentukan apakah pelatihan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat diterima oleh peserta didik dan guru (lihat juga Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 138).
 5. **Materi Belajar-Mengajar:** Guru harus dilatih tentang cara mengidentifikasi kebutuhan akan bahan ajar tertentu berdasarkan kurikulum. Mereka harus mempelajari cara membuat bahan ajar yang efektif dan tepat menggunakan materi lokal yang tersedia (lihat juga Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 104 dan Guru dan Tenaga Kependidikan Lain standar 3, Catatan Panduan 1 pada halaman 126).
 6. **Kesadaran akan bahaya, pengurangan risiko dan kesiapsiagaan:** Guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk membantu peserta didik dan masyarakat dalam mencegah serta mengurangi bencana di masa mendatang. Mereka mungkin membutuhkan dukungan untuk mengintegrasikan promosi pengurangan risiko dan pencegahan konflik dalam kegiatan belajar-mengajar. Termasuk di dalamnya adalah informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mencegah dan memberikan respons potensi bahaya dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat (lihat juga Analisis Standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50, Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 86; Akses Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 88-89, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 2 dan 6 pada halaman 134-138).

Belajar-Mengajar Standar 3: Instruksi dan Proses Belajar

Instruksi dan proses pembelajaran berpusat pada peserta didik, partisipatoris dan inklusif.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Metode pembelajaran sesuai dengan usia, tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kapasitas dan kebutuhan peserta didik (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Guru menunjukkan pemahaman tentang isi pelajaran dan keterampilan mengajar dalam interaksi mereka dengan peserta didik (lihat Catatan Panduan 1-3).
- Instruksi dan proses belajar mengatasi kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dengan mempertimbangkan inklusivitas dan mengurangi hambatan belajar (lihat Catatan Panduan 2).
- Orang tua peserta didik dan tokoh masyarakat memahami dan menerima isi bahan ajar dan metode pengajaran yang digunakan (lihat Catatan Panduan 3).

Catatan Panduan

1. **Keterlibatan aktif:** Keterlibatan aktif peserta didik adalah penting pada setiap tingkat perkembangan dan usia. Pengajaran harus interaktif dan partisipatoris, memastikan bahwa semua peserta didik terlibat dalam pelajaran. Hal ini dapat menggunakan metode belajar-mengajar yang sesuai dengan perkembangan pengajaran, yang melibatkan kelompok kerja, proyek kerja, pendidikan sebaya, bermain peran, bercerita atau menggambarkan peristiwa, permainan, video atau cerita. Berbagai metode ini harus dimasukkan ke dalam pelatihan guru, buku pelajaran sekolah dan program pelatihan. Kurikulum yang ada mungkin perlu disesuaikan untuk mengakomodasi pembelajaran aktif.

Anak-anak yang masih muda belajar melalui permainan. Pembelajaran mereka harus didasarkan pada permainan aktif dan interaksi. Permainan yang terarah dapat membangun keterampilan dan hubungan baik

dengan teman-teman dan guru. Orang tua dan wali murid harus didukung dalam memahami dan menerapkan:

- pentingnya menjadi responsif dan peka terhadap kebutuhan anak-anak;
- cara-cara untuk merawat anak-anak yang lebih muda;
- metode permainan yang secara aktif melibatkan anak-anak dalam proses belajar dan memajukan perkembangan mereka.

2. **Hambatan untuk belajar:** Guru harus didukung untuk berbicara dengan orang tua, anggota masyarakat, otoritas pendidikan dan para pemangku kepentingan terkait lain mengenai pentingnya kegiatan pendidikan formal dan non-formal dalam situasi darurat. Mereka dapat membahas masalah hak, keanekaragaman dan penyertaan serta pentingnya menjangkau anak-anak dan orang muda yang tidak mendapat kesempatan dalam kegiatan pendidikan. Diskusi ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang memahami dan mendukung penyertaan semua anak dan penyediaan bahan-bahan sumber daya dan fasilitas yang tepat. Di tingkat masyarakat, kelompok-kelompok seperti persatuan orang tua murid-guru, manajemen sekolah dan komite sekolah dapat pula dimobilisasi untuk membantu mengidentifikasi hambatan belajar dan mengembangkan rencana untuk mengatasinya (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 77).
3. **Metode pengajaran yang tepat:** Pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan harus menawarkan kesempatan bagi perubahan positif kepada guru dalam pendidikan formal. Metode pengajaran dapat diubah untuk lebih bisa beradaptasi dan disesuaikan dengan konteks dan mampu mengatasi hak, kebutuhan, usia, kebutuhan khusus dan kapasitas peserta didik. Namun, metode pengajaran yang lebih partisipatoris atau ramah-pelajar harus diperkenalkan dengan hati-hati. Penerapan metodologi baru, terutama pada tahap awal situasi darurat, mungkin dapat menimbulkan stres bahkan untuk guru berpengalaman sekalipun. Hal ini juga dapat mempengaruhi peserta didik, orang tua dan anggota masyarakat (lihat juga *Catatan Panduan pada Belajar-Mengajar INEE*, tersedia dalam *Toolkit*

INEE: www.ineesite.org/toolkit).

Perubahan harus diperkenalkan dengan persetujuan, koordinasi dan dukungan dari otoritas pendidikan. Sekolah dan masyarakat mungkin memerlukan waktu untuk memahami dan menerima perubahan tersebut. Penting untuk memastikan bahwa keprihatinan orang tua dan anggota masyarakat lain ditangani. Guru perlu terbiasa dengan materi baru dan dengan perubahan yang diharapkan, yang tercermin dalam kesadaran dan perilaku mereka.

Untuk intervensi pendidikan non-formal, pendekatan yang berpusat pada peserta didik dapat diperkenalkan melalui pelatihan dan dukungan berkelanjutan dari relawan, animator, fasilitator dan wali murid. Metodologi harus sesuai dengan kurikulum, dipusatkan pada kompetensi inti dari pendidikan dasar termasuk melek huruf, berhitung dan kecakapan hidup yang relevan dengan keadaan situasi darurat (lihat Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 101).

Belajar-Mengajar Standar 4: Penilaian Hasil Pembelajaran

Metode yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Informasi metode pengajaran melalui pengkajian dan evaluasi berkelanjutan terhadap kemajuan peserta didik dalam menuju sasaran yang ditetapkan (lihat Catatan Panduan 1).
- Prestasi pelajar diakui dan kredit atau dokumen penyelesaian kursus disediakan secara tepat (lihat Catatan Panduan 2).
- Lulusan program teknis dan kejuruan dikaji untuk mengukur kualitas dan relevansi program terhadap lingkungan yang berubah (lihat Catatan Panduan 2).
- Penilaian dan metode evaluasi dianggap wajar, dapat diandalkan dan tidak mengancam peserta didik (lihat Catatan Panduan 3).
- Pengkajian relevan dengan kebutuhan masa depan pendidikan dan kebutuhan ekonomi peserta didik (lihat Catatan Panduan 4).

Catatan Panduan

1. **Metode dan langkah-langkah pengkajian dan evaluasi yang efektif** harus diperkenalkan dan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - relevansi: tes dan ujian sesuai dengan konteks pembelajaran dan usia peserta didik (lihat juga Catatan Panduan 4 halaman 114);
 - konsistensi: metode evaluasi diketahui dan diterapkan dalam cara yang sama di semua lokasi dan oleh semua guru;
 - peluang: kesempatan lain untuk penilaian ditawarkan kepada peserta didik yang tidak hadir;
 - waktu: penilaian dilakukan selama dan pada akhir instruksi;
 - frekuensi: dapat dipengaruhi oleh situasi darurat;
 - pengaturan yang aman dan tepat: penilaian formal dilakukan di tempat yang aman oleh tenaga kependidikan;
 - transparansi: hasil penilaian dibagi dan dibahas dengan peserta didik dan, dalam kasus anak-anak, orang tua mereka. Di mana memungkinkan, pengujian eksternal disediakan untuk tahap-tahap penting penilaian;

- akomodasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus: alokasi waktu yang lebih lama, keterampilan dan pemahaman ditunjukkan melalui alternatif yang sesuai (lihat juga *Buku Saku Panduan Belajar bagi Penyandang Cacat*, tersedia dalam *Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit*).
2. **Hasil Penilaian:** Dalam program pendidikan formal, penilaian dilakukan sehingga prestasi peserta didik dan hasil pemeriksaan dapat diakui oleh otoritas pendidikan. Untuk pengungsi, berbagai upaya harus dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari otoritas pendidikan di negara atau daerah asal. Untuk pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan, penyedia layanan pelatihan harus memastikan kepatuhan dengan standar sertifikasi nasional. Dokumen yang diberikan setelah menyelesaikan kursus mungkin termasuk diploma dan sertifikat kelulusan.
 3. **Kode Etik Penilaian:** Penilaian dan evaluasi harus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kode etik. Ini berarti mereka harus adil, dapat diandalkan dan dilakukan dengan cara yang tidak meningkatkan atau menyebabkan tekanan. Peserta didik tidak boleh dilecehkan dengan imbalan nilai bagus atau promosi dalam suatu sekolah atau program. Untuk membantu memastikan bahwa kondisi ini terpenuhi, pemantauan, termasuk pemeriksaan di tempat oleh pengawas dan anggota masyarakat, dapat bermanfaat (lihat juga *Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 4 dan 9 pada halaman 82-83 dan 85-86*).
 4. **Relevansi:** Isi dari penilaian dan proses yang digunakan harus terkait langsung dengan materi yang telah diajarkan. Tujuan belajar dan tolok ukur harus diidentifikasi dari kurikulum. Bila mungkin, penilaian harus disesuaikan untuk mencerminkan bahan ajar dan bukannya kurikulum standar, sehingga mencerminkan pembelajaran yang aktual dan bukan kesenjangan dalam mengajar.

Guru dan tenaga kependidikan lain harus menggunakan metode dan alat penilaian yang sesuai dan mudah digunakan. Bimbingan dan pelatihan dalam penggunaan alat penilaian akan meningkatkan

efektivitas. Anggota masyarakat dapat membantu dalam melakukan penilaian kemajuan belajar dan efektivitas pengajaran. Hal ini mungkin sangat bermanfaat dalam kelas besar atau kelas di mana terdapat beberapa tingkatan peserta didik dalam satu kelas, atau ketika pelajar perlu perhatian yang lebih secara individual.

T

Untuk Perangkat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE

- ↳ Standar Minimum INEE
- ↳ Perangkat Penerapan
- ↳ Belajar-Mengajar

Toolkit INEE

- ↳ Catatan Panduan untuk Belajar-Mengajar
- ↳ Paket Sumber Daya untuk Belajar-Mengajar

4

DOMAIN EMPAT:

GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN LAIN

**Standar dasar:
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

Guru dan Tenaga Kependidikan Lain

**Standar 1
Perekrutan dan
Seleksi**

Guru dan tenaga kependidikan lain direkrut dalam jumlah yang cukup dan tepat melalui proses partisipatoris dan transparan, berdasarkan keragaman seleksi dan ekuitas.

**Standar 2
Kondisi Kerja**

Guru dan tenaga kependidikan lain diberikan kondisi kerja dan kompensasi yang layak.

**Standar 3
Dukungan dan
Pengawasan**

Mekanisme dukungan dan pengawasan untuk guru dan tenaga kependidikan lain yang tepat.

Guru dan tenaga kependidikan lain menyediakan kebutuhan pendidikan anak dan pemuda dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan. Status profesional mereka mungkin berbeda, mulai dari pegawai negeri dengan gelar akademik sampai relawan atau pendidik berbasis masyarakat dengan pendidikan formal yang minim. Istilah guru dan tenaga kependidikan lain meliputi:

- guru kelas dan asisten guru kelas;
- guru-guru pra-sekolah atau pendidikan anak usia dini;
- pendidik bagi orang berkebutuhan khusus;
- pelatih untuk mata pelajaran khusus dan pendidikan kejuruan;
- fasilitator bagi ruang ramah-anak;
- relawan komunitas, pemuka agama dan instruktur keterampilan hidup;
- kepala guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan pejabat pendidikan lain.

Peran dan tanggung jawab guru dan tenaga kependidikan lain tergantung pada jenis pendidikan (formal atau non-formal) dan jenis lingkungan belajar. Partisipasi guru dan tenaga kependidikan lain dalam pengambilan keputusan dan pengembangan profesi mereka adalah komponen penting dalam desain proyek pendidikan situasi darurat.

Identifikasi, perekrutan serta seleksi guru dan tenaga kependidikan lain harus non-diskriminatif, partisipatoris dan transparan. Diperlukan keseimbangan gender dan keterwakilan masyarakat. Guru dan tenaga kependidikan lain harus memiliki pengalaman dan keterampilan yang relevan dan harus mendapat kompensasi yang sesuai. Mereka harus mempunyai kebebasan untuk bergabung atau membentuk serikat pekerja. Kode etik, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengawasan, kondisi kerja, pengaturan kontrak, kompensasi dan hak kerja berkembang dengan baik jika dikonsultasikan dengan masyarakat yang terkena dampak.

Dalam situasi krisis, guru dan tenaga kependidikan lain memerlukan dukungan untuk menghadapinya, membangun kembali dan menyembuhkannya. Pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan memperkuat ketahanan dengan menyediakan pengetahuan bertahan hidup bagi anak-anak, pemuda dan masyarakat, kesempatan

belajar dan dukungan sosial untuk menuju masa depan yang lebih positif. Guru dan tenaga kependidikan lain merupakan kontributor penting untuk pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan. Mereka juga memiliki hak untuk mendukung dan membimbing diri sendiri.

Guru dan Tenaga Kependidikan Lain Standar 1: Perekrutan dan Seleksi

Jumlah guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan lain yang sesuai direkrut melalui proses partisipatoris dan transparan, berdasarkan kriteria seleksi yang mencerminkan keanekaragaman dan kesetaraan.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Sebelum proses perekrutan, deskripsi dan pedoman pekerjaan dikembangkan secara jelas, tepat, non-diskriminatif (lihat Catatan Panduan 1).
- Suatu komite seleksi memilih guru dan tenaga kependidikan lain berdasarkan kriteria yang transparan dan penilaian kompetensi, dengan mempertimbangkan penerimaan masyarakat, gender dan keanekaragaman (lihat Catatan Panduan 2-4).
- Jumlah guru dan tenaga kependidikan lain yang direkrut dan dikerahkan cukup untuk menghindari kelas yang terlalu besar (lihat Catatan Panduan 5).

Catatan Panduan

1. **Deskripsi pekerjaan** tidak diskriminatif atas dasar gender, etnis, agama, kebutuhan khusus atau keanekaragaman. Mencakup sekurang-kurangnya:
 - peran dan tanggung jawab;
 - jalur pelaporan yang jelas;
 - kode etik.(Lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 123).
2. **Pengalaman dan kualifikasi:** Penting untuk merekrut guru berkualitas dengan surat penugasan yang diakui. Mereka membutuhkan keterampilan untuk memberikan dukungan psikososial bagi peserta didik dan untuk mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Jika guru berkualitas tidak lagi memiliki sertifikat atau dokumen lain karena situasi darurat, keterampilan mengajar mereka harus dikaji. Jika guru yang berkualitas tidak cukup tersedia, yang sedikit atau tidak memiliki

pengalaman mengajar mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Pelatihan akan diperlukan bagi guru-guru ini, berdasarkan penilaian terhadap tingkat pendidikan dan pengalaman mengajar mereka.

Bila memungkinkan, guru yang dapat berbicara dengan bahasa ibu peserta didik harus direkrut. Jika diperlukan dan sesuai, dianjurkan untuk diberikan kursus bahasa negara tuan rumah secara intensif (lihat juga Belajar-Mengajar Standar 1, Catatan Panduan 7 pada halaman 103).

Dalam beberapa situasi, mungkin perlu untuk bekerja secara proaktif terhadap keseimbangan gender dalam perekrutan guru dan tenaga kependidikan lain. Termasuk penyesuaian kriteria perekrutan yang dikonsultasikan dengan panitia seleksi. Usia minimum untuk guru dan tenaga kependidikan lain adalah 18 tahun, sesuai dengan instrumen hukum dan peraturan perburuhan internasional dan hak asasi manusia. Mungkin sesekali perlu merekrut orang muda sebagai fasilitator, asisten atau pembimbing.

3. **Kriteria pemilihan guru** mungkin termasuk yang berikut:

Atribut dan kualifikasi profesional:

- latar belakang akademik;
- pengalaman mengajar, termasuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus;
- kepekaan terhadap kebutuhan psikososial anak dan pemuda;
- pengalaman dan keterampilan dalam perdagangan atau keterampilan teknis lain;
- kemampuan bahasa yang relevan, yang mungkin termasuk pengetahuan bahasa isyarat lokal dan huruf Braille.

Kualifikasi personal:

- usia dan gender, selalu ingat untuk menjaga keseimbangan gender;
- toleransi;
- latar belakang etnis dan agama;
- keanekaragaman yang mencerminkan kondisi masyarakat. Penting untuk mempertimbangkan ketegangan sosial yang mendasari dan ketidaksetaraan yang berlangsung lama, yang dapat berpengaruh pada proses perekrutan (lihat juga Belajar-Mengajar standar 1,

Catatan Panduan 8 pada halaman 104).

Kualifikasi lainnya:

Guru dan tenaga kependidikan lain harus berinteraksi dengan masyarakat dan dapat diterima oleh mereka. Mereka harus dipilih, jika memungkinkan, terutama dari masyarakat yang terdampak karena pemahaman mereka tentang berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik lokal yang dihadapi. Jika guru dan tenaga kependidikan lain diambil dari luar, perlu untuk mempertimbangkan kompensasi tambahan seperti transportasi dan akomodasi. Jika tempat belajar ditetapkan untuk pengungsi atau penyintas, mempekerjakan guru yang memenuhi syarat dan tenaga kependidikan lain dari masyarakat setempat dapat membantu dalam membina hubungan baik (lihat juga *Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru*, tersedia dalam *Toolkit INEE*: www.ineesite.org/toolkit).

4. **Referensi:** Bila memungkinkan, referensi untuk semua guru dan tenaga kependidikan lain yang direkrut harus diperiksa agar memastikan bahwa peserta didik tidak mendapatkan risiko karenanya.
5. **Ukuran Kelas:** Penting untuk mengatur batas realistis ukuran kelas yang ditentukan secara lokal, yang memungkinkan masuknya semua anak dan pemuda, termasuk yang berkebutuhan khusus. Jumlah guru yang direkrut harus cukup untuk menjamin rasio guru-murid yang sesuai. Pemangku kepentingan harus mempertimbangkan instruksi standar nasional dan lokal yang relevan untuk rasio guru-murid. Dalam beberapa kasus, organisasi kemanusiaan mungkin memiliki standar mereka sendiri atas rasio guru-murid. Dalam beberapa kasus, direkomendasikan rasio 1 sampai 40. Namun, para pemangku kepentingan didorong untuk meninjau dan menentukan apa yang tepat dan realistis secara lokal (lihat juga Pendahuluan pada halaman 18-20 untuk contoh Kontekstualisasi Standar Minimum dan Standar Belajar-Mengajar pada halaman 94-115).

Guru dan Tenaga Kependidikan Lain Standar 2: Kondisi Kerja

Guru dan tenaga kependidikan lain sudah memahami kondisi kerja dan mendapat kompensasi yang tepat.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Sistem kompensasi dan kondisi kerja terkoordinasi antara semua pemangku kepentingan terkait (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Kompensasi dan kondisi kerja dijelaskan dalam kontrak, dan kompensasi diberikan secara teratur (lihat Catatan Panduan 2).
- Guru dan tenaga kependidikan lain diizinkan berhimpun untuk menegosiasikan syarat dan kondisi.
- Suatu kode etik, berisi petunjuk pelaksanaan yang jelas, ada dan dihormati (lihat Catatan Panduan 3).

Catatan Panduan

1. **Kondisi kerja:** Deskripsi kerja, deskripsi kondisi kerja dan kode etik harus dimasukkan dalam kontrak. Hal ini membantu untuk memprofesionalisasikan peran guru dalam lingkungan belajar dan masyarakat. Di dalamnya termasuk mendefinisikan layanan yang diharapkan dari para guru sebagai timbal-balik atas kompensasi dari masyarakat, otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan lain, dan menyediakan kerangka kerja bagi perilaku guru yang tepat sesuai harapan.

Kontrak harus menetapkan:

- tugas dan tanggung jawab pekerjaan;
- kompensasi;
- syarat kehadiran;
- jam dan hari kerja;
- panjang (masa berlaku) kontrak;
- kode etik;
- dukungan, pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa (Lihat juga Guru dan Tenaga Kependidikan lain standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 120).

2. **Kompensasi:** Kompensasi yang memadai memungkinkan guru dan

tenaga kependidikan lain untuk fokus pada pekerjaan profesional mereka tanpa harus mencari sumber tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila diperlukan, sistem pembayaran yang sesuai untuk guru dan tenaga kependidikan lain harus ditata kembali atau dibuat sesegera mungkin. Sistem pembayaran harus menyatakan bahwa otoritas pendidikan memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kompensasi. Koordinasi antar pemangku kepentingan yang relevan, termasuk otoritas pendidikan, serikat pekerja, anggota masyarakat, komite dan asosiasi, badan-badan PBB dan LSM, meletakkan dasar untuk kebijakan dan praktik kompensasi yang berkelanjutan, dan membantu dalam transisi dari tahap pemulihan sampai tahap pembangunan.

Kompensasi dapat berbentuk moneter maupun non-moneter. Sistem ini harus adil dan berkelanjutan. Setelah diimplementasikan, kebijakan kompensasi menjadi preseden bahwa guru dan tenaga kependidikan lain akan dipertahankan. Dalam situasi pengungsian, guru yang berkualitas dan tenaga kependidikan lain mungkin lebih cenderung bergerak di mana ada upah yang lebih tinggi, bahkan jika itu berarti melintasi perbatasan. Penting untuk memperhitungkan kekuatan pasar seperti:

- biaya hidup;
- permintaan untuk guru dan profesional lain;
- tingkat upah pada kualifikasi profesi serupa, seperti perawatan kesehatan;
- ketersediaan guru dan tenaga kependidikan lain yang berkualitas.

(Lihat juga *Jaringan Minimum Standar untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Pekerjaan).

Kompensasi tergantung pada kondisi kerja dan kode etik. Konflik kepentingan harus dihindari, termasuk situasi di mana guru mungkin memungut biaya secara pribadi dari siswa untuk pengajaran atau mengajar privat (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 2 pada halaman 42-43 dan *Catatan Panduan INEE tentang Kompensasi Guru*, tersedia dalam *Toolkit INEE*: www.ineesite.org/toolkit).

3. **Suatu kode etik** yang jelas menetapkan standar perilaku untuk guru dan tenaga kependidikan lain. Standar-standar ini berlaku di lingkungan belajar dan selama acara dan kegiatan pendidikan. Kode etik menentukan konsekuensi wajib bagi orang-orang yang tidak mematuhi. Hal ini mencakup komitmen bahwa guru dan tenaga kependidikan lain akan:

- menghormati, melindungi dan, dalam kemampuan mereka, memenuhi hak-hak pendidikan peserta didik;
- mempertahankan standar yang tinggi atas sikap dan etika perilaku;
- aktif menghilangkan berbagai hambatan bagi pendidikan untuk memastikan lingkungan non-diskriminatif di mana semua peserta didik diterima;
- mempertahankan lingkungan yang melindungi, sehat, dan inklusif, bebas dari pelecehan seksual dan pelecehan lainnya, bebas dari eksploitasi terhadap peserta didik dengan meminta imbal balik berupa tenaga kerja ataupun imbal balik layanan seksual, bebas dari intimidasi, perlakuan yang tidak pantas, kekerasan dan diskriminasi;
- tidak mengajarkan atau mendorong pengetahuan atau tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip non-diskriminasi;
- menjamin kehadiran yang teratur dan tepat waktu.

(Lihat juga contoh kode etik dalam *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit; Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 4 dan 9 pada halaman 82-83 dan 85-86, dan Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya standar 3, Catatan Panduan 4 pada halaman 127).

Guru dan Tenaga Kependidikan Lain Standar 3: Dukungan dan Pengawasan

Dukungan dan mekanisme pengawasan untuk guru dan tenaga kependidikan lain berfungsi secara efektif.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Materi belajar-mengajar yang memadai dan tersedianya ruang (lihat Catatan Panduan 1).
- Guru dan tenaga kependidikan lain dilibatkan dalam pengembangan profesional, yang memberikan kontribusi terhadap dukungan dan motivasi mereka (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Suatu mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel disiapkan untuk pengkajian, pemantauan dan dukungan yang teratur bagi para guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Penilaian kinerja untuk guru dan tenaga kependidikan lain dilakukan, didokumentasikan dan didiskusikan secara teratur (lihat Catatan Panduan 4).
- Siswa secara teratur memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang kinerja guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 5).
- Dukungan psikososial yang tepat, dapat diakses dan praktis tersedia bagi guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 6).

Catatan Panduan

1. **Materi dan ruang belajar-mengajar** harus memadai sehingga memungkinkan guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mengajar dan bekerja secara efektif (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 3 pada halaman 87-92; Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 104-105, dan Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 109).
2. **Dukungan dan mekanisme pengawasan:** Manajemen, pengawasan dan akuntabilitas yang efektif sangat penting untuk memberikan dukungan profesional dan menjaga motivasi guru dan kualitas

pengajaran. Sistem harus dikembangkan sejauh mungkin di bawah kepemimpinan otoritas pendidikan yang relevan dan dengan partisipasi serikat pendidikan, anggota masyarakat, komite dan asosiasi masyarakat, badan-badan PBB dan LSM. Bimbingan dan dukungan rekan sejawat dapat memotivasi guru dan tenaga kependidikan lain dengan membantu mereka untuk menetapkan tujuan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja mereka (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 1-5 pada halaman 29-36; Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 108-109, dan Rekomendasi UNESCO / ILO tentang Status Guru (1966)).

3. **Peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengembangan profesional:** Sangat penting untuk berkonsultasi dengan guru dan tenaga kependidikan lain tentang motivasi, insentif, kebutuhan dan prioritas mereka untuk peningkatan kapasitas. Hal ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan sebelum masa pengabdian (*pre-service*) dan kebutuhan dalam masa pengabdian (*in-service*) serta peluang untuk pengembangan profesional. Peningkatan kapasitas, pelatihan dan pengembangan profesional harus disediakan dalam cara yang tidak diskriminatif (lihat juga Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 108-109).
4. **Penilaian Kinerja:** Penilaian kinerja yang dilakukan dengan benar mendukung kinerja yang baik. Penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas guru dan tenaga kependidikan lain juga mencakup diskusi dengan masing-masing individu untuk mengidentifikasi isu dan menyetujui tindak lanjut kegiatan.

Proses penilaian kinerja bisa meliputi:

- mengembangkan kriteria untuk mendukung observasi dan evaluasi kelas;
- memberikan umpan balik;
- menetapkan tujuan dan target untuk mengukur pertumbuhan dan kemajuan.

(Lihat juga Catatan Panduan 5 di bawah ini dan Guru dan Tenaga

Kependidikan lain standar 2, Catatan Panduan 3 pada halaman 125).

5. **Partisipasi Peserta Didik:** Melibatkan peserta didik dalam proses penilaian dan evaluasi sangatlah penting. Partisipasi peserta didik membantu dalam memahami semua aspek dari lingkungan belajar dan dalam menjamin kualitas. Peserta didik secara berkala dapat memberikan umpan balik kepada pihak netral sebagai bagian dari proses penilaian kinerja. Topik dapat mencakup kinerja pengajaran, perilaku, kekhawatiran tentang lingkungan pengajaran dan isu-isu perlindungan.
6. **Dukungan psikososial dan kesejahteraan:** Bahkan guru dan tenaga kependidikan lain yang terlatih dan berpengalaman sekalipun dapat kewalahan dalam situasi krisis. Mereka menghadapi tantangan dan tanggung jawab baru dan mungkin mengalami tekanan/ stres. Kemampuan mereka untuk mengatasi dan menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik tergantung pada kesejahteraan mereka serta ketersediaan dukungan (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 8-9 pada halaman 85-86, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 8 pada halaman 92, dan Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 102-103).



Untuk Perangkat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi *Toolkit INEE*: www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE

- ↳ Standar Minimum INEE
- ↳ Perangkat Penerapan
- ↳ Guru dan Tenaga Kependidikan Lain

5

DOMAIN LIMA: KEBIJAKAN PENDIDIKAN

**Standar Dasar:
Partisipasi Masyarakat, Koordinasi, Analisis**

Kebijakan Pendidikan

**Standar 1
Hukum dan
Perumusan Kebijakan**

Otoritas pendidikan memprioritaskan kontinuitas dan pemulihan kualitas pendidikan, termasuk akses bebas dan inklusif ke sekolah.

**Standar 2
Perencanaan dan
Pelaksanaan**

Kegiatan Pendidikan mempertimbangkan kebijakan pendidikan, hukum, standar, rencana nasional dan internasional, serta kebutuhan belajar dari populasi yang terkena dampak.

Instrumen dan deklarasi hukum internasional menyatakan bahwa mendapatkan pendidikan adalah hak semua individu. Dan menjadi tugas otoritas nasional dan masyarakat internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak ini. Hak untuk kebebasan berekspresi, non-diskriminasi dan untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan sosial dan kebijakan pendidikan merupakan bagian integral dari hak untuk pendidikan.

Dalam situasi tanggap darurat sampai tahap pemulihan, adalah penting bahwa hak-hak tersebut dilindungi. Untuk mendukung hal ini, otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan lain harus mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan situasi darurat. Rencana ini harus:

- mempertimbangkan kebijakan dan standar pendidikan nasional dan internasional;
- menunjukkan komitmen atas hak untuk pendidikan;
- menunjukkan tanggapan atau responsivitas terhadap kebutuhan belajar dan hak-hak orang yang terkena dampak krisis;
- mencakup langkah-langkah untuk memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi semua orang;
- menunjukkan dengan jelas hubungan antara kesiapsiagaan situasi darurat, tanggap darurat dan pembangunan jangka panjang.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi, pelaksanaan program dan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

Untuk memastikan promosi kesetaraan gender dan menghargai perbedaan, kebijakan pendidikan darurat dan program, sepenuhnya harus memasukkan ketentuan-ketentuan Konvensi tentang Hak-hak Anak dan mencerminkan Pendidikan untuk Semua serta kerangka kerja *Millenium Development Goals*. Instrumen-instrumen tersebut mendukung dan mempromosikan hukum serta kebijakan pendidikan yang melindungi terhadap segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan, termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, etnis, bahasa dan kebutuhan khusus.

Kebijakan Pendidikan Standar 1: Perumusan Hukum dan Kebijakan

Otoritas pendidikan memprioritaskan keberlanjutan dan pemulihan pendidikan yang berkualitas, termasuk akses yang bebas dan inklusif untuk bersekolah.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Undang-undang, peraturan, dan kebijakan pendidikan nasional menjunjung status yang dilindungi oleh hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia atas fasilitas pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan lain (lihat Catatan Panduan 1).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan pendidikan nasional menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan dan menjamin keberlangsungan pendidikan (lihat Catatan Panduan 1-2).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan memastikan bahwa setiap fasilitas pendidikan yang dibangun kembali atau diganti adalah aman (lihat Catatan Panduan 2-3).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan didasarkan pada analisis konteks yang dikembangkan melalui proses partisipatoris dan inklusif (lihat Catatan Panduan 4).
- Kebijakan pendidikan nasional didukung dengan rencana tindakan, hukum dan anggaran yang memungkinkan respons yang cepat untuk situasi darurat (lihat Catatan Panduan 5-6).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan memperbolehkan sekolah untuk pengungsi menggunakan kurikulum dan bahasa negara atau daerah asal (lihat Catatan Panduan 7).
- Undang-undang, peraturan dan kebijakan memungkinkan pelaku organisasi non-pemerintah (ornop), seperti LSM dan badan-badan PBB, untuk mendirikan pendidikan dalam program darurat (lihat Catatan Panduan 8).

Catatan Panduan

1. **Tugas otoritas nasional adalah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan** sesuai dengan instrumen hak asasi manusia internasional (lihat Pendahuluan di halaman 2).

Instrumen-instrumen hak asasi manusia ini juga mencakup aturan internasional tentang penanganan populasi, dengan penekanan pada anak-anak dan pemuda. Bidang-bidang yang ditangani meliputi gizi, rekreasi, budaya, pencegahan kekerasan, dan pendidikan anak usia dini untuk anak-anak berusia di bawah enam tahun. Konvensi Hak Anak sangat penting karena mencakup hak anak-anak atas pendidikan dan hak-hak mereka dalam proses pendidikan, seperti hak untuk diajak berkonsultasi terhadap keputusan yang memengaruhi mereka, hak untuk diperlakukan dengan hormat dan hak untuk tahu tentang hak-hak mereka (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 5 pada halaman 33-35, Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 72-75, dan Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 5-6 pada halaman 101-103).

Peserta didik, guru dan tenaga kependidikan memiliki status sipil, seperti halnya bangunan pendidikan. Mereka dilindungi dari serangan bersenjata di bawah Konvensi Jenewa, yang merupakan bagian dari hukum kemanusiaan internasional yang diakui oleh setiap negara. Otoritas nasional dan pemangku kepentingan internasional harus mendukung usaha-usaha untuk membangun status perlindungan ini ke dalam hukum dan praktik nasional, serta mencegah penggunaan fasilitas pendidikan untuk tujuan militer.

Saat kekerasan mengancam kelangsungan pendidikan dan perlindungan anak, advokasi untuk mempromosikan pendidikan, hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan yang relevan dengan pendidikan merupakan prioritas. Pemantauan serta pelaporan serangan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan dan fasilitas atau pendudukan atas fasilitas pendidikan sangat penting. Hal ini menghormati martabat korban dan mengarah kepada respons, penyelidikan dan penuntutan yang terkoordinasi (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 1, 3-4 dan 6-7 pada halaman 79-85).

2. **Hukum dan kebijakan pendidikan nasional harus menjamin keberlanjutan pendidikan** untuk semua. Rencana kontigensi nasional

maupun sekolah lokal harus mencakup bahaya yang dikenal, diprediksi dan kemunculannya berulang. Ini termasuk bencana skala kecil, seperti banjir, yang menyebabkan dampak negatif kumulatif pada pendidikan. Kebutuhan khusus bagi anak-anak dan pemuda yang rentan harus dimasukkan. Di negara-negara di mana tidak ada hukum atau aturan situasi darurat untuk pendidikan, situasi darurat ini dapat memberikan kesempatan bagi negara bersangkutan untuk menyusunnya (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50, Akses dan Lingkungan Belajar standar 2, Catatan Panduan 11 di halaman 86, dan Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 109).

Pelayanan pendidikan anak usia dini untuk anak-anak di bawah usia sekolah dan bagi orang tua atau wali harus disertakan dalam program dan kebijakan pendidikan. Layanan dapat termasuk:

- perawatan usia dini dan kelompok pengasuhan;
- kelompok bermain;
- dimasukkannya anak-anak usia muda dalam kegiatan ruang yang aman;
- layanan yang terkait dengan kesehatan, nutrisi dan berbagai layanan lainnya.

Di negara-negara yang memiliki kebijakan nasional tentang pemuda, situasi darurat memberikan kesempatan untuk memperkuat kerja lintas-sektoral yang berfokus pada pendidikan pemuda. Di negara-negara yang tidak memiliki kebijakan nasional tentang pemuda, para pemangku kepentingan yang relevan harus menentukan *focal point* untuk masalah pemuda di masa krisis. Di negara tersebut harus ada kerja sama yang merupakan kebijakan lintas-sektoral, dan perencanaan dan pelaksanaan program yang mempertimbangkan masalah kepemudaan. Jika kebijakan nasional tentang pemuda dikembangkan, maka harus didasarkan pada analisis dari beragam kepentingan dan pengaruh antara sub-kelompok pemuda serta peluang dan risiko berbagai bentuk partisipasi pemuda. Kebijakan nasional tentang pemuda melengkapi kerangka kerja nasional tentang:

- pendidikan;
- pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan;

- Kesiapsiagaan terhadap situasi darurat.

Lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 2 pada halaman 74-75 dan *Jaringan Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Ketenagakerjaan).

3. **Keamanan sekolah-sekolah baru dan yang dibangun kembali:**

Lokasi sekolah harus dipilih demi keselamatan dari bahaya dan ancaman yang diketahui, dan dirancang serta dibangun untuk menjadi tangguh. Ruang yang memadai harus direncanakan sedemikian rupa sehingga pendidikan tidak terganggu jika sekolah diperlukan sebagai tempat penampungan darurat sementara (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 77-78, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3, Catatan Panduan 1 - 2 pada halaman 88-89, dan *Catatan Pedoman INEE tentang Konstruksi Sekolah Aman*, tersedia dalam *Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit*).

4. **Analisis konteks:** Aturan dan kebijakan pendidikan harus mencerminkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek sosial, ekonomi, keamanan, lingkungan dan dinamika politik dalam konteks situasi darurat. Dengan cara ini, perencanaan dan program pendidikan dapat memenuhi kebutuhan dan hak peserta didik dan masyarakat yang lebih luas, serta menghindari perpecahan sosial atau konflik.

Analisis konteks mungkin termasuk pengkajian konflik, pengkajian hak asasi manusia serta analisis risiko dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lain harus berkontribusi dalam analisis konteks untuk memastikan bahwa isu-isu pendidikan termasuk yang ditinjau. Analisis konteks melibatkan konsultasi luas dengan masyarakat. Otoritas pendidikan dan pemangku kepentingan pendidikan lain harus mengadvokasi analisis tersebut untuk ditindak lanjuti dan dimasukkan sebagai bagian dari tinjauan reguler sektor pendidikan dan proses reformasi (lihat juga Analisis Standar 1, Catatan Panduan 3-6 pada halaman 48-52).

Analisis risiko mencakup analisis risiko korupsi dalam lingkup politik, lingkup administratif serta lingkup kemanusiaan. Diskusi tentang korupsi harus dilakukan seterbuka mungkin dalam perencanaan dan

pelaksanaan respons pendidikan di masa darurat. Diskusi yang terbuka adalah cara terbaik untuk pengembangan kebijakan anti-korupsi yang kuat. Pembahasan isu-isu korupsi tidak berarti memaafkan korupsi atau menyiratkan kerentanan tertentu seorang pelaku (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50).

5. **Berbagi informasi dan sistem informasi:** Mereka yang terlibat dalam kebijakan pengembangan pendidikan dan implementasi seharusnya berbagi informasi mengenai kebijakan dan respons strategis. Hal ini sangat penting dalam mengurangi konflik dan bencana. Informasi harus mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak (lihat juga Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 43).

Undang-undang, peraturan dan kebijakan harus dikembangkan berdasarkan informasi yang akurat. Manajemen sistem informasi data pendidikan harus dihubungkan dengan informasi mengenai wilayah dan kelompok penduduk yang rentan terhadap jenis situasi darurat tertentu. Ini adalah strategi kesiapsiagaan yang dapat memberikan masukan untuk perencanaan pendidikan nasional dan lokal. Bila memungkinkan, data pendidikan yang dikumpulkan oleh masyarakat harus dimasukkan ke dalam manajemen sistem informasi pendidikan nasional (lihat juga Analisis standar 3, Catatan Panduan 3 pada halaman 62-63).

6. **Kerangka kerja kesiapsiagaan terhadap bencana:** Pendidikan harus menjadi bagian integral dari kerangka kerja kesiapsiagaan nasional terhadap bencana. Sumber daya harus diamankan untuk memberikan respons pendidikan yang tepat waktu dan efektif. Pemangku kepentingan internasional, yang mendukung program pendidikan nasional atau lokal, harus mempromosikan kesiapsiagaan untuk pendidikan tanggap darurat sebagai komponen program pembangunan. Kerangka kerja kesiapsiagaan harus memuat ketentuan eksplisit untuk partisipasi anak-anak dan pemuda dalam upaya respons pada tingkat masyarakat (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 4-5 pada halaman 32-35; Partisipasi Masyarakat standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 39-40; Akses dan

Lingkungan Pembelajaran standar 2, Catatan Panduan 11 pada halaman 86, dan Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 6 pada halaman 109).

7. **Non-diskriminasi:** Otoritas pendidikan harus menjamin pendidikan yang menjangkau semua kelompok dengan cara yang adil. Menurut hukum internasional, pengungsi harus memiliki hak pendidikan yang sama seperti warga negara setempat di tingkat sekolah dasar. Pada tingkat yang lebih tinggi, pengungsi harus memiliki akses pada studi, pengakuan akan sertifikat, ijazah dan gelar, pengurangan biaya dan ongkos-ongkos lain dan akses untuk mendapatkan beasiswa yang setara dengan warga negara tuan rumah. Peserta didik penyintas mempunyai hak-hak pendidikan yang sama seperti warga negara yang tidak mengungsi. Mereka dilindungi oleh hukum hak asasi manusia nasional dan internasional serta Panduan Prinsip-prinsip bagi Pengungsian Internal (lihat juga Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 1-2 dan 4 pada halaman 72-76, Belajar-Mengajar standar 1, Catatan Panduan 3 dan 7-8 pada halaman 99-101 dan 103-104; dan Belajar-Mengajar standar 2, Catatan Panduan 5 pada halaman 109).
8. **Pelaku non-pemerintah dan PBB** seharusnya diizinkan untuk melengkapi kebutuhan pendidikan nasional untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dan hak-hak semua peserta didik terpenuhi. Akses mereka untuk mendirikan program dan fasilitas serta untuk memberikan respons dengan cepat dan aman untuk situasi darurat harus difasilitasi oleh negara tuan rumah. Termasuk di dalamnya adalah kemudahan mendapatkan visa dan peraturan bea cukai khusus untuk bahan bantuan serta bahan ajar.

Kebijakan Pendidikan Standar 2: Perencanaan dan Implementasi

Kegiatan pendidikan mempertimbangkan kebijakan, hukum, standar, dan rencana pendidikan internasional dan nasional, dan kebutuhan belajar masyarakat yang terdampak.

Aksi Kunci (untuk dibaca bersama dengan Catatan Panduan)

- Program pendidikan formal dan non-formal mencerminkan kerangka kerja dan kebijakan hukum internasional dan nasional (lihat Catatan Panduan 1).
- Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan terintegrasi dengan berbagai sektor tanggap darurat lain (lihat Catatan Panduan 2).
- Program pendidikan di masa darurat dikaitkan dengan rencana dan strategi pendidikan nasional dan diintegrasikan ke dalam pembangunan jangka panjang sektor pendidikan.
- Otoritas pendidikan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana pendidikan nasional dan lokal yang mempersiapkan dan memberikan respons situasi darurat saat ini dan di masa mendatang (lihat Catatan Panduan 3).
- Sumber daya keuangan, teknis, bahan dan sumber daya manusia dijamin cukup untuk penyusunan kebijakan pendidikan yang efektif dan transparan, dan untuk perencanaan serta pelaksanaan program pendidikan (lihat Catatan Panduan 4-5).

Catatan Panduan

1. **Memenuhi tujuan dan hak-hak pendidikan:** Program pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan kegiatan pendidikan inklusif yang memenuhi tujuan dan hak-hak pendidikan. Program tersebut harus sesuai dengan kerangka hukum nasional dan internasional (lihat Akses dan Lingkungan Belajar Standar 1, Catatan Panduan 1-2 dan 4 pada halaman 72-76 dan Kebijakan Pendidikan Standar 1, Catatan Panduan 1 dan 7 pada halaman 133-134 dan 138).
2. **Hubungan lintas sektoral:** Respons pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini dan kegiatan pemuda, harus dikaitkan dengan kegiatan

yang dilakukan oleh sektor lain seperti penyediaan air, sanitasi dan promosi kebersihan, gizi, ketahanan pangan dan bantuan pangan, hunian, pelayanan kesehatan serta pemulihan ekonomi (lihat juga Analisis standar 1, Catatan Panduan 6 pada halaman 51-52; Akses dan Lingkungan Belajar standar 1, Catatan Panduan 9 pada halaman 77-78, Akses dan Lingkungan Belajar standar 3 pada halaman 87-92, Buku Pegangan Sphere, dan *Jaringan Standar Minimum untuk Pemulihan Ekonomi setelah Krisis SEEP*, Standar Penciptaan Ketenagakerjaan dan Standar Pengembangan Usaha).

3. **Rencana pendidikan nasional dan lokal** harus mengindikasikan tindakan yang akan diambil dalam situasi darurat saat ini atau di masa mendatang. Rencana ini harus menentukan mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi, mekanisme keamanan dan mekanisme perlindungan untuk koordinasi antar-sektoral. Rencana harus didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap konteks dan harus mencakup indikator dan mekanisme peringatan dini bencana dan konflik. Mereka harus didukung oleh kebijakan dan kerangka kerja pendidikan yang tepat. Harus ada sistem untuk melakukan revisi secara teratur terhadap rencana pendidikan nasional dan lokal (lihat juga Partisipasi Masyarakat standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 32-33; Partisipasi Masyarakat standar 2 pada halaman 37-40; Koordinasi standar 1, Catatan Panduan 1 pada halaman 41-42; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 136-137).
4. **Sumber daya:** Otoritas nasional, lembaga kemanusiaan, donor, LSM, masyarakat dan pemangku kepentingan lain harus bekerja sama untuk menjamin pendanaan yang memadai bagi penyediaan kebutuhan pendidikan darurat. Koordinasi sumber daya harus dipimpin oleh pemerintah dan terintegrasi dengan mekanisme koordinasi yang ada. Di mana secara kontekstual layak, alokasi sumber daya harus seimbang antara:
 - elemen fisik, seperti ruang kelas tambahan, buku pelajaran dan bahan-bahan bagi kegiatan belajar-mengajar;
 - komponen kualitatif, seperti guru dan kursus pelatihan pengawasan, pengajaran dan bahan belajar.

Sumber daya harus dialokasikan untuk pelaporan yang sistematis dan terpusat atas serangan terhadap pendidikan serta pengumpulan, analisis dan berbagi data pendidikan (lihat juga Partisipasi Masyarakat Standar 2, Catatan Panduan 1 pada halaman 37-38; Koordinasi Standar 1, Catatan Panduan 1-2 pada halaman 41-43; Analisis standar 1 pada halaman 46-53; Analisis standar 2, Catatan Panduan 2 pada halaman 55; Analisis standar 3, Catatan Panduan 3 pada halaman 62-63; Analisis standar 4, Catatan panduan 3-4 pada halaman 65-66, dan Akses dan Lingkungan Belajar Standar 2, Catatan Panduan 4 dan 7 pada halaman 82-85).

5. **Transparansi dan akuntabilitas:** Informasi yang relevan atas perencanaan dan implementasi kebijakan, termasuk praktik-praktik untuk mencegah korupsi (baik dalam bentuk moneter maupun non-moneter), harus dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan kemanusiaan lain. Transparansi sangat penting untuk pemantauan dan akuntabilitas yang efektif. Harus ada sistem yang aman dan sesuai dengan budaya dalam menangani pengaduan korupsi. Termasuk di dalamnya berbagai kebijakan untuk mendorong orang agar melaporkan korupsi dan melindungi mereka yang membuat laporan (lihat juga Koordinasi standar 1 Catatan Panduan 5 pada halaman 44; Analisis standar 1, Catatan Panduan 3 pada halaman 48-50, dan Kebijakan Pendidikan standar 1, Catatan Panduan 4 pada halaman 136-137).



Untuk Perangkat yang dapat membantu Anda dalam penerapan standar tersebut, kunjungi Toolkit INEE: www.ineesite.org/toolkit

Toolkit INEE

↳ Standar Minimum INEE

↳ Perangkat Penerapan

↳ Kebijakan Pendidikan

Lampiran 1: DAFTAR ISTILAH

Access / Akses: kesempatan untuk mendaftar, menghadiri dan menyelesaikan program pendidikan formal atau non-formal. Ketika akses tidak dibatasi, itu berarti bahwa tidak ada hambatan-hambatan praktik, keuangan, fisik, terkait keamanan, struktural, institusional atau sosial-budaya yang mencegah peserta didik dari partisipasi dan upaya menyelesaikan program pendidikan.

Accountability / Akuntabilitas: penjelasan tentang makna dan alasan untuk tindakan dan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan, keprihatinan dan kapasitas serta situasi pihak-pihak yang terkena dampak. Akuntabilitas adalah mengenai transparansi proses pengelolaan termasuk penggunaan sumber daya keuangan. Akuntabilitas adalah mengenai hak untuk didengar dan kewajiban untuk menanggapi. Dalam dunia pendidikan, akuntabilitas berarti penyelenggara pendidikan bertanggung jawab atas kualitas pelayanan mereka dalam hal menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap kepada para siswa; perilaku guru; dan kinerja sekolah atau kinerja sistem.

Assessment / Penilaian atau pengkajian: 1) penyelidikan yang dilakukan sebelum merencanakan kegiatan pendidikan dan intervensi dalam situasi darurat untuk menentukan kebutuhan, kesenjangan dalam respons dan sumber daya yang tersedia; 2) pengujian atas kemajuan dan prestasi peserta didik. 'Sebuah penilaian hasil belajar' adalah bentuk penilaian yang ditentukan oleh sebuah program pendidikan. Sejumlah perangkat penilaian/pengkajian dapat ditemukan dalam *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit. Perangkat penilaian/pengkajian harus selalu disesuaikan untuk mencerminkan informasi yang dibutuhkan dalam konteks atau lingkungan tertentu.

Capacity / Kapasitas: kombinasi dari kekuatan, atribut, dan sumber daya individu-individu atau yang tersedia dalam suatu masyarakat, komunitas atau organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang disepakati.

Capacity building / Pengembangan kapasitas: penguatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan perilaku untuk membantu orang-orang dan organisasi mencapai tujuan mereka.

Child-friendly spaces and schools / Sekolah dan ruang ramah-anak: tempat-tempat yang aman dan sekolah-sekolah di mana masyarakat membuat lingkungan pengasuhan anak-anak sehingga anak-anak dapat melakukan aktivitas bermain

yang bebas dan terstruktur, aktivitas rekreasi, aktivitas mengisi waktu luang dan belajar. Ruang ramah-anak dapat menyediakan layanan kesehatan, gizi dan dukungan psikososial serta kegiatan lain untuk memulihkan perasaan normal dan keberlanjutan. Tempat-tempat ini dirancang dan dioperasikan secara partisipatoris. Sekolah-sekolah dan ruang ramah-anak mungkin melayani kelompok anak-anak usia tertentu atau berbagai rentang usia. Ruang ramah-anak dan sekolah penting dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan.

Child protection / Perlindungan anak: kebebasan dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi, pengabaian dan kekerasan, termasuk *bullying*, eksploitasi seksual, kekerasan dari teman sebaya, guru atau tenaga kependidikan lain; bahaya alam; senjata dan amunisi, ranjau darat dan persenjataan yang belum meledak, personil bersenjata; lokasi baku tembak; ancaman politik dan militer, dan perekrutan ke dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata.

Children / Anak-anak: semua orang yang berusia antara 0 dan 18 tahun. Kategori ini termasuk remaja (10-19 tahun). Kriteria ini tumpang tindih dengan kategori pemuda (15-24 tahun) (lihat juga definisi untuk 'pemuda' di bawah).

Children associated with armed forces and armed groups / Anak-anak yang terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata: anak-anak mungkin diculik atau direkrut secara paksa, atau mungkin bergabung dengan kekuatan tempur secara 'sukarela'. Mereka tidak selalu mengangkat senjata. Mereka mungkin bertindak sebagai kuli, mata-mata, tukang masak atau korban kekerasan seksual. Anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk mendapat pendidikan. Selama proses demobilisasi dan reintegrasi, perhatian khusus harus diberikan untuk kebutuhan khusus pendidikan mereka, termasuk pendidikan formal dan non-formal, percepatan belajar, keterampilan hidup dan pelatihan kejuruan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak perempuan, yang sering kali terabaikan dan dihilangkan dari program rehabilitasi.

Cognitive / Kognitif: proses mental seperti pikiran, imajinasi, persepsi, memori, pengambilan keputusan, penalaran dan pemecahan masalah.

Community education committee / Komite pendidikan masyarakat: suatu komite, baik yang sudah ada maupun yang baru terbentuk, yang mengidentifikasi dan menangani kebutuhan pendidikan masyarakat. Anggotanya mencakup perwakilan dari orang tua dan wali, guru, peserta didik, para pemimpin dan berbagai kelompok organisasi masyarakat, kelompok marjinal, asosiasi masyarakat sipil, kelompok pemuda dan petugas kesehatan.

Conflict mitigation / Mitigasi konflik: tindakan dan proses yang 1) sensitif terhadap konflik dan tidak meningkatkan ketegangan atau sumber kekerasan; dan

2) bertujuan untuk mengatasi penyebab konflik dan mengubah cara bertindak mereka yang terlibat dan merasakan masalah. Kegiatan kemanusiaan, pemulihan dan pembangunan ditelaah atas efek mereka pada konteks konflik di mana mereka mengambil tempat dan di mana mereka berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Pendekatan mitigasi konflik dapat digunakan untuk pencegahan konflik dan intervensi dalam konflik dan situasi-situasi pasca-konflik.

Disability / Cacat atau berkebutuhan khusus: gangguan fisik, mental, intelektual atau gangguan indera serta hambatan sikap dan hambatan karena lingkungan yang mencegah partisipasi penuh dan efektif dari individu-individu dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.

Disaggregated data / data terpilah: informasi statistik yang dipisahkan menjadi beberapa bagian. Sebagai contoh, pengkajian data dari sebuah populasi atau sebuah sampel dapat dianalisis menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah geografis.

Disaster / Bencana: sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat yang melibatkan kerugian dan berdampak luas terhadap manusia, material, ekonomi atau lingkungan; yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terdampak dalam mengatasinya dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Disaster risk reduction / Pengurangan risiko bencana: konsep dan praktik untuk mengurangi risiko melalui upaya yang sistematis dalam menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan harta benda, pengelolaan lahan dan lingkungan yang bijak, dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap kejadian yang merugikan.

Discrimination / Diskriminasi: Memperlakukan orang dengan cara yang berbeda-beda yang mengarah ke penyangkalan terhadap akses ke fasilitas, layanan, kesempatan, hak atau partisipasi atas dasar jenis kelamin, agama, orientasi seksual, usia, etnis, status HIV atau faktor lain.

Distress / Kondisi tertekan (atau umumnya disebut dengan istilah 'stres'): situasi sedang bingung, cemas dan labil. Hal ini dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap kondisi hidup yang sulit seperti kemiskinan dan kepadatan penduduk atau terpapar terhadap ancaman keamanan atau kesejahteraan.

'Do No Harm': suatu pendekatan yang membantu untuk mengidentifikasi dampak negatif atau positif yang tidak disengaja dari intervensi kemanusiaan dan pembangunan dalam kondisi di mana ada konflik atau risiko terjadi konflik. Pendekatan ini dapat diterapkan pada saat perencanaan, pemantauan dan evaluasi

untuk memastikan bahwa intervensi tidak memperburuk konflik melainkan memberikan kontribusi untuk memperbaiki situasi. Pendekatan ini dianggap sebagai dasar penting bagi bekerjanya organisasi-organisasi yang beroperasi dalam situasi konflik.

Early childhood development / Pendidikan anak usiadini: proses di mana anak-anak yang sangat muda dalam rentang usia 0-8 tahun, mengembangkan dengan optimal kesehatan fisik, kewaspadaan mental, kepercayaan emosional diri, kompetensi sosial dan kesiapan untuk belajar. Proses ini didukung oleh kebijakan sosial dan kebijakan keuangan serta program yang komprehensif yang mengintegrasikan layanan-layanan kesehatan, gizi, air, sanitasi, kebersihan, pendidikan dan perlindungan anak. Semua anak dan keluarga mendapat manfaat dari program-program berkualitas tinggi, namun kelompok yang kurang beruntunglah yang akan mendapat manfaat terbanyak.

Education authorities / Otoritas pendidikan: pemerintah dengan kementerian, departemen, lembaga dan instansi terkait adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin hak atas pendidikan. Mereka menjalankan otoritas penyelenggaraan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan tingkat lokal. Dalam konteks di mana kewenangan pemerintah terganggu, pelaku non-pemerintah, seperti LSM dan badan-badan PBB, kadang-kadang dapat memikul tanggung jawab ini.

Education Cluster / Klaster Pendidikan: sebuah mekanisme koordinasi antar-lembaga untuk lembaga dan organisasi dengan keahlian dan mandat bagi respons kemanusiaan dalam sektor pendidikan dan dalam situasi pengungsian internal. Didirikan pada tahun 2007 melalui IASC (lihat catatan terpisah), Klaster Pendidikan dipimpin oleh UNICEF dan Save the Children di tingkat global. Pada tingkat nasional / negara, lembaga-lembaga lain dapat berperan sebagai pemimpin dan kementerian pendidikan nasional terlibat secara aktif. Dalam konteks pengungsi, UNHCR merupakan lembaga utama. Klaster Pendidikan bertanggung jawab untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam kapasitas teknis untuk memberikan respons terhadap situasi darurat kemanusiaan. Selama dalam tahap respons kemanusiaan, Klaster Pendidikan harus menjamin kepemimpinan dan akuntabilitas sektor pendidikan.

Education in emergency / Pendidikan di masa darurat: kesempatan belajar yang berkualitas bagi semua umur dalam situasi krisis, termasuk pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, pendidikan non-formal, pendidikan teknik, pendidikan kejuruan, pendidikan tingkat tinggi dan pendidikan bagi orang dewasa. Pendidikan di masa situasi darurat menyediakan perlindungan fisik, psikososial dan kognitif yang dapat mempertahankan dan menyelamatkan nyawa.

Education Response / Respons Pendidikan: penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan hak atas pendidikan dalam situasi darurat hingga tahap pemulihan.

Emergency / Kedaruratan: sebuah situasi di mana masyarakat terganggu dan belum kembali kepada stabilitas.

Formal education / Pendidikan Formal: kesempatan belajar yang diberikan dalam sebuah sistem berupa sekolah, perguruan tinggi, universitas dan lembaga pendidikan lain. Umumnya melibatkan pendidikan penuh-waktu untuk anak-anak dan pemuda, dimulai pada usia antara lima dan tujuh tahun dan berlanjut hingga usia 20 atau 25 tahun. Pendidikan formal ini biasanya dikembangkan oleh kementerian pendidikan nasional, namun dalam situasi darurat mungkin didukung oleh para pemangku kepentingan pendidikan lain.

Gender: peran, tanggung jawab dan identitas perempuan dan laki-laki serta bagaimana hal-hal ini dinilai dalam masyarakat. Gender menjadi spesifik untuk budaya yang berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Identitas gender menentukan bagaimana masyarakat mengharapkan perempuan dan laki-laki untuk berpikir dan bertindak. Perilaku ini dipelajari dalam keluarga dan di sekolah-sekolah serta melalui pengajaran agama, juga media. Peran, tanggung jawab dan identitas gender dapat berubah karena secara sosial selalu dipelajari.

Gender balance / Keseimbangan gender: jumlah yang kurang lebih sama antara laki-laki dan perempuan juga antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini dapat merujuk pada partisipasi dan masukan ke dalam kegiatan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa baik kepentingan laki-laki maupun perempuan diakui dan dilindungi. Keseimbangan gender juga dapat merujuk pada jumlah laki-laki dan perempuan yang dipekerjakan oleh otoritas pendidikan dan oleh badan-badan internasional dan nasional. Hal ini penting terutama dalam perekrutan tenaga kerja guru. Keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di semua tingkat menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk membahas dan menyikapi dampak yang berbeda dari kebijakan dan program terhadap laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dan anak perempuan.

Gender-based violence / Kekerasan berbasis gender: setiap tindakan berbahaya berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam banyak hal, perempuan lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender karena status mereka yang lebih rendah dalam masyarakat. Laki-laki dan anak laki-laki juga dapat menjadi korban, terutama dalam kekerasan seksual. Sifat dan tingkat kekerasan berbasis gender bervariasi di seluruh budaya, negara dan wilayah. Contoh-contohnya termasuk:

- ◆ *kekerasan seksual* seperti eksploitasi dan pelecehan seksual, pelacuran paksa, dan perkawinan paksa dan pernikahan pada usia dini;

- ◆ *kekerasan dalam rumah tangga* termasuk kekerasan fisik, emosional dan psikologis;
- ◆ *praktik-praktik budaya atau tradisional yang berbahaya* seperti mutilasi alat kelamin pada perempuan, pembunuhan atas alasan kehormatan dan pewarisan janda, biasanya oleh laki-laki dari keluarga suami yang meninggal. (Catatan: pewarisan janda adalah kondisi di mana janda tersebut dipaksa untuk menikah dengan laki-laki yang merupakan saudara dari almarhum suaminya)

Hazard / Bahaya: peristiwa, fenomena atau aktivitas manusia yang berpotensi merusak, yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau menyebabkan cedera, kerusakan harta benda, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat muncul secara alami atau karena ulah manusia atau kombinasi dari keduanya. Risiko yang ditimbulkan oleh bahaya tergantung pada seberapa besar kemungkinan terjadinya, di mana, seberapa sering dan bagaimana intensitasnya. Sebagai contoh, sebuah gempa kecil di daerah gurun yang terjadi sekali dalam 100 tahun menimbulkan risiko yang sangat rendah untuk manusia. Sebuah banjir di daerah perkotaan yang terjadi dengan ketinggian hingga 3 meter dalam waktu 48 jam, meskipun hanya muncul sekali setiap 5-10 tahun, memiliki probabilitas relatif tinggi dan membutuhkan langkah-langkah mitigasi.

HIV prevention, treatment, care and support / Pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan terhadap HIV: kombinasi intervensi perilaku, hukum, struktural, dan biomedis yang diperlukan untuk mengurangi jumlah infeksi HIV baru serta dampak HIV dan AIDS pada mereka yang terinfeksi dan terdampak. Pencegahan, pengobatan, perawatan, dan kebutuhan dukungan terhadap HIV harus berdasarkan pada pemahaman menyeluruh mengenai epidemi, siapa saja yang paling berisiko terkena infeksi dan perilaku yang mengarah ke infeksi baru. Perilaku yang paling berisiko adalah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki; penggunaan narkoba melalui suntikan, seks dengan imbalan uang atau materi lainnya, sering berganti-ganti pasangan (secara seksual), dan hubungan dengan perbedaan usia (yang jauh). Situasi sosial ekonomi juga berdampak pada pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap HIV.

Human rights / Hak asasi manusia (HAM): suatu cara bagi kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia bersifat universal dan mutlak: hak-hak tersebut tidak dapat diberikan, atau diambil. Dalam konteks situasi darurat, hak asasi manusia yang penting, seperti non-diskriminasi, perlindungan dan hak untuk hidup, mendapat prioritas utama, sedangkan realisasi progresif hak-hak lain dapat bergantung pada sumber daya yang tersedia. Karena pendidikan berperan penting bagi perlindungan, non-diskriminasi dan kelangsungan hidup, maka pendidikan harus dilihat sebagai

salah satu hak asasi manusia yang penting. Hukum HAM internasional adalah tubuh dari perjanjian hukum internasional dan standar normatif yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak manusia di setiap saat, termasuk selama masa darurat. Selama konflik, hukum kemanusiaan dan pidana internasional juga tetap berlaku. Perjanjian dan standar ini mengatur permusuhan/pertempuran, melindungi warga sipil dan menetapkan tugas/kewajiban pada para pelaku yang mungkin menentang, menggantikan atau bertindak atas nama negara. Hukum pengungsi menetapkan kewajiban pemerintah terhadap orang-orang yang mengungsi melintasi batas internasional karena takut akan penganiayaan atau konflik bersenjata.

Inclusive education / Pendidikan inklusif: menjamin keberadaan, partisipasi dan pencapaian dari *semua* individu dalam kesempatan belajar. Hal ini termasuk untuk memastikan bahwa kebijakan, praktik dan fasilitas pendidikan dapat menanggapi keanekaragaman semua individu sesuai keadaannya. Pengecualian dari pendidikan dapat muncul akibat diskriminasi, kurangnya dukungan untuk menghilangkan hambatan atau penggunaan bahasa, isi atau metode pengajaran yang tidak menguntungkan semua peserta didik. Orang dengan kebutuhan khusus fisik, sensorik, mental dan intelektual sering masuk dalam kelompok yang paling dikecualikan dari pendidikan. Situasi darurat berdampak pada pengecualian. Beberapa orang yang sebelumnya mampu mengakses pendidikan mungkin dikecualikan karena faktor situasional, sosial, budaya, fisik atau infrastruktur. Pendidikan inklusif memastikan bahwa hambatan untuk berpartisipasi dan belajar dihilangkan dan bahwa metodologi pengajaran dan kurikulum dapat diakses dan sesuai bagi siswa berkebutuhan khusus. Semua individu diterima dan didukung untuk membuat kemajuan, dan kebutuhan individual mereka dapat tertangani.

Information management / Manajemen informasi: meliputi penilaian/pengkajian atas kebutuhan, kapasitas dan cakupan serta pemantauan dan evaluasi terkait, penyimpanan data, analisis data, dan sistem untuk berbagi informasi. Perangkat dan sistem manajemen informasi membantu pemangku kepentingan untuk menentukan fakta dan data yang dikumpulkan, memproses dan membaginya, dengan siapa, kapan, untuk tujuan apa, dan dengan cara bagaimana.

Instruction and learning processes / Proses (pemberian) instruksi dan proses belajar: interaksi antara peserta didik dan guru. Instruksi direncanakan sesuai dengan kurikulum, berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi melalui pengkajian, dan dimungkinkan melalui pelatihan guru. Instruksi dan proses belajar yang berpusat pada peserta didik, partisipatoris, dan inklusif melibatkan masyarakat luas dalam menyediakan dan mendukung pendidikan.

Inter-Agency Standing Committee (IASC): suatu forum antar-lembaga untuk koordinasi, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bantuan kemanusiaan. IASC didirikan pada bulan Juni 1992 sebagai respons terhadap Resolusi Majelis Umum PBB pada penguatan bantuan kemanusiaan. IASC melibatkan mitra-mitra kemanusiaan utama PBB dan non-PBB.

Internally displaced person (IDP)/ Penyintas: orang yang terpaksa meninggalkan rumah atau daerahnya demi menemukan tempat yang aman di dalam negaranya, dan bukannya melintasi perbatasan internasional. Penyintas sering lari untuk alasan yang sama dengan pengungsi, seperti konflik bersenjata, bencana, kekerasan umum atau pelanggaran hak asasi manusia. Namun, secara hukum mereka tetap berada di bawah perlindungan pemerintah mereka sendiri, meskipun pemerintah mereka yang mungkin menjadi penyebab larinya mereka. Sebagai warga negara, mereka tetap mempunyai hak-hak mereka, termasuk untuk mendapatkan perlindungan, di bawah hukum hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional.

Learners / Peserta didik: Orang, termasuk anak-anak, pemuda dan orang dewasa, yang berpartisipasi dalam program pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah siswa di sekolah formal, peserta pendidikan dan pelatihan teknik dan kejuruan serta peserta pendidikan non-formal, seperti kelas berhitung dan membaca, kursus keterampilan hidup di masyarakat serta kelompok belajar kawan sebaya.

Learning outcomes / Hasil pembelajaran: pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang dicapai siswa sebagai hasil yang diperoleh setelah ambil bagian dalam program kursus atau program pendidikan. Hasil pembelajaran biasanya digambarkan sebagai apa yang siswa 'harus tahu dan mampu' lakukan sebagai hasil dari proses instruksi dan proses belajar.

Learning sites / Lokasi belajar: lokasi ruang belajar.

Learning spaces / Ruang belajar: tempat di mana kegiatan belajar-mengajar terjadi. Contohnya termasuk rumah-rumah pribadi, pusat perawatan anak, pra-sekolah, bangunan sementara dan sekolah.

Life skills / Keterampilan hidup: keterampilan dan kemampuan berperilaku secara positif yang memungkinkan individu untuk beradaptasi dan menangani tuntutan serta tantangan hidup sehari-hari secara efektif. Keterampilan hidup membantu orang berpikir, merasa, bertindak dan berinteraksi sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang berpartisipasi. Ada tiga kategori keterampilan hidup: *kognitif*; *personal (pribadi)* atau *emosional*; dan *antar-pribadi* atau *sosial*. Keterampilan hidup bisa sangat umum: misalnya, menganalisis dan menggunakan informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Tetapi

keterampilan hidup bisa juga terkait dengan bidang tertentu seperti pengurangan risiko, perlindungan lingkungan, promosi kesehatan, pencegahan HIV, pencegahan terhadap kekerasan atau menjaga perdamaian. Dalam situasi krisis, kebutuhan atas keterampilan hidup sering kali meningkat, yang memerlukan peningkatan penekanan pada membangun kecakapan hidup yang relevan dan dapat diterapkan dalam konteks darurat dan konteks lokal.

Livelihood / Mata Pencarian: kemampuan, aset, peluang dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana untuk hidup. Aset meliputi sumber daya keuangan, alam, fisik, sosial dan sumber daya manusia. Contohnya termasuk toko-toko, tanah dan akses ke pasar atau sistem transportasi. Sebuah mata pencarian dapat berlanjut jika dapat mengatasi dan pulih dari tekanan/stres dan guncangan, menjaga atau meningkatkan kemampuan dan aset serta memberikan kesempatan mata pencarian yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.

Non-formal education / Pendidikan non-formal: kegiatan pendidikan yang tidak berkaitan dengan definisi pendidikan formal (lihat catatan sebelumnya). Pendidikan non-formal terjadi baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dan melayani orang-orang dari segala usia serta tidak selalu mengarah pada sertifikasi. Program pendidikan non-formal ditandai oleh keanekaragaman, fleksibilitas dan kemampuan mereka dalam memberikan respons dengan cepat terhadap kebutuhan pendidikan baru bagi anak-anak atau orang dewasa. Pendidikan non-formal sering dirancang untuk kelompok peserta didik tertentu seperti mereka yang terlalu tua untuk tingkat kelas mereka, mereka yang tidak bersekolah formal, atau orang dewasa. Kurikulum mungkin didasarkan pada pendidikan formal atau pada pendekatan baru. Contohnya, pembelajaran 'untuk mengejar ketertinggalan' yang dipercepat, program setelah (jam/waktu) sekolah, membaca dan berhitung. Pendidikan non-formal memungkinkan peserta didik yang terlambat masuk dalam proses pembelajaran untuk kemudian dapat mengikuti program pendidikan formal. Kesempatan ini sering disebut sebagai 'pendidikan kesempatan-kedua'.

Participation / Partisipasi: terlibat dalam dan memengaruhi proses, keputusan dan kegiatan. Partisipasi adalah hak untuk semua dan merupakan dasar untuk bekerja dengan masyarakat dan untuk mengembangkan program. Partisipasi bervariasi berdasarkan kapasitas yang terus berkembang. Semua kelompok, termasuk orang dewasa, anak-anak, pemuda, orang berkebutuhan khusus dan anggota kelompok rentan dapat berpartisipasi dengan cara yang berbeda sejak tahap awal. Tidak boleh ada sekelompok orang yang ditolak kesempatannya untuk berpartisipasi hanya karena mereka sulit dijangkau atau sulit untuk diajak bekerja sama. Partisipasi adalah sukarela. Orang-orang diundang dan didorong untuk berpartisipasi, tidak dipaksa atau dimanipulasi. Partisipasi dapat mencakup

berbagai kegiatan dan pendekatan. Peran pasif termasuk memanfaatkan layanan, memberikan kontribusi sumber daya material, menerima keputusan yang dibuat oleh orang lain dan diajak berkonsultasi dengan cara yang minimal. Contoh partisipasi aktif termasuk menyumbangkan waktu, terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, dalam perencanaan, dan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Participatory learning / Pembelajaran partisipatoris: sebuah pendekatan untuk belajar-mengajar yang berfokus pada peserta didik. Pembelajaran ini mendorong peserta didik untuk belajar dengan cara melakukan sesuatu, membentuk kelompok kecil, menggunakan materi yang konkrit, bertanya secara terbuka, dan belajar dengan teman sebaya. Sebagai contoh, peserta didik menggunakan kegiatan praktis untuk memahami konsep-konsep matematika atau bekerja sama untuk memecahkan masalah dengan bertanya dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran partisipatoris diperbandingkan dengan metodologi berfokus guru, yang dicirikan dengan peserta didik duduk pasif di bangku, menjawab pertanyaan tertutup dan menyalin dari papan tulis. Pembelajaran partisipatoris juga dapat memanfaatkan guru dan otoritas pendidikan untuk mendukung mereka dalam menganalisis kebutuhan mereka, mengidentifikasi solusi dan mengembangkan serta mengimplementasikan rencana aksi. Dalam konteks ini, dapat juga termasuk partisipasi masyarakat, koordinasi dan analisis.

Preparedness / Kesiapsiagaan: pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi-organisasi, komunitas dan perseorangan yang profesional di bidang respons dan pemulihan yang secara efektif mengantisipasi, memberikan respons terhadap dan melakukan pemulihan terhadap dampak-dampak dari kejadian atau kondisi bahaya yang mungkin terjadi, baik dalam waktu dekat ataupun saat ini.

Prevention / Pencegahan: tindakan yang diambil untuk menghindari dampak buruk dari bahaya dan bencana yang terkait (lihat catatan terpisah untuk istilah-istilah ini).

Protection / Perlindungan: kebebasan dari segala bentuk pelecehan, eksploitasi kekerasan dan penelantaran.

Psychosocial support / Dukungan psikososial: proses dan tindakan yang mempromosikan kesejahteraan manusia secara menyeluruh di lingkungan sosial mereka. Termasuk di dalamnya dukungan yang diberikan oleh keluarga dan teman-teman. Contoh dari dukungan keluarga dan masyarakat mencakup upaya untuk menyatukan kembali anak yang terpisah dan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam situasi darurat.

Quality education / Pendidikan berkualitas: pendidikan yang berkualitas adalah

pendidikan yang terjangkau, dapat diakses, peka gender dan memberikan respons terhadap keanekaragaman. Pendidikan berkualitas mencakup 1) lingkungan yang aman dan ramah bagi peserta didik; 2) guru yang kompeten dan terlatih yang memiliki pengetahuan dalam materi pelajaran dan pedagogi; 3) kurikulum yang sesuai kondisi spesifik yang dapat dimengerti dan relevan secara budaya, bahasa dan sosial bagi peserta didik; 4) bahan ajar yang memadai dan relevan untuk belajar-mengajar; 5) proses instruksi dan proses belajar dengan metode partisipatoris yang menghormati martabat peserta didik; 6) ukuran kelas dan rasio guru-murid yang tepat; dan 7) penekanan pada kegiatan rekreasi, kegiatan bermain, kegiatan olah raga dan kegiatan kreatif di samping bidang-bidang seperti membaca, berhitung dan keterampilan hidup.

Recovery / Pemulihan: restorasi dan perbaikan fasilitas, mata pencaharian, kondisi hidup atau kesejahteraan psikososial masyarakat yang terkena dampak, termasuk upaya-upaya untuk mengurangi faktor risiko bencana.

Refugee / Pengungsi: sesuai dengan Konvensi Pengungsi tahun 1951, pengungsi adalah seseorang dengan rasa takut dianiaya atas alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politik, berada di luar negaranya, dan tidak dapat, atau karena ketakutannya tersebut, tidak bersedia memanfaatkan perlindungan dari negaranya.

Relevant education / Pendidikan yang relevan: kesempatan belajar yang sesuai untuk peserta didik. Pendidikan yang relevan memperhitungkan tradisi dan institusi lokal, praktik-praktik budaya yang positif, sistem kepercayaan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan ini mempersiapkan anak-anak untuk masa depan yang positif dalam masyarakat, dalam konteks nasional dan internasional. Pendidikan yang relevan adalah sebuah elemen kualitas pendidikan dan mengacu pada apa yang dipelajari, bagaimana dipelajari dan bagaimana belajar secara efektif.

Resilience / Ketahanan: kapasitas untuk beradaptasi dari sebuah sistem, masyarakat, atau individu yang berpotensi terkena bahaya. Adaptasi ini berarti bertahan atau berubah untuk mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Ketahanan tergantung pada mekanisme untuk menanggulangi dan keterampilan/kecakapan hidup seperti pemecahan masalah, kemampuan untuk mencari dukungan, motivasi, optimisme, iman, ketekunan dan akal. Ketahanan terjadi ketika faktor pelindung yang mendukung kesejahteraan lebih kuat daripada faktor risiko yang menyebabkan bahaya.

Risk / Risiko: produk dari ancaman eksternal seperti bencana alam, prevalensi HIV, kekerasan berbasis gender, serangan bersenjata dan penculikan, dikombinasikan dengan kerentanan individu seperti kemiskinan, berkebutuhan khusus fisik ataupun mental atau bagian dari kelompok rentan.

Risk assessment / Penilaian atau pengkajian risiko: sebuah metodologi untuk menentukan sifat dan tingkat risiko dengan menganalisis potensi bahaya dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada yang dapat menimbulkan potensi ancaman atau kerusakan pada manusia, properti, mata pencaharian dan lingkungan di mana mereka bergantung.

Safety / Keselamatan: situasi bebas dari bahaya fisik atau psikososial.

Security / Keamanan: perlindungan dari ancaman, bahaya cedera atau kerugian.

Stakeholder / Pemangku kepentingan: seseorang, kelompok atau lembaga yang memiliki minat atau kepentingan dalam suatu proyek atau program.

Vulnerability / Kerentanan: karakteristik dan situasi individu atau kelompok yang mengakibatkan mereka menjadi rentan terhadap serangan, bahaya atau tekanan. Termasuk contoh kelompok rentan adalah anak-anak tanpa pendamping, orang berkebutuhan khusus, kepala rumah tangga tunggal dan anak-anak yang sebelumnya terkait dengan angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata.

Well-being / Kesejahteraan: kondisi kesehatan menyeluruh dan proses mencapai kondisi ini. Hal ini mengacu pada kesehatan fisik, emosional, sosial dan kognitif. Kesejahteraan mencakup apa yang baik bagi seseorang: berpartisipasi secara bermakna dalam peran sosial; perasaan bahagia dan penuh harapan, hidup dengan mengikuti nilai-nilai yang baik, sebagaimana didefinisikan secara lokal; memiliki hubungan sosial yang positif dan lingkungan yang mendukung; menghadapi tantangan melalui penggunaan keterampilan hidup yang positif; memiliki keamanan, perlindungan dan akses terhadap pelayanan yang berkualitas (lihat juga catatan untuk 'kognitif').

Youth and adolescents / Pemuda dan remaja: *pemuda* adalah orang dengan usia antara 15 dan 24 tahun, sedangkan *remaja* adalah orang yang berusia antara 10 dan 19. Kedua kelompok ini membentuk kategori terbesar orang-orang muda, yaitu mereka yang berusia antara 10 dan 24 tahun. Akhir dari masa pemuda dan awal kedewasaan bervariasi. Dalam suatu negara atau budaya, terdapat perbedaan penentuan umur di mana seorang individu dianggap cukup dewasa untuk dipercaya oleh masyarakat dengan tugas-tugas tertentu. Dalam situasi darurat, pemuda memiliki kebutuhan yang berbeda dari anak-anak muda dan orang dewasa. Pemuda mengacu pada periode kemajuan terhadap tanggung jawab secara mandiri. Definisi bervariasi dari satu konteks ke konteks yang lain tergantung pada berbagai faktor seperti budaya, kelembagaan, ekonomi, politik, dan sosial.

Anda dapat menemukan daftar yang lebih luas mengenai istilah kunci dalam *Toolkit* INEE: www.ineesite.org/toolkit.

Lampiran 2: SINGKATAN

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IASC	: <i>Inter-Agency Standing Committee</i>
IDP	: <i>Internally Displaced Person</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INEE	: <i>Inter-Agency Network for Education in Emergencies</i>
MFA	: <i>Ministry of Foreign Affairs</i>
NGO	: <i>Non-Government Organisation</i>
NORAD	: <i>Norwegian Agency for Development</i>
SEEP	: <i>Small Enterprise Education and Promotion</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNESCO	: <i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation</i>
UNHCR	: <i>United Nations High Commission for Refugees</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>

Lampiran 3: INDEKS

A

akses 2, 3, 4, 6, 9, 12, 29, 31, 33, 34, 36, 45, 51, 55

akses dan keamanan 37

aksi kunci 4, 10, 12, 14, 28, 36, 40, 45, 53, 59, 63, 71, 78, 86, 97, 104, 108, 111, 119, 122, 125, 132, 138

akuntabilitas 4, 8, 17, 20, 25, 37, 40, 43, 50, 59, 125, 140, 141

anak 1, 6, 10, 17, 22, 29, 30, 34, 36, 42, 51, 56, 70, 72, 74, 81

anak-anak dan pemuda 1, 3, 25, 28, 30, 32, 33, 37, 60, 74, 79, 81, 145

analisis 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, 28, 30, 34, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 64, 76, 80, 87, 95, 132, 134, 135, 139, 140, 147, 150

analisis konflik 47, 48

analisis konteks 10, 11, 28, 45, 47, 53, 132, 135

audit sosial 34

B

bahan ajar 98, 107, 108, 112, 125, 137, 150

bahaya 1, 3, 26, 29, 47, 48, 54, 69, 78, 80, 82, 88, 91, 95, 104, 107, 133, 135, 142, 143, 146, 150, 151

belajar aktif 152

belajar-mengajar 31, 36, 49, 57, 60, 62, 69, 75, 76, 84, 88, 91, 95, 97, 98, 103, 105, 107, 108, 120, 121, 125, 126, 127, 133, 134, 136, 137, 139, 148, 149, 150

bencana 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 28, 29, 31, 33, 36, 38, 46, 48, 49, 56, 57, 59, 60, 71, 73, 76, 78, 85, 86, 87, 95, 97, 100, 104, 105, 107, 133, 135, 136, 139, 143, 148, 150

berbagi informasi dan sistem informasi 136

berhitung 3, 97, 98, 100, 105, 110, 148, 150

berkebutuhan khusus 3, 11, 28, 37, 38, 48, 56, 61, 71, 72, 85, 86, 88, 103, 108, 112,
117, 119, 120, 121, 131, 147, 149, 151, 152
bermain 74, 84, 108, 134, 141, 150

C

catatan panduan 4, 10, 12, 15, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49,
50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 85,
86, 87, 88, 91, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

D

darurat 1, 2, 4, 6, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 53, 54, 56,
59, 61, 65, 69, 71, 76, 85, 95, 101, 106, 110, 117, 131, 135, 137, 142, 144, 146,
152

data dasar 57, 58

data kualitatif 64

data kuantitatif 64

data terpilah 45, 46, 51, 60, 75, 143

definisi 22, 75, 76, 81, 122, 142, 149, 152

desain dan konstruksi 87, 88

desain dan pemeliharaan ruang belajar 89

deskripsi pekerjaan 119

diskriminasi 2, 32, 55, 59, 70, 71, 72, 73, 84, 87, 97, 105, 124, 131, 143, 147

domain 6, 9, 10, 15, 17

dukungan dan pengawasan 125

E

evaluasi 5, 16, 21, 25, 27, 28, 33, 34, 42, 44, 45, 54, 58, 63, 64, 65, 95, 99, 111, 112, 126,
143, 147

F

fasilitas 2, 18, 38, 51, 69, 76, 77, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 106, 109, 132, 133, 137, 143, 147
fleksibilitas 54, 74, 149

G

gender 10, 15, 19, 26, 28, 29, 47, 51, 54, 60, 70, 81, 82, 91, 97, 103, 105, 117, 119, 120,
131, 145, 150
guru dan tenaga kependidikan 13, 17, 32, 33, 41, 42, 59, 60, 64, 69, 78, 80, 81, 83, 84,
85, 86, 87, 89, 91, 95, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 125, 126, 132

H

hak asasi manusia 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 22, 32, 43, 60, 73, 80, 83, 95, 100, 103, 105, 120,
124, 132, 133, 135, 137, 146, 148
hak atas pendidikan 6, 8, 22, 32, 40, 46, 72, 73, 144
hasil belajar 9, 95, 111, 141
hubungan antar-sektoral 10, 20
hubungan strategis 4, 19
hukum dan kebijakan 131, 132, 133

I

instruksi dan proses belajar 108, 148
instrumen hukum internasional 7, 131
Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) 4
Inter-Agency Standing Committee (IASC) 4, 147

K

kapasitas 11, 12, 16, 21, 25, 26, 28, 33, 40, 48, 54, 61, 74, 97, 106, 126, 141
kapasitas lokal 38, 45, 55
keamanan 9, 19, 26, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 45, 47, 48, 49, 55, 57, 59, 60, 74, 75, 76, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 135, 139, 141, 143, 151, 152
keamanan dan keselamatan 45, 78
keamanan dari serangan 31
keamanan sekolah 85, 135
keanekaragaman 102, 103, 119
kebijakan pendidikan 6, 10, 15, 25, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 49, 50, 56, 61, 64, 65, 73, 74,
75, 77, 81, 82, 88, 99, 101, 131, 132, 134, 138, 139, 140
kebutuhan pendidikan dan psikososial 51
kebutuhan psikososial 51, 97, 101, 120
kekerasan berbasis gender 29, 60, 81, 82, 105, 145, 151
kelangsungan pendidikan 31, 40, 69, 132, 133
kemampuan baca tulis 3, 8
kerentanan 11, 12, 26, 46, 48, 75, 135, 143, 151
kesehatan dan gizi 90, 91
keseimbangan gender 117, 120, 145
kesejahteraan 9, 33, 36, 60, 69, 74, 78, 79, 84, 86, 91, 97, 102, 127, 143, 150, 151, 152
kesetaraan akses 71
kesiapsiagaan 4, 5, 12, 13, 16, 20, 21, 38, 43, 46, 48, 49, 56, 57, 76, 85, 107, 131, 134,
135, 136, 143, 144, 150
kesiapsiagaan terhadap bencana 4, 16, 135, 136
kesiapsiagaan tanggap darurat 56
ketahanan 3, 11, 25, 32, 48, 91, 117, 139, 151
keterampilan hidup 57, 74, 84, 97, 98, 100, 103, 105, 142, 148, 150, 152
keterlibatan masyarakat 131
klaster pendidikan 12, 13, 20, 21, 26, 41, 43, 52, 144
kode etik 81, 83, 84, 112, 122, 123, 124
kolaborasi 4
komite koordinasi antar-lembaga 40, 45, 106
komite pendidikan masyarakat 29, 30, 31, 83, 89, 142
kompensasi guru 15, 32, 41, 42, 121, 123
kompetensi dasar 100, 110
kondisi kerja 117, 122, 123
konten pembelajaran 95, 98
kontrak 117, 122
koordinasi 2, 4, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 26, 32, 35, 40, 41, 43, 45, 52, 57, 61, 65, 76, 82,

87, 91, 99, 106, 109, 123, 136, 139, 140, 144, 147, 150
korupsi 47, 135, 140
kriteria pemilihan 120
kurikulum 2, 3, 9, 30, 31, 34, 83, 95, 96, 97, 98, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 112, 132,
147, 149, 150

L

layanan 4, 11, 22, 25, 32, 46, 50, 51, 56, 57, 71, 79, 80, 86, 87, 90, 91, 102, 105, 106,
112, 122, 134, 143, 144
lingkungan belajar 101, 104, 105, 107, 109, 112, 117, 122, 124, 125, 127, 133, 135,
137, 138, 139
lokasi 29, 45, 51, 56, 71, 75, 78, 80, 82, 87, 90, 111, 135, 142, 148
lokasi belajar 75, 78, 90, 148

M

manajemen informasi 42, 147
manajemen kelas 84, 105
mata pencaharian 33, 56, 95, 100, 149, 150, 151
materi belajar-mengajar 107
memperbarui strategi respon 55
mitigasi konflik 10, 12, 28, 36, 38, 59, 88, 142, 143
mobilisasi sumber daya 25, 32, 37, 38, 40, 41

N

non-diskriminasi 8, 47, 124, 131, 136, 146

O

orang berkebutuhan khusus 72, 85, 88
organisasi non-pemerintah 7, 60, 132
otoritas pendidikan 8, 12, 26, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 56,

57, 63, 64, 71, 75, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 112, 122, 123,
126, 131, 135, 136, 138, 144, 145, 150

P

partisipasi 3, 8, 9, 17, 22, 25, 28, 32, 33, 34, 38, 49, 50, 72, 76, 82, 85, 117, 126, 127,
134, 136, 140, 143, 145, 147, 149

partisipasi masyarakat 17, 22, 25, 28, 32, 46, 54, 82, 85, 126, 133, 140

pelajar 1, 2, 3, 26, 36, 37, 47, 48, 61, 62, 64, 69, 71, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 90, 95, 97, 99,
101, 102, 103, 104, 107, 108, 111, 112, 113, 119, 127, 132, 142, 147, 148, 149,
150

pelaku non-pemerintah dan PBB 137

pelanggaran 34, 51, 60, 80, 83, 148

pelatihan dan pengembangan profesional 126

pelatihan guru 106

pelatihan kejuruan 57, 100, 134, 142

peluang 2, 33, 71, 74, 104, 111, 126, 134, 149

pemangku kepentingan 3, 5, 8, 13, 16, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 40, 43, 44, 46, 50, 53, 54,
60, 63, 64, 76, 77, 97, 102, 106, 109, 121, 122, 123, 131, 133, 134, 136, 140, 145,
147, 151

pemantauan 21, 25, 28, 31, 32, 33, 37, 43, 44, 45, 49, 59, 60, 62, 63, 84, 102, 104, 112,
125, 133, 140, 147

pembangunan 2, 4, 5, 6, 16, 26, 32, 33, 36, 42, 51, 55, 56, 57, 62, 74, 76, 83, 86, 90, 101,
123, 131, 136, 138

pembangunan jangka panjang 131, 138

pembelajaran aktif 108

pembelajaran jarak jauh 75, 79

pembelajaran partisipatoris 149, 150

pemuda 79, 86, 89, 99, 117, 120, 121, 133, 134, 136, 138, 142, 145

pemulihan 1, 3, 4, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 34, 41, 42, 49, 55, 56, 57, 59, 61, 69, 76, 95, 98,
99, 101, 103, 107, 117, 118, 123, 131, 132, 139, 142, 143, 144, 150

penampungan sementara 51, 76, 77, 79

pencegahan 3, 26, 48, 50, 57, 85, 90, 97, 104, 105, 107, 133, 143, 146, 148, 150

pendaftaran 17, 56, 64, 71, 73, 89

pendanaan 22, 41, 42, 56, 139

pendidikan anak usia dini 1, 6, 10, 36, 37, 41, 56, 57, 74, 102, 117, 133, 134, 138, 144
pendidikan berkualitas 3, 8, 13, 16, 20, 36, 41, 69, 131, 150
pendidikan dalam situasi darurat 1, 3, 6, 8, 16, 20, 59, 69, 72, 76, 117, 118, 144, 150
pendidikan formal 31, 71, 74, 97, 98, 99, 103, 109, 112, 117, 138, 141, 142, 145, 149
pendidikan inklusif 3, 10, 15, 53, 54, 56, 105, 138, 147
pendidikan non formal 148, 149
pendidikan yang relevan 41, 71, 75, 99, 103, 104, 126, 151
pengakuan dan akreditasi 107
pengakuan kontribusi 38
pengalaman dan kualifikasi 119
pengantar 15
pengembangan profesional 9, 95, 104, 126
pengungsi 3, 6, 7, 22, 56, 71, 97, 99, 102, 103, 106, 107, 112, 121, 123, 132, 136, 137,
147, 148, 151
pengungsi internal 3, 137
pengurangan risiko bencana 3, 10, 12, 28, 29, 31, 36, 38, 56, 57, 59, 78, 85, 97, 100,
104, 105, 143
penilaian 152
penilaian kinerja 125, 126
penilaian risiko 151
peningkatan kapasitas 16, 25, 26, 29, 35, 53, 54, 64, 126
peran dan tanggung jawab 30, 38, 41, 117, 119
perekrutan dan seleksi 10, 117
perekrutan dan seleksi guru 117
perencanaan dan pelaksanaan 10, 21, 25, 33, 34, 131, 134, 135, 138
Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 72
perlindungan 1, 2, 7, 8, 10, 36, 37, 42, 60, 69, 73, 76
perlindungan anak 100
perlindungan dan kesejahteraan 78
pertimbangan etis 47
peserta didik 3, 4, 28, 30, 47, 56, 57, 62, 64, 69, 72, 75
peserta didik dewasa 56, 57
prioritas pendidikan 75
promosi kebersihan 19, 32, 90, 139
proses belajar 95, 108, 109, 147, 148

Proyek Sphere 7, 19, 20

R

referensi 15, 42, 121

rencana aksi pendidikan lokal 31

rencana pendidikan lokal dan nasional 138, 139

respons donor 55

respons kemanusiaan 4, 5, 11, 49, 144

respons kesiapsiagaan 38

respons pendidikan 20, 25, 26, 27, 29, 36, 40, 43, 44, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 63, 135, 136, 144

risiko 1, 2, 5, 10, 12, 21, 28, 29, 31, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 65, 69, 70, 76, 78, 80, 82, 85, 87, 95, 97, 100, 104, 105, 107, 121, 134, 143, 146, 148, 151

ruang belajar 2, 3, 29, 36, 37, 48, 64, 69, 78, 86, 89, 148

ruang ramah-anak 74, 78

rute akses 78, 82

S

sanitasi 2, 4, 9, 10, 19, 32, 42, 51, 77, 86, 88, 90, 139, 144

serangan 29, 31, 32, 60, 78, 82, 83, 84

standar 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146

standar dasar 9, 10, 11, 15

Standar Minimum INEE 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 43

strategi respons 25, 53, 55

struktur 2, 40, 71, 77, 85, 86, 87, 88, 151

sumber daya 10, 11, 16, 22, 25, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 41, 45, 46, 49, 51, 54, 60, 62, 69, 71, 76, 90, 109, 136, 139, 140, 141, 143, 146, 149

sumber daya masyarakat 36, 38

sumber informasi 2, 46

T

tempat penampungan sementara 76, 77, 79

temuan 43, 48, 52, 53, 64, 65

tidak mencederai 26, 54

tim 45, 47, 51, 61

tinjauan dan pengembangan 98

transparansi 5, 17, 37, 40, 111, 140, 141

transparansi dan akuntabilitas 37, 140

tujuan belajar 98, 112

U

ukuran kelas 90, 122, 152

V

validitas data 50, 60

Lampiran 4: FORMULIR UMPAN-BALIK

Informasi Kontak	
Tanggal:	Nama:
Organisasi dan Jabatan:	
Alamat:	
Telepon:	
E-mail:	

1. Silakan tulis cara-cara yang Anda atau organisasi Anda pakai dalam menggunakan Standar Minimum. Tulislah serinci mungkin dan mencakup cara (jika ada) di mana Anda menyesuaikan aksi kunci di dalam buku pegangan untuk konteks Anda dan terhadap pekerjaan proyek Anda / organisasi / struktur koordinasi dan lain-lain.

2. Tantangan-tantangan apa saja yang telah anda alami ketika menggunakan buku pedoman ini dan bagaimana cara Anda mengatasinya?

3. Dapatkah Anda berbagi pengalaman dan / atau contoh-contoh praktik yang baik setelah menggunakan buku ini? Apa saja dampak yang terjadi dalam pekerjaan Anda setelah menggunakan buku pegangan ini pada pekerjaan Anda?

4. Berdasarkan pengalaman Anda, informasi tambahan dan / atau alat apa saja yang akan membuat buku ini lebih efektif dan relevan?

5. Silakan memberikan komentar tambahan atau umpan balik tentang buku ini.

Terima kasih telah berbagi pengalaman Anda atas penggunaan Standar Minimum Pendidikan: Kesiapsiagaan, Respons, Pemulihan. Umpan balik ini akan menginformasikan *update* dan strategi untuk promosi Standar Minimum. Silahkan mengisi kuesioner ini dan kirimkan melalui *email* ke **minimumstandards@ineesite.org** atau kirim melalui surat ke INEE Coordinator for Minimum Standards, c/o UNICEF – Education Section, 3 United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA. Anda juga dapat mengisi formulir umpan-balik secara *online* di: **www.ineesite.org/feedback**.